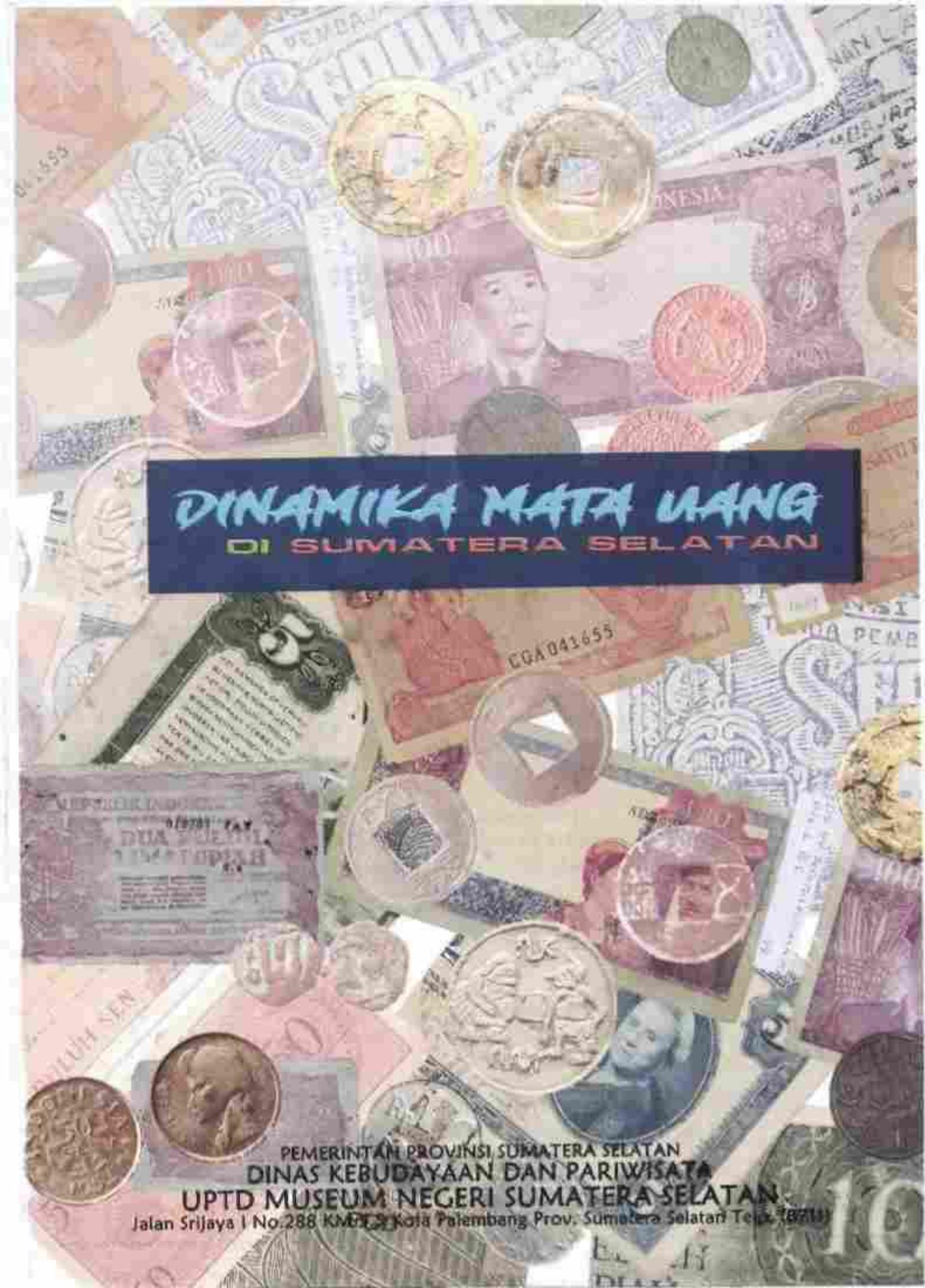


DINAMIKA MATA UANG DI SUMATERA SELATAN



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
UPTD MUSEUM NEGERI SUMATERA SELATAN

Jalan Srijaya I No.288 KM.5.5 Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan Telp. (0711) 411382



DINAMIKA MATA UANG
DI SUMATERA SELATAN

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
UPTD MUSEUM NEGERI SUMATERA SELATAN
Jalan Sri Jaya I No.288 KM.12,5 Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan Telp. (81) 787111

DINAMIKA MATA UANG DI SUMATERA SELATAN

Pengarah:

**Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan,
Aufa Syahrizat, S.P., M.Sc.**

Penanggung Jawab:

**Kepala UPTD Museum Negeri Sumatera Selatan,
H. Chandra Amprayadi, S.H.**

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan:

Shelvi Yuliani, S.Pd.

Tim Penulis:

**Dr. Imam Asngari, S.E., M.Si.
Drs. Syafruddin Yusuf, M.Pd., Ph.D.
Dudy Oskandar, S.H.**

Tim Penyunting:

**Dr. Imam Asngari, S.E., M.Si.
Beny Pramana Putra, S.S.**

Diterbitkan oleh:

**MUSEUM NEGERI SUMATERA SELATAN
Jl. Srijaya I No. 288 Km. 5,5 Palembang Telp. (0711) 411382**

ISBN: 978-623-97403-1-3

Cetakan Pertama:

September 2021, vii+106/113 Hlm. A4

HAK CIPTA DILINDUNGI UNDANG-UNDANG





SAMBUTAN
KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas diterbitkannya buku hasil pengkajian koleksi “Dinamika Mata Uang di Sumatera Selatan” melalui Dana Alokasi Khusus NonFisik (DAK-NF) Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya (BOP-MTB) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2021. Kegiatan penulisan hasil pengkajian koleksi merupakan salah satu tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan, khususnya UPTD Museum Negeri Sumatera Selatan untuk meningkatkan potensi nilai dan informasi koleksi museum.

Kegiatan penulisan buku seperti ini menjadi salah satu cara untuk mengkaji benda-benda koleksi museum—warisan sejarah dan budaya di masa lalu yang sarat dengan nilai sejarah, pengetahuan, agama, budaya, dan pariwisata. Hasil pengkajian koleksi diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam mengembangkan permuseuman, kebudayaan, dan pariwisata di Provinsi Sumatera Selatan. Oleh sebab itu, kegiatan-kegiatan seperti ini hendaknya dapat terus dilaksanakan serta ditingkatkan kualitasnya di masa-masa mendatang.

Mudah-mudahan, upaya UPTD Museum Negeri Sumatera Selatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan menerbitkan buku ini bermanfaat bagi masyarakat luas, khususnya pelajar, mahasiswa, dan peneliti, sebagai data awal untuk melakukan penelitian lanjutan. Akhirnya, kepada tim penulis dan semua pihak yang telah memprakarsai serta mendukung diterbitkannya buku “Dinamika Mata Uang di Sumatera Selatan” ini, kami ucapkan terima kasih.

Palembang, Agustus 2021

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROVINSI SUMATERA SELATAN


AUFA SYAHEZAL, S.P., M.Sc.
Pembina Utama Madya
NIP. 196408141987031009



SAMBUTAN

KEPALA UPTD MUSEUM NEGERI SUMATERA SELATAN



Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas diterbitkannya buku hasil pengkajian koleksi “Dinamika Mata Uang di Sumatera Selatan”. Kegiatan ini—khususnya pengkajian koleksi merupakan bagian dari Program Pengelolaan Koleksi Museum Negeri Sumatera Selatan yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus NonFisik (DAK-NF) Bantuan Operasional Penyelenggaraan Museum dan Taman Budaya (BOP-MTB) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tahun Anggaran 2021.

Pengkajian koleksi sebagai salah satu kegiatan museum sangat relevan dengan visi dan misi museum—sebagai sebuah lembaga kebudayaan yang selalu berupaya untuk menggali, meneliti, dan mempublikasikan benda-benda koleksi museum dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan, kebudayaan, dan pariwisata. Selain itu, kegiatan pengkajian koleksi juga sangat penting dalam menunjang suksesnya fungsionalisasi museum. Sebuah museum tidak mungkin berfungsi dengan baik tanpa adanya pengkajian koleksi—karena koleksi adalah “jantungnya” museum yang memiliki peranan dan fungsi yang sangat besar dalam menilai kemajuan atau keberhasilan museum.

Dengan terbitnya buku “Dinamika Mata Uang di Sumatera Selatan”, diharapkan dapat menjadi bagian dari pelestarian budaya bangsa serta pemanfaatannya dalam berbagai aspek, seperti sejarah, budaya, agama, dan pariwisata. Hasil pengkajian ini juga diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan permuseuman—sebagai referensi dalam pengelolaan koleksi (dokumentasi dan re-inventarisasi) serta publikasi museum (label, *booklet*, *leaflet*, dan pameran).

Akhirnya, kami ucapkan terima kasih kepada tim penulis, narasumber, dan semua pihak yang telah memprakarsai dan mendukung diterbitkannya buku ini. Semoga dengan terbitnya buku ini akan bermanfaat bagi masyarakat luas, khususnya pelajar, mahasiswa, dan peneliti.

Palembang, Agustus 2021

KEPALA UPTD MUSEUM NEGERI
SUMATERA SELATAN


H. CHANDRA AMPRAYADI, S.H.
Pembina Tingkat I
NIP. 196606101986091001



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, berkat Rahmat dan Karunia-Nya, penulisan buku hasil pengkajian koleksi tahun 2021 “Dinamika Mata Uang di Sumatera Selatan” dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Penyusunan buku ini sebagai upaya untuk mendata, mereinventarisasi, dan menganalisis nilai-nilai penting dalam mata uang koleksi Museum Negeri Sumatera Selatan, mulai dari masa kerajaan Hindu-Buddha hingga Pemerintahan Republik Indonesia, baik logam maupun kertas. Referensi atau literatur dalam penulisan buku ini berasal dari studi kepustakaan, wawancara dengan narasumber/tenaga ahli, internet, dan studi koleksi museum. Studi kepustakaan dan wawancara dilakukan di berbagai instansi kebudayaan di Provinsi Sumatera selatan. Kegiatan wawancara juga dilakukan di Museum Negeri Sumatera Selatan dalam bentuk rapat kajian yang melibatkan enam orang narasumber/tenaga ahli dari kalangan seperti sejarawan, budayawan, dan ekonom. Sedangkan studi koleksi museum diperlukan untuk mengambil data dan foto koleksi yang berhubungan dengan materi penulisan buku.

Penulisan buku hasil pengkajian koleksi ini menggunakan pendekatan tematis, dengan tema-tema tertentu, yaitu uang dalam kehidupan masyarakat, sejarah mata uang di Sumatera Selatan, mulai dari masa kerajaan Hindu-Buddha hingga revolusi fisik kemerdekaan Indonesia, sejarah Rupiah sebagai mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mata uang koleksi Museum Negeri Sumatera Selatan.

Dengan menggunakan pendekatan ini, diharapkan dapat mempermudah pemahaman materi kesejarahan tentang dinamika mata uang di Sumatera Selatan, dari masa kerajaan Hindu-Buddha hingga Pemerintahan Republik Indonesia, melalui berbagai disiplin ilmu pendukungnya, seperti Ekonomi, Sejarah, Politik, Antropologi, dan Filologi.

Kami menyadari bahwa buku ini masih terdapat kekurangan. Untuk itu, semua saran dan kritik yang konstruktif akan kami terima dengan senang hati, demi perbaikan dan penyempurnaan di masa-masa mendatang. Akhirnya, kepada semua pihak yang turut membantu dan terlibat dalam penyusunan buku ini, kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya.

Palembang, Agustus 2021

Tim Penulis



DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Sambutan	iii
Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi	vi
PENDAHULUAN	1
Perkembangan Uang	2
Dinamika Mata Uang di Sumatera Selatan	4
Urgensi Kajian Sejarah Uang	6
Identifikasi Masalah	7
Tujuan Kajian	7
Kerangka Pemikiran.....	8
Metode Kajian	10
UANG DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT	12
Pengertian Uang.....	12
Fungsi Uang	13
Penciptaan Uang.....	15
Peranan Uang dalam Perekonomian	18
Peranan Uang dalam Dimensi Ekonomi-Politik	20
Pencetakan dan Kebijakan Peredaran Uang.....	22
SEJARAH MATA UANG DI SUMATERA SELATAN	26
Mata Uang Masa Kerajaan Hindu-Buddha	26
Mata Uang Kesultanan Palembang Darussalam	28
Mata Uang VOC dan Hindia Belanda.....	29
Mata Uang Pendudukan Jepang	30
Mata Uang Masa Awal Kemerdekaan dan Revolusi Fisik Kemerdekaan Indonesia.....	31
Mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia	40



MATA UANG KOLEKSI MUSEUM NEGERI SUMATERA SELATAN	43
Mata Uang Masa Kerajaan Hindu-Buddha.....	43
Mata Uang Masa Kerajaan Islam dan Pengaruh Barat	48
Mata Uang Masa Hindia Belanda	51
Mata Uang Masa Pendudukan Jepang	55
Mata Uang Masa Awal Kemerdekaan dan Revolusi Fisik Kemerdekaan Indonesia.....	57
Mata Uang Masa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).....	65
PENUTUP.....	94
Kesimpulan	94
Saran.....	98
Daftar Pustaka	103
Daftar Narasumber	106

PENDAHULUAN

Salah satu penemuan manusia yang tergolong fenomenal adalah uang. Uang menjadi komoditas penting yang mampu mengubah wajah kehidupan dan peradaban. Kehidupan ekonomi semakin efisien dengan ditemukannya uang. Bisa dibayangkan, seandainya, kita yang hidup di zaman ini belum mengenal uang dan masih melakukan barter atau menggunakan barang (komoditas) sebagai alat pertukaran. Ketika manusia masih dalam era berburu, mereka belum mengenal uang. Namun, setelah mengenal cara bercocok tanam, kemudian, terjadi kelebihan produksi, mereka mulai berpikir untuk menjual barang produksinya agar mendapatkan barang lain yang tidak mereka produksi—di situlah muncul ide barter. Dalam perkembangannya, barter memunculkan sejumlah kesulitan karena menyaratkan antarpihak harus memiliki keinginan yang sama serta mencapai kesepakatan tentang standar nilai barang yang dipertukarkan—sehingga muncullah ide ataupun gagasan untuk menciptakan uang.

Perkembangan uang bermula dari uang komoditas—berasal dari komoditas tertentu, misalnya kayu, batu, kulit hewan, cangkang kerang, dan besi—hingga diciptakan uang logam yang terbuat dari emas dan perak. Uang logam sudah dikenal sejak 600–500 Sebelum Masehi. Uang logam pun mengalami pasang-surut karena keterbatasan bahan baku sehingga pada awal abad Masehi, seseorang dari Tiongkok menciptakan uang kertas. Keberadaan uang kertas membuat penggunaan uang semakin meluas. Uang logam dan kertas digunakan secara bersamaan hingga sekarang, di seluruh dunia. Dinamika uang pun telah melahirkan babakan sejarah baru bagi umat manusia.

Dinamika uang juga terjadi di Nusantara—kerajaan-kerajaan di Nusantara meninggalkan jejak dinamika uang melalui artefak mata uang yang dibuat dan digunakan pada masanya. Kedatuan Sriwijaya menggunakan uang emas dan perak sebagai alat pembayaran dalam perdagangan—baik di wilayah kekuasaannya maupun dalam transaksi perdagangan internasional—sementara Kerajaan Majapahit membuat mata uang *Gobog*. Kerajaan-kerajaan Islam yang berkuasa di Nusantara pada periode berikutnya, seperti Kesultanan Palembang Darussalam juga menerbitkan mata uang “sendiri” yang dikenal dengan Pitis Palembang—sebagai alat pembayaran yang sah di wilayahnya. Selain itu, mata uang asing juga beredar dan digunakan dalam transaksi perdagangan di wilayah Nusantara. Mata uang asing—sebagai mata uang internasional—yang paling populer pada periode tersebut



adalah mata uang Kekaisaran Tiongkok (Keping) hingga mata uang Spanyol (*Real*). Mata uang asing tersebut juga digunakan sebagai standar pengukur nilai mata uang lokal saat itu.

Perkembangan Uang

Menurut KBBI Daring (2016), uang berarti alat tukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara, berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu; uang juga diartikan sebagai harta atau kekayaan. Satuan (harga) uang suatu negara disebut dengan mata uang. Sepanjang peradaban manusia, uang telah mengalami perubahan dan perkembangan. Masyarakat prasejarah, pada awalnya, hidup berkelompok dan dapat memenuhi kebutuhannya sendiri (*self sufficient*). Namun, setelah terjadinya interaksi suatu kelompok masyarakat dengan kelompok lainnya yang tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, menimbulkan gagasan untuk melakukan pertukaran, baik antarindividu maupun antarkelompok (Solikin dan Suseno, 2002: 3–4).

Pertukaran antarindividu maupun antarkelompok masyarakat, pada awalnya, dilakukan dengan menukarkan suatu barang dengan barang lainnya. Sistem pertukaran barang dengan barang tersebut dikenal dengan istilah “barter”. Kondisi yang harus dipenuhi dalam sistem barter, jika seseorang bertemu dengan orang lain yang akan menukarkan barangnya dan barang tersebut adalah barang yang saling dibutuhkan. Seiring semakin kompleksnya kehidupan ekonomi suatu masyarakat, kondisi tersebut semakin sulit ditemukan sehingga secara bertahap, timbulah kebutuhan terhadap suatu alat pertukaran untuk mempermudah tukar-menukar ataupun perdagangan antarindividu dan antarkelompok masyarakat (Solikin dan Suseno, 2002: 4).

Penggunaan alat pertukaran, semula, hanya didasarkan pada kesepakatan antara masyarakat yang mempergunakannya. Proses ini berlangsung secara bertahap dan sangat lama. Berbagai benda dikembangkan sebagai alat pertukaran untuk dapat dipergunakan dalam perdagangan—pada umumnya adalah benda yang dianggap berharga serta berguna untuk konsumsi maupun produk. Benda yang dipergunakan sebagai uang komoditas tersebut, pada umumnya, juga mudah dibawa dan tidak mudah rusak atau tahan lama, seperti kulit kerang, batu permata, gading, telur, garam, beras, hewan ternak, atau benda-benda lainnya (Davies, 2002).



Penggunaan uang komoditas tentunya hanya berlaku dalam suatu kelompok masyarakat atau di wilayah tertentu. Namun, hubungan (perdagangan) antara kelompok masyarakat antarwilayah semakin meluas sehingga transaksi perdagangan memerlukan suatu benda yang lebih praktis sebagai pengganti uang komoditas. Dalam perkembangan selanjutnya, masyarakat menggunakan logam mulia, seperti emas dan perak sebagai uang—dapat dipecah-pecah dan dinyatakan dalam unit-unit kecil sehingga mempermudah suatu transaksi. Selain itu, uang “logam mulia” juga mudah dibawa dan tahan lama (Solikin dan Suseno, 2002: 5). Penggunaan logam mulia sebagai alat pertukaran, selanjutnya, juga mengalami pasang-surut sebagai akibat terbatasnya ketersediaan dan/atau mahalnyanya biaya penambangan (McKinnon, 1993). Selain emas dan perak, tembaga juga sangat diminati—lebih mudah didapat sehingga nilainya juga lebih murah. Dengan semakin diminatinya uang tembaga, menyebabkan menurunnya peredaran uang emas dan perak (Solikin dan Suseno, 2002: 6).

Penggunaan logam mulia sebagai uang juga menimbulkan permasalahan, khususnya untuk transaksi dengan jumlah besar—karena selain adanya biaya pengangkutan, risiko lain mungkin akan terjadi, misalnya perampokan. Oleh karena itu, logam mulia dikonversikan menjadi sertifikat berharga yang dikeluarkan oleh lembaga swasta maupun pemerintah—nilai sertifikat berdasarkan nilai logam mulia yang disimpan di bank. Pada perkembangan selanjutnya, nilai sertifikat tersebut tidak sepenuhnya bergantung pada nilai simpanan logam, misalnya hanya 40% simpanan emas. Dengan demikian, nilai nominal pada sertifikat tidak sama dengan nilai logam mulia yang disimpan (nilai intrinsik). Nilai nominal suatu mata uang, apabila lebih besar dibandingkan dengan nilai intrinsiknya, disebut dengan “uang fiat”. Dalam hal ini, uang diakui sebagai tanda setuju (Davies, 2002).

Simpanan logam mulia sebagai jaminan peredaran uang kertas juga mengalami pasang-surut. Dalam sejarahnya, pasca-Perang Dunia I, uang kertas sempat beredar tanpa jaminan simpanan emas hingga disepakatinya “Kesepakatan *Bretton Woods*” untuk mengaitkan kembali mata uang dunia dengan simpanan emas pasca-Perang Dunia II. Namun, sebagai akibat dari meningkatnya transaksi pasar uang dan barang, pembiayaan dengan emas dianggap tidak memadai, Kesepakatan *Bretton Woods* pun akhirnya dibatalkan pada 1971. Hingga saat ini, mata uang dunia tidak lagi dikaitkan dengan simpanan emas. Pengelolaan (pencetakan) uang suatu negara, sepenuhnya, berdasarkan kebijakan dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing negara (Solikin dan Suseno, 2002: 7-8).



Selain uang tunai—berupa kertas maupun logam—dalam transaksi ekonomi, terdapat penggunaan uang non-tunai yang sudah dikenal secara terbatas sejak abad XVIII Masehi—saat dimulainya evolusi sistem perbankan modern. Hingga, baru pada awal abad XX Masehi, proses *giroalisasi*, yaitu penyimpanan uang dalam bentuk rekening giro (*demand deposit*) dikenal secara luas, bahkan jumlahnya melebihi uang tunai yang beredar. Simpanan tabungan (*savings deposit*) juga mulai dikenal. Pada 1950-an, jumlah simpanan tabungan lebih besar dibandingkan simpanan giro. Baik simpanan giro maupun tabungan, dalam transaksinya, menggunakan uang non-tunai—hingga saat ini disebut dengan “cek”. Namun, perkembangan teknologilah yang pada akhirnya mengarahkan pada penggunaan uang “elektronis” (*electronic money* atau *e-money*) yang dinilai lebih efisien dibandingkan cek (Solikin dan Suseno, 2002: 8).

Sejak 1990-an, uang elektronis, seperti *internet banking*, *debit cards*, dan *automatic teller machine (ATM) cards* cenderung masih digunakan oleh masyarakat. Uang elektronis bahkan juga muncul dalam bentuk *smart cards*. Penggunaan *smart cards* sangat praktis, yaitu dengan “mengisi” *chips* dengan sejumlah uang yang dikehendaki, lalu menggunakannya untuk transaksi (Solikin dan Suseno, 2002: 8–9). Dalam perkembangan saat ini, telah muncul uang digital (*digital money*) dan mata uang *Kripto*. Mata uang *Kripto* adalah aset digital yang dirancang untuk bekerja sebagai media pertukaran yang menggunakan Kriptografi yang kuat untuk mengamankan transaksi keuangan, mengontrol penciptaan unit tambahan, dan memverifikasi transfer aset (https://id.m.wikipedia.org/wiki/Mata_uang_kripto#:~:text=Mata%20uang%20kripto%20adalah%20aset,tambahan%2C%20dan%20memverifikasi%20transfer%20aset).

Dinamika Mata Uang di Sumatera Selatan

Menurut Memet dalam Isnaeni (2020: 9), uang logam perak koleksi Museum Nasional (Nomor Inventarisasi 2087 dan 2119) peninggalan masa kerajaan Hindu-Buddha merupakan bukti tertua penggunaan uang di Pulau Jawa. Diperkirakan, uang ini telah digunakan sekitar 569 Saka atau 647 Masehi (Isnaeni, 2020: 9). Reid dalam Isnaeni (2020: 10) juga mengungkapkan bahwa di Pulau Jawa, prasasti-prasasti tidak lagi menyebutkan mata uang Jawa (perak dan emas) setelah 1300-an, kecuali “Picis”, yaitu mata uang dari Tiongkok—terbuat dari tembaga, bentuknya kecil dan bulat, serta mempunyai lubang persegi di bagian tengahnya. Picis tersebut juga dikenal dengan sebutan “Kepeng”. Kepeng sangat banyak



ditemukan di beberapa daerah di Indonesia—mulai tersebar bersamaan dengan meningkatnya aktivitas perdagangan antara Kekaisaran Tiongkok dan kerajaan-kerajaan di Nusantara (Lombard dalam Isnaeni, 2020: 10). Kepeng yang ditemukan di Indonesia berasal dari berbagai dinasti yang pernah berkuasa di Kekaisaran Tiongkok, yaitu Dinasti Han, Tang, Song, Yuan, Ming, dan Qing (Artanegara, 2019).

Selain di Pulau Jawa, aktivitas perdagangan dengan Kekaisaran Tiongkok juga dilakukan oleh kerajaan-kerajaan di Pulau Sumatera, bahkan jauh sebelum era Kedatuan Sriwijaya. Kedatuan Sriwijaya yang berkuasa sejak abad VII Masehi meninggalkan jejak-jejak aktivitas perdagangan dengan Kekaisaran Tiongkok melalui berbagai artefak, seperti gerabah, keramik, dan manik-manik. Hingga saat ini, bukti penggunaan mata uang yang dibuat oleh Kedatuan Sriwijaya belum ditemukan, padahal di Sumatera Selatan (sebagai pusat pemerintahan Kedatuan Sriwijaya), khususnya di Daerah Aliran Sungai (DAS) Musi, banyak sekali ditemukan Kepeng—dari Dinasti Qin hingga Qing. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa hingga saat ini, mata uang tertua yang digunakan di Sumatera Selatan adalah Kepeng yang diduga berasal Dinasti Qin—walaupun penggunaan “alat tukar” lainnya serta sistem barter telah berlangsung sebelumnya, bahkan sejak masa prasejarah, di antaranya pada masa Megalitikum di kawasan Dataran Tinggi Pasemah (Indriastuti, 2010: 77–79).

Setelah keruntuhan Kedatuan Sriwijaya pada abad XIII Masehi (versi lain menyebutkan pada abad XIV Masehi), tepatnya ketika wilayah Sumatera Selatan memasuki era Pengaruh Majapahit, mata uang lain yang juga digunakan adalah mata uang Kerajaan Majapahit, yaitu *Gobog*. Kepeng dan *Gobog* setidaknya masih digunakan hingga 1500-an (Reid dalam Isnaeni, 2020: 10).

Pada periode pemerintahan kerajaan Islam di Sumatera Selatan (abad XVI–XIX Masehi), Kerajaan Palembang dan Kesultanan Palembang Darussalam juga mengeluarkan mata uang, yaitu “Pitis” yang terbuat dari campuran timah hitam dan putih. Sedangkan pada periode yang hampir bersamaan, kedatangan VOC (*Verenigde Oostindische Compagnie*) ke Sumatera Selatan juga membawa bermacam-macam mata uang, seperti *Rijksdaalder*, *Dukat*, *Stuiver*, *Gulden*, dan *Doit*. Bahan yang digunakan adalah emas, perak, tembaga, nikel, dan timah. Mata uang VOC tersebut dibuat di Belanda (Karim dalam Isnaeni, 2020: 10). Pada 1854, setelah Hindia Belanda—termasuk Sumatera Selatan—dikuasai oleh Kerajaan Belanda, diputuskan semua mata uang yang digunakan di Hindia Belanda diganti dengan mata uang yang beredar di Belanda, walaupun penyatuan mata uang tersebut baru terlaksana setelah

1930 (Lombard dalam Isnaeni, 2020: 11). Namun, penyatuan mata uang berakhir pada masa Pendudukan Jepang. Pada awalnya, Pemerintah Pendudukan Jepang tidak mencetak mata uang khusus untuk daerah-daerah Pendudukan. Mata uang lama dari pemerintahan sebelumnya, yakni *Gulden* (Rupiah Belanda) dan *Gulden* “Jepang” masih berlaku. Hingga, pada akhirnya, Jepang menerbitkan mata uang baru (Isnaeni, 2020: 11). Seri *De Japansche Regeering* adalah uang kertas pertama yang diterbitkan oleh Pemerintah Pendudukan Jepang—dengan nilai nominal 5 Gulden.

Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, mata uang Pendudukan Jepang masih dianggap sah bersama mata uang *De Javasche Bank* (DJB) emisi 1925–1941 dan mata uang Pemerintah Hindia Belanda emisi 1940–1941. Pemerintah Indonesia menerbitkan *Oeang Republik Indonesia* (ORI), tetapi juga harus berhadapan dengan mata uang NICA (*Netherlands-Indies Civil Administration*). Karena terhambatnya peredaran ORI, Pemerintah Provinsi Sumatera bahkan mengambil inisiatif untuk mencetak uang sendiri dengan nama *Oeang Republik Indonesia Provinsi Sumatera* (ORIPS). Beredarnya ORIPS di Sumatera, pada akhirnya, membuat Pemerintah Pusat mengizinkan pencetakan ORIPS. Selanjutnya, uang yang dicetak oleh pemerintah lokal di bawahnya disebut ORIDA (*Oeang Republik Indonesia Daerah*) (Isnaeni, 2020: 11).

Menyusul terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS), setelah pengakuan kedaulatan melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949, terbit pula uang RIS yang disebut “uang federal”. Namun, pada 17 Agustus 1950, Pemerintah Republik Indonesia menyatakan RIS dibubarkan. Bentuk pemerintahan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peredaran uang RIS juga menyusul kemudian. Hingga kini, Rupiah masih menjadi mata uang resmi yang berlaku di Indonesia (Isnaeni, 2020: 11).

Urgensi Kajian Sejarah Uang

Kajian sejarah uang menjadi penting untuk menelusuri dinamika penciptaan, peranan, dan kebijakan peredaran mata uang di Sumatera Selatan. Kajian dinamika uang memerlukan penelusuran melalui literatur serta artefak mata uang yang ada di Museum Negeri Sumatera Selatan.

Museum Negeri Sumatera Selatan merupakan museum umum yang berada di bawah naungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Museum ini, terhitung Juni 2021, memiliki 15.853 koleksi yang dikelompokkan dalam sepuluh klasifikasi, yaitu (1) Geologika; (2)

Biologika; (3) Etnografika; (4) Arkeologika; (5) Historika; (6) Numismatika dan Heraldika; (7) Filologika; (8) Keramologika; (9) Seni Rupa; dan (10) Teknologi Modern. Berdasarkan klasifikasi koleksi tersebut, artefak mata uang merupakan bagian dari koleksi Numismatika—berjumlah 11.076 buah yang berasal dari masa kerajaan Hindu-Buddha hingga Pemerintahan Republik Indonesia (Emisi 2005).

Dalam rangka memenuhi tugas dan fungsi museum, yaitu melindungi, mengembangkan, memanfaatkan koleksi, dan mengomunikasikannya kepada masyarakat maka diperlukan pengelolaan koleksi yang optimal. Salah satu kegiatan pengelolaan koleksi adalah penelitian atau pengkajian koleksi. Pengkajian koleksi dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan potensi nilai dan informasi koleksi untuk dikomunikasikan kepada masyarakat; pengembangan ilmu pengetahuan; pengembangan kebudayaan; dan/atau menjaga kelestarian koleksi museum. Sehubungan dengan hal tersebut, melalui Program Pengelolaan Koleksi, Museum Negeri Sumatera Selatan melaksanakan pengkajian terhadap koleksi mata uang yang dikemas dalam sebuah buku kajian koleksi dengan judul *"Dinamika Mata Uang di Sumatera Selatan"*.

Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, ada beberapa permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini, yaitu (1) uang dalam kehidupan masyarakat; (2) sejarah mata uang di Sumatera Selatan, mulai dari masa kerajaan Hindu-Buddha hingga revolusi fisik kemerdekaan Indonesia; (3) sejarah Rupiah sebagai mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia; dan (4) mata uang koleksi Museum Negeri Sumatera Selatan.

Tujuan Kajian

Sebagai sebuah kajian ilmiah, penulisan ini memiliki beberapa tujuan yang dikelompokkan menjadi tujuan umum dan khusus. Tujuan umum penulisan ini adalah melaksanakan penelitian atau pengkajian koleksi dalam upaya memberikan informasi tentang benda-benda yang penting bagi kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Selain itu, untuk menyiapkan data dan informasi dalam rangka pengembangan Museum Negeri Sumatera Selatan, khususnya di bidang pengelolaan koleksi (katalogisasi dan *database* koleksi) serta publikasi (pameran, *booklet*, *leaflet*, dan buku panduan museum). Sedangkan tujuan khusus penulisan ini adalah memberikan gambaran tentang pengertian, penciptaan, peranan, dan

kebijakan peredaran uang dalam kehidupan ekonomi, sosial, politik, dan budaya masyarakat, mengulik dinamika mata uang di Sumatera Selatan, mulai dari masa kerajaan Hindu-Buddha hingga awal kemerdekaan Indonesia; menelusuri sejarah peredaran mata uang Republik Indonesia di Sumatera Selatan, baik yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Daerah pada masa revolusi fisik kemerdekaan Indonesia maupun Rupiah emisi 1951—2005; serta mendokumentasikan mata uang koleksi Museum Negeri Sumatera Selatan.

Kerangka Pemikiran

Penulisan sejarah dengan pendekatan deskriptif-naratif tidak lagi dapat menjelaskan berbagai masalah atau gejala yang serba kompleks dalam kehidupan masyarakat di masa lalu. Kartodirdjo (1993: 120) menemukan solusi untuk mengatasi problematik tersebut—dengan menciptakan sebuah metodologi sejarah yang menggunakan pendekatan ilmu Sosial atau yang lebih dikenal dengan Pendekatan Multidimensional (*Social Scientific*). Ilmu Sosial merupakan salah satu rumpun ilmu yang mengkaji aspek-aspek kehidupan manusia, peristiwa, dan lingkungannya. Teori dan konsep dalam ilmu Sosial merupakan alat analitis yang relevan untuk keperluan analisis historis—karena studi Sejarah tidak hanya pada pengkajian hal-hal informatif tentang apa, siapa, kapan, di mana, dan bagaimana, tetapi juga terkait dengan struktur masyarakat, pola perilaku, dan kecenderungan proses dalam berbagai bidang. Semua data tersebut memerlukan alat analitis yang tajam dan mampu mengekstrapolasikan fakta, unsur, pola, dan sebagainya.

Pendekatan ilmu Sosial dianggap sangat tepat dalam penulisan sejarah mata uang di Sumatera Selatan, khususnya ilmu Ekonomi, Sejarah, Politik, Antropologi, dan Filologi. Dengan menggunakan pendekatan tersebut, generalisasi dicapai melalui analisis dan gambaran yang khusus diperoleh melalui narasi. Generalisasi lebih bersifat kuantitatif, sedangkan gambaran khusus lebih kualitatif. Hubungan antara berbagai gejala ditentukan berdasarkan hubungan kausalitas atau sebab akibat yang selanjutnya dirumuskan sebagai eksplanasi. Sedangkan hubungan kualitatif dirumuskan dengan menggunakan interpretasi. Untuk menggambarkan hubungan atau korelasi teori dan konsep dalam pengkajian ini maka diperlukan sebuah kerangka pemikiran sebagai berikut:



Bagan 1. Alur Metode Kajian

Berdasarkan bagan metode kajian di atas, data (*input*) yang diperoleh, baik data fisik maupun nonfisik akan diproses dengan pendekatan ilmu-ilmu Sosial, yaitu ilmu Ekonomi, Sejarah, Politik, Antropologi, dan Filologi. Pendekatan ilmu Ekonomi digunakan sebagai landasan dalam menganalisis dinamika uang dalam kehidupan masyarakat. Untuk mengungkap sejarah mata uang di Sumatera Selatan, mulai dari masa kerajaan Hindu-Buddha hingga masa revolusi fisik kemerdekaan Indonesia, diperlukan kajian ilmu Sejarah, sedangkan untuk mengkaji sistem dan perilaku politik pemerintah terkait kebijakan peredaran uang, diperlukan pendekatan ilmu Politik. Pendekatan antropologi digunakan untuk meneliti dan menganalisis berbagai dimensi budaya yang berhubungan dengan dinamika mata uang di Sumatera Selatan. Selain itu, dibutuhkan juga disiplin ilmu Filologi untuk mengetahui kandungan isi pada tulisan ataupun teks yang terdapat pada mata uang koleksi Museum Negeri Sumatera Selatan. Kelima disiplin ilmu tersebut saling mendukung untuk memperoleh atau menghasilkan bahan analisis. Hasil analisis yang merupakan akhir penulisan dapat

dijadikan sebagai data atau sumber bagi penelitian berikutnya—tetapi juga memungkinkan adanya perubahan menuju kesempurnaan penulisan.

Metode Kajian

Untuk melakukan proses penulisan, diperlukan sebuah metode kajian yang terdiri dari (1) pengumpulan data; (2) analisis data; (3) penulisan laporan; (4) seminar; dan (5) penulisan buku. Metode pengumpulan data merupakan kegiatan awal dalam suatu penelitian. Dalam tahap pengumpulan data ini, diusahakan untuk mendapatkan data yang diperlukan sebanyak mungkin. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan dan studi koleksi museum.

Studi kepustakaan adalah teknik pengumpulan data melalui berbagai literatur, seperti buku, majalah, jurnal, artikel, makalah yang berkaitan dengan sejarah mata uang di Sumatera Selatan, serta data pendukung lainnya, seperti dokumentasi artefak (bukan koleksi) yang memiliki relevansi dengan tema kajian. Melalui studi kepustakaan ini, setidaknya, diharapkan dapat menghasilkan latar belakang penulisan dan juga melengkapi atau sebagai pembanding data-data lainnya. Sedangkan studi koleksi museum adalah teknik pengumpulan data secara langsung ke lapangan—menggunakan data primer, berupa mata uang koleksi Museum Negeri Sumatera Selatan, mulai dari masa kerajaan Hindu-Buddha hingga Pemerintahan Republik Indonesia, baik uang logam maupun kertas. Hasil kegiatan lapangan ini, selanjutnya, didokumentasikan. Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan dan pemotretan objek yang diteliti sehingga diperoleh keterangan yang lengkap dan akurat.

Mata uang koleksi Museum Negeri Sumatera Selatan diinventarisasi atau dideskripsikan (ukuran, asal, pemilik, keadaan/kondisi). Penganalisan data dilakukan secara cermat-cermatnya, baik secara tekstual maupun kontekstual, termasuk di dalamnya meninjau kembali pendapat serta konsep-konsep yang dikemukakan oleh para sarjana terdahulu. Dalam penganalisan data ini, dilakukan analisis komparatif, yaitu membandingkan kutipan-kutipan yang satu dengan yang lain, terutama yang mempunyai kemiripan dengan topik permasalahan yang akan dikaji sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang lebih akurat.

Tahapan terakhir dari kegiatan ini adalah penulisan. Penulisan menggunakan metode deskriptif analitik. Metode ini memiliki langkah-langkah dalam proses penulisan. Setelah data terkumpul, baik berupa hasil studi kepustakaan maupun dokumentasi koleksi, kemudian,

dipilah-pilah atau diseleksi sesuai dengan keperluan atau dapat digunakan pada bagian atau bab tertentu. Selanjutnya, diolah dan ditulis dalam bentuk deskripsi yang disertai dengan analisis.



UANG DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT

Pengertian Uang

Uang adalah segala sesuatu yang dapat diterima oleh masyarakat secara luas sebagai alat pembayaran yang sah dalam proses pertukaran barang atau jasa. Secara tradisional, dalam kegiatan ekonomi, uang dimaknai sebagai segala macam benda yang dapat dimanfaatkan menjadi alat tukar—dengan syarat benda tersebut diterima oleh masyarakat umum di suatu wilayah. Pada perkembangan selanjutnya, secara modern, ilmu Ekonomi memberikan makna uang yang lebih luas. Uang merupakan segala sesuatu yang berwujud benda dan diterima secara umum sebagai alat pembayaran transaksi dalam jual beli atas barang atau jasa; penyimpan kekayaan atau aset berharga lainnya; serta pembayaran dari transaksi yang tertunda, yaitu utang-piutang (Mishkin, 1992: 7).

Manullang (1977: 13–15) menuliskan pendapat para pakar Ekonomi tentang uang, antara lain (1) Robertson, dalam bukunya *“Money”*, mendefinisikan, *“money is something which is widely accepted in payments for goods”* (uang sebagai segala sesuatu yang umum diterima dalam pembayaran jual beli barang-barang); (2) R.S. Sayers, dalam bukunya *“Modern Banking”*, mengartikan, *“money is widely accepted for the settlement of debts”* (uang sebagai sesuatu yang umum diterima masyarakat luas sebagai pembayar utang); (3) A.C. Pigou, dalam bukunya *“The Veil of Money”*, mengatakan, *“money are those things that are widely used as a media for exchange”* (uang adalah segala sesuatu yang umum dipergunakan sebagai alat pertukaran).

Uang, pada prinsipnya, adalah suatu benda yang diterima secara umum dan dapat dipertukarkan dengan benda lain; digunakan untuk menilai benda lain; disimpan; dan memiliki nilai yang relatif tidak berubah-ubah (tetap). Pada awalnya, uang hanya difungsikan sebagai alat tukar, tetapi fungsi uang terus berkembang seiring dengan perkembangan aktivitas perekonomian. Solikin dan Suseno (2002: 2) dan Juhro (2020: 258) menyatakan bahwa uang memiliki fungsi sebagai berikut (1) alat tukar (*medium of exchange*); (2) alat penyimpan nilai (*store of value*); (3) satuan hitung (*unit of account*); dan (4) ukuran pembayaran yang tertunda (*standard for deferred payments*). Berdasarkan konsep dan fungsi uang tersebut, dapat disimpulkan bahwa uang merupakan suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat di suatu wilayah yang berfungsi sebagai alat tukar, pengukur nilai, satuan hitung, pembayaran setiap transaksi, serta untuk menimbun kekayaan.

Fungsi Uang

Secara umum, menurut Mankiw (1999: 155–156), uang memiliki fungsi dasar sebagai alat tukar, penyimpan nilai, dan satuan hitung. Selain itu, uang juga memiliki fungsi dasar sebagai ukuran pembayaran yang tertunda (Solikin dan Suseno, 2002: 2; Manurung dan Rahardja, 2004: 10–12).

Alat Tukar (*Medium of Exchange*)

Uang dapat berfungsi sebagai alat tukar. Sulit dibayangkan apabila dalam kehidupan ekonomi yang modern ini tidak terdapat benda (uang) sebagai alat pertukaran. Tanpa uang, transaksi hanya bisa dilakukan secara barter, yaitu tukar-menukar suatu benda dengan benda atau jasa lainnya. Misalnya: petani yang menghasilkan karet memiliki banyak karet—tetapi tidak mampu menghasilkan beras sehingga harus menemui petani beras yang menginginkan karet. Terkadang, petani beras yang berhasil ditemui tidak membutuhkan karet, justru membutuhkan ikan. Akhirnya, petani karet terus berkeliling mencari siapa yang membutuhkan karet. Demikian juga dengan petani beras, terus mencari nelayan yang bersedia ditukarkan ikan dengan beras. Dalam proses tersebut, barter hanya bisa dilakukan jika semua pihak memiliki keinginan yang sama (*double coincidence of wants*). Beruntung apabila nelayan membutuhkan karet untuk membuat kapal sehingga petani karet akan menukarkan karet miliknya dengan sejumlah ikan untuk memperoleh beras. Proses tersebut pun tentunya sangatlah melelahkan. Namun, jika petani karet membutuhkan beras, petani beras membutuhkan ikan, dan nelayan membutuhkan karet berjumpa di suatu tempat secara bersamaan maka barter dapat dilangsungkan secara efisien. Begitulah titik temu awal terbentuknya pasar-pasar tradisional yang ada dalam rangka barter. Melalui pasar, barter dapat dilakukan secara lebih efisien. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, pasar barter tersebut mengalami kesulitan dalam menentukan satuan hitung barang atau jasa yang dibarterkan. Berapa kilogram karet harus ditukarkan dengan ikan atau berapa ekor ikan yang harus ditukarkan dengan beras, atau berapa kilogram beras harus ditukarkan dengan karet? Kesulitan inilah yang menimbulkan ide untuk menggunakan uang sebagai alat tukar yang memiliki nilai dan satuan hitung.

Uang sebagai alat tukar, artinya bahwa para pelaku ekonomi menerima uang untuk digunakan sebagai alat tukar—guna membeli barang atau jasa. Para penjual pun menerima uang atas barang atau jasa yang dijualnya. Perekonomian yang menggunakan uang akan semakin efisien karena transaksi dapat dilakukan di mana, ke siapa, dan kapan saja—baik transaksi dalam jumlah kecil maupun besar (Manurung dan Rahardja, 2004: 11).

Alat Penyimpan Nilai (*Store of Value*)

Uang sebagai penyimpan nilai—terkait dengan sifat manusia yang gemar mengumpulkan dan menyimpan kekayaan dalam bentuk barang-barang berharga yang dapat berupa tanah, rumah, binatang piaraan (kuda, kerbau, sapi, dan kambing), serta benda logam (emas dan perak), bahkan kendaraan maupun uang itu sendiri. Kekayaan tersebut akan disimpan agar dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan di masa yang akan datang. Uang menjadi pilihan praktis karena mudah dan aman disimpan untuk kemudahan transaksi di kemudian hari.

Uang sebagai penyimpan nilai—memungkinkan untuk menyimpan setiap hasil produksi atau penciptaan nilai tambah dalam aset yang sangat likuid dan nilai nominalnya tidak akan berubah. Misalnya: petani kopi, pada 2020, menghasilkan 400 kilogram biji kopi. Harga biji kopi saat ini adalah 10 ribu rupiah per kilogram—maka nilai produksi petani kopi tersebut adalah 4 juta rupiah. Jika uang tidak menyimpan nilai maka petani kopi tersebut—untuk memenuhi kebutuhannya dalam satu tahun—harus menyimpan kopi dalam bentuk biji kopi kering. Risiko yang akan dihadapi oleh petani adalah penyusutan atau rusaknya biji kopi sehingga saat akan ditukar dengan barang atau jasa lain, petani kopi harus melakukan barter. Kesulitannya adalah menemukan orang yang memiliki keinginan yang sama untuk menukarkan barang yang dimilikinya dengan kopi si petani.

Satuan Hitung (*Unit of Account*)

Uang sebagai satuan hitung akan memudahkan dalam penilaian barang. Suatu barang yang dipertukarkan akan memiliki standar nilai—jika dinilai dengan uang. Tanpa satuan hitung maka seekor kerbau akan dihargai sama dengan dua ekor sapi atau satu kilogram beras akan dihargai sama dengan satu ekor ikan gabus. Tentunya, barter

tidak akan menghasilkan standar nilai yang sama untuk masing-masing barang. Uang menjadi solusi—jika 1 ekor kerbau dihargai 60 juta rupiah dan 1 ekor sapi dihargai 20 juta rupiah maka pertukaran 1 ekor kerbau dengan 2 ekor sapi akan mengakibatkan penurunan nilai tukar kerbau. Apabila masyarakat sudah menggunakan uang, seharusnya nilai 1 ekor kerbau setara dengan 3 ekor sapi sehingga transaksi barter kerbau dengan sapi memiliki standar satuan hitung.

Ukuran Pembayaran Tertunda (*Standard of Deferred Payment*)

Uang menjadi ukuran dalam pembayaran yang tertunda untuk masa yang akan datang. Uang memudahkan seseorang dalam mengukur pinjaman dan mengembalikannya pada waktu yang akan datang. Misalnya: seseorang meminjam uang 10 juta rupiah maka dalam waktu 2 tahun mendatang akan mengembalikan senilai 10 juta rupiah pula. Berbeda apabila ia meminjam 1 ekor sapi berumur 1 tahun dan akan mengembalikannya dua tahun kemudian maka sapi tersebut seharusnya sudah berkembang (menjadi lebih besar)—karena umurnya sudah mencapai 3 tahun. Namun, pada praktiknya, utang sapi tersebut dibayar pula dengan sapi lain yang berumur 1 tahun. Transaksi pembayaran yang tertunda ini, kemudian, menimbulkan ide tentang perlunya ongkos meminjam sehingga ketika uang sudah menjadi komoditas pinjam-meminjam maka lahirlah konsep bunga sebagai kompensasi rasional manusia untuk biaya meminjam sebagai bentuk balas jasa kepada pihak pemilik uang. Persoalannya kemudian, apakah yang meminjam ini dalam keadaan kesulitan hidup ataukah untuk investasi? Sehingga lahirlah konsep bagi hasil investasi dalam Islam. Kepada mereka yang sedang mengalami kesulitan hidup, menjadi tidak bermoral apabila meminjamkan uang dengan bunga. Namun, dalam pandangan Kapitalis dan Sosialis, bunga adalah wajar sebagai ongkos meminjam uang—karena uang sebagai bentuk kekayaan dan dipergunakan untuk pembayaran.

Penciptaan Uang

Sebelum uang tercipta, barter telah lama dilakukan oleh manusia yang didasarkan karena saling membutuhkan. Seseorang yang memiliki makanan dan membutuhkan pakaian akan saling tukar-menukar makanan dengan pakaian yang mereka miliki masing-masing. Sistem barter memberikan standar kepada komoditas dasar yang hampir dimiliki oleh semua

orang, seperti garam, teh, tembakau, dan biji-bijian yang dijadikan sebagai standar atau alat pembayaran. Pada 9000 hingga 6000 Sebelum Masehi, uang komoditas yang dipakai berubah menjadi ternak—bukan lagi barang yang berukuran kecil. Dalam masa itu, kita mengenal komoditas yang dijadikan alat tukar, berupa ternak, kulit, bulu, minyak, alkohol, tembakau, besi, tembaga, emas, perak, intan, berlian, mutiara, kerang, dan lain sebagainya. Kemudian, muncul budaya pertanian sehingga uang komoditas (*commodity money*) yang dipakai adalah gandum, sayuran, atau tumbuhan lainnya.

Pada perkembangan selanjutnya, kesulitan yang dirasakan dalam transaksi barter menyebabkan ditemukannya alat tukar yang dapat diterima secara bersama sehingga hampir mendekati fungsi uang saat ini. Seiring berjalannya waktu, sekitar 1200 Sebelum Masehi, uang primitif mulai dipakai. Uang primitif adalah cangkang kerang atau moluska lainnya yang dipakai sebagai alat pembayaran—bernama “*Cowrie*”. Cangkang atau *Cowrie* berasal dari Kepulauan Maladewa di Samudra Hindia, *Cowrie* telah menjadi barang berharga sejak awal peradaban Tiongkok dan India yang selanjutnya dibawa sepanjang rute perdagangan ke Afrika. Orang Eropa menamakannya “*Wampum*” yang menjadi mata uang di pasar. Jenis uang “barang” berbeda-beda di seluruh bagian dunia sesuai dengan perkembangan peradaban masing-masing (SimulasiKredit.com, 2021).

Hingga saat ini, kita masih bisa menyaksikan di dalam museum—bahwa logam-logam dibentuk seperti harimau, kerbau, kambing, dan binatang lain dengan berat dan ukuran yang berbeda serta memiliki nilai yang berbeda pula. Logam pun masih tetap dijadikan sebagai uang, tetapi dengan bentuk baru, yaitu bulat atau persegi. Masing-masing benda tersebut mempunyai kebaikan dan keburukan apabila jiberlakukan sebagai alat tukar (*medium of exchange*).

Barang-barang yang besar dan hewan hidup, tentunya, tidak dapat dibagi untuk mencerminkan nilai yang lebih kecil; belum tentu semua barang tersebut dapat disimpan lama tanpa mengurangi nilainya. Barang barter juga susah untuk dibawa karena tidak dapat diringkaskan ataupun dilipat. Sebaliknya, uang, nilainya bisa dibagi dan mudah untuk dibawa ke manapun. Emas dan perak menjadi pilihan tepat untuk dijadikan sebagai uang karena nilainya stabil. Pada 560–546 Sebelum Masehi, Croesus menciptakan uang logam yang dipakai oleh bangsa Yunani (Sugiyanto dan Lestari, 2011: 1.6). Dalam sejarah uang, bangsa ini dikenal sebagai penemu uang logam. Emas dan perak pernah memegang peranan, dalam waktu yang lama, sebagai alat pembayaran dan pelunasan utang, baik di dalam negeri

maupun internasional, sehingga banyak ahli yang ingin kembali ke zaman keemasan emas dan perak. Salah satu keunggulan emas adalah nilai nominalnya (nilai yang tertulis pada uang) sama dengan nilai intrinsiknya (nilai bahan yang dijadikan uang). Kestabilan uang emas dan perak karena nilai nominalnya sama dengan intrinsiknya.

Uang juga terus berkembang dari semula sebagai alat tukar, menjadi alat ukur, hingga mendorong transaksi. Pada awalnya, setiap manusia berusaha untuk memenuhi kebutuhannya sendiri. Penggunaan uang, pertama kali, diprakarsai oleh bangsa Lydia pada 570–546 Sebelum Masehi (Yuliadi, 2008: 5) (sebagian mencatat sekitar 700–600 Sebelum Masehi) (ThoughtCo., 2019). Saat itu, di masa Croesus (570–546 Sebelum Masehi), dicetak uang emas dan perak secara halus dan akurat. Pencetakan uang logam tersebut dilanjutkan oleh Raja Lydia Alyattes dari Turki yang mencetak uang koin resmi. Uang tersebut terbuat dari campuran emas dan perak yang disebut “Elektrum” serta berbentuk seperti kacang polong. Perbandingan antara emas dan perak adalah 75:25 yang disebut sebagai “*standard money*” (uang standar). Selain itu, bangsa Yunani membuat uang dari perak yang dinamakan “*Drachma*” sekitar 406 Sebelum Masehi. Bangsa Romawi mencetak uang emas yang disebut “*Denarius*” dengan gambar Julius Caesar sejak abad III Masehi. Bangsa Persia juga telah mengenal uang; mencetak uang berbentuk bulat dari perak sekitar 546 Sebelum Masehi (Yuliadi, 2008: 6).

Pada perkembangan selanjutnya, beberapa negara mengalami kesulitan untuk mendapatkan bahan baku emas dan perak—maka berkembanglah pemikiran untuk membuat uang kertas. Uang kertas, pertama kali, diciptakan oleh orang Tiongkok pada abad I Masehi—masa Dinasti Tang (Sugiyanto dan Lestari, 2011: 1.7). Uang kertas tersebut berhasil diciptakan oleh Ts'ai Lun dengan memakai kulit kayu murbei. Setelah terciptanya uang kertas, kegiatan ekonomi di berbagai negara mulai berkembang dan pembayarannya pun menggunakan mata uang yang sah yang dicetak oleh pemerintahnya.

Nilai nominal uang kertas lebih tinggi daripada nilai intrinsiknya (*token money*). Sampai sekarang, uang kertas ini masih berlaku. Namun, semakin lama, semakin terasa pula bahwa uang kertas ini pun mempunyai kekurangan. Dengan inflasi barang yang murah saja, memerlukan jumlah uang yang banyak. Untuk membeli barang yang mahal, seseorang harus membawa wadah uang yang besar (karung atau koper). Jika uangnya dicuri atau dirampok maka habislah uang yang satu karung atau satu koper itu. Untuk mengatasi masalah tersebut, berkembanglah apa yang dinamakan uang giral. Uang giral dapat berasal dari

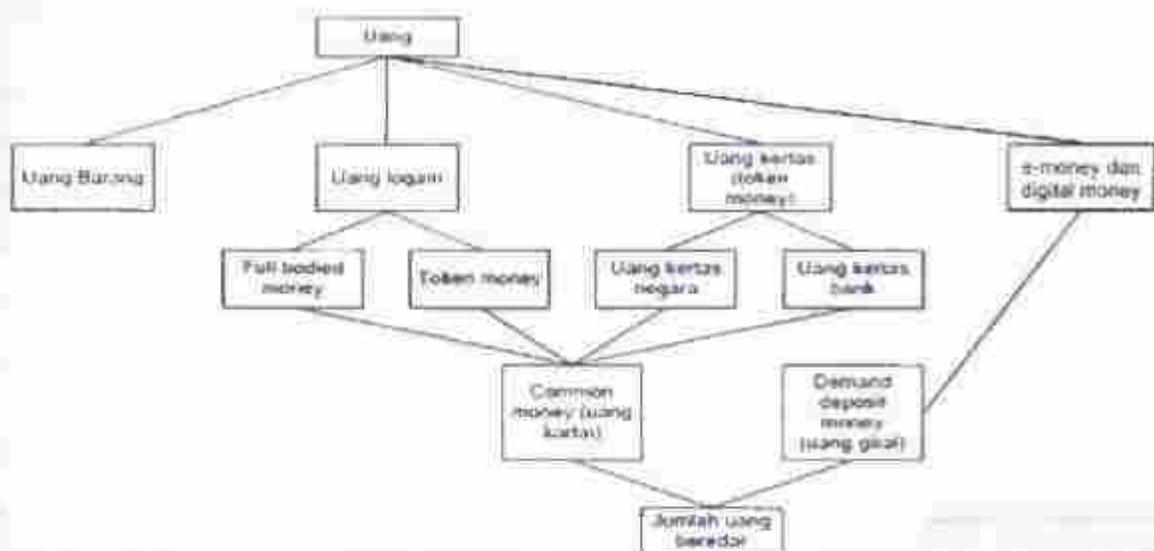
simpanan giro di bank atau lembaga keuangan lainnya. Apabila si penyimpannya ingin “bayar-membayar”, ia cukup menggunakan sehelai cek yang di atasnya ditulis sejumlah pembayaran yang tepat.

Setelah negara-negara di dunia semakin bertambah kuat dan mampu secara hukum untuk memaksakan suatu benda dijadikan alat tukar, setiap pemerintah memiliki mata uang sendiri sebagai tolok ukur perkembangan ekonomi, sekaligus menjadikan mata uang sebagai kekuatan ekonomi suatu negara atau kerajaan. Mata uang menjadi indikator kemajuan ekonomi dan wibawa raja atau pemerintahan negara yang memiliki kekuasaan politik dan berdaulat.

Peranan Uang dalam Perekonomian

Uang, dalam sejarahnya, memiliki peranan penting dalam kehidupan ekonomi masyarakat dan perekonomian suatu negara. Uang memiliki peranan dalam menyempurnakan fungsi pasar, yaitu alokasi sumber daya, penjaga stok barang, dan menumbuhkan usaha yang efisien dalam kegiatan ekonomi. Uang menjadi alokasi sumber daya input produksi untuk memilih faktor produksi yang tepat dengan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan sehingga produksi akan semakin tinggi dan nilai produksinya akan mendatangkan pendapatan dan keuntungan, berupa uang. Fungsi uang di pasar juga membantu para pedagang memiliki stok barang sehingga kebutuhan konsumen terpenuhi—dengan adanya uang. Uang, pada akhirnya, menumbuhkan usaha-usaha baru sehingga perekonomian akan berputar dan kegiatannya berlangsung efisien.

Uang, dalam perekonomian, berkembang dari era uang sebagai komoditas (*commodity money*). Dalam sejarahnya, bahan yang digunakan untuk benda yang disebut uang tersebut bersifat *evoluf*. Artinya: bahan uang berevolusi dari yang semula terbuat dari komoditas (*commodity money*) menjadi metalik (*metallic money*), hingga saat ini, terbuat dari kertas (*paper money*)—baik kertas biasa maupun hologram. Perkembangan terakhir, uang sudah berubah menjadi elektrik (*e-money*) dan hologram digital (*digital money*), seperti *Cryptocurrency*. Secara skematis, dinamika bahan uang dapat digambarkan sebagai berikut:



Bagan 2. Dinamika Uang yang Beredar di Masyarakat
sumber: Sugiyanto dan Lestari, 2011: 1.16, dengan Modifikasi

Masyarakat primitif atau dalam perekonomian yang tertutup (*close economic*), umumnya, masih menggunakan uang komoditas, seperti kulit binatang, kulit kayu, cangkang kerang, tanah liat, bambu, dan sebagainya. Mengingat jumlah persediaan bahan uang tersebut melimpah maka kontrol terhadap peredaran jumlah uang komoditas sangatlah sulit. Apabila setiap anggota masyarakat bebas membuat uang tersebut, dapat dipastikan nilainya sangat rendah karena jumlah uang yang beredar terlalu banyak dan tidak terbatas. Jika hal tersebut terjadi hingga saat ini, dapat menyebabkan inflasi yang sangat tinggi (*hyperinflation*). Oleh karena itu, semua pemerintahan, baik kerajaan maupun negara, menyadari bahwa perlu diciptakan uang berbahan logam; dari bahan yang tidak begitu tinggi nilainya, seperti besi, timah, kuningan, dan tembaga.

Pada awal abad Masehi, masyarakat dunia cenderung memilih logam emas dan perak. Alasannya, uang emas dan perak memiliki nilai yang sama antara nominal yang tertulis dan nilai bahan bakunya (*intrinsiknya*). Uang *dwi logam*, saat itu, dikenal dengan istilah uang *bimetallism* (bimetal) yang memiliki nilai sebagai uang penuh (*full bodied money*). Pertimbangannya—karena bahan uang ini memenuhi syarat-syarat uang, antara lain *Pertama*, bahan uang logam tidak mudah rusak dan tidak “busuk”. *Kedua*, emas dan perak memiliki harga yang tinggi. *Ketiga*, uang logam mudah disimpan. *Keempat*, mudah dibawa ke manapun. *Kelima*, mudah dipecah atau diperkecil dan tetap memiliki nilai yang standar. *Keenam*, tetap diterima dan disukai masyarakat sebagai alat pembayaran yang sah.

Pada perkembangan berikutnya, akibat kelangkaan emas dan perak, kedudukan uang logam (*full bodied money*) juga terdesak—sebagaimana halnya dengan uang barang (*commodity money*). Hal ini disebabkan karena bahan logam yang relatif langka dan pandangan pentingnya penggunaan uang yang lebih praktis. Akibatnya, uang logam tergeser kedudukannya oleh uang kertas. Sementara, uang logam, khususnya yang berbahan perak tetap mendampinginya. Uang logam yang kemudian diciptakan, tidak lagi terbuat dari logam mulia, melainkan besi, perunggu, dan timah. Pada saat inilah, dikenalnya uang yang tidak bernilai penuh (*token money*), yaitu nilai nominalnya lebih tinggi dari nilai intrinsiknya. Ketika uang logam telah dipergunakan, uang barang lenyap kedudukannya sebagai alat pertukaran—digantikan uang logam berkualitas lebih rendah (dari perunggu dan timah) dan kertas. Sementara pada waktu diperkenalkannya uang kertas di tengah-tengah masyarakat, uang logam sebagai *token money* tetap mendampinginya dalam lalu lintas pembayaran atau pertukaran. Berbagai negara di dunia, dewasa ini, menggunakan uang yang terbuat dari kertas dan logam biasa. Perkembangan terakhir—dengan semakin majunya perekonomian dan tingkat pengetahuan teknologi masyarakat—kini muncul uang digital, baik dalam bentuk uang elektronik (*e-money*) maupun digital (*digital money*)—sehingga penggunaan uang jenis ini jauh lebih praktis dibandingkan uang sebelumnya.

Peranan Uang dalam Dimensi Ekonomi-Politik

Uang memiliki peranan penting dalam ekonomi. Namun, secara politik, uang juga menjadi komoditas untuk mendukung kekuasaan. Pencetakan uang menjadi pertanda eksistensi kekuasaan politik sebuah negara atau bangsa. Contohnya: Kesultanan Palembang Darussalam menciptakan mata uang Pitis dengan tujuan politis, di antaranya untuk menunjukkan bahwa Kesultanan Palembang Darussalam merupakan sebuah pemerintahan absolut yang dipimpin oleh sultan yang berdaulat.

Pitis Palembang memiliki ciri-ciri yang menunjukkan adanya pengaruh Islam dan politik kekuasaan. Pada sisi depan uang yang diterbitkan oleh pemerintahan Islam di wilayah Sumatera Selatan tersebut, terdapat tulisan dengan huruf dan bahasa Arab yang sangat jelas menggambarkan peranan mata uang dalam dimensi politik kesultanan sebagai salah satu simbol eksistensinya—seperti "*Masru fih Balad Palembang*" (Dibuat di Negeri Palembang), "*Al-Sultan fii Balad Palembang*" (Sultan di Negeri Palembang), "*Hadza Fuluk Palembang*" (Inilah uang Palembang), dan "*Khalifah fii Balad Palembang Darussalam*"

(Pemimpin di Negeri Palembang Darussalam), dan “*Alamat Sultan*”. Pitis Palembang tertua, tercatat, diterbitkan pada 913 Hijriah (1508 Masehi), sedangkan yang termuda diterbitkan pada 1253 Hijriah (1838 Masehi). Sebagian besar uang tersebut terbuat dari timah putih yang banyak ditemukan di wilayah Kesultanan Palembang Darussalam, tepatnya di Kepulauan Bangka Belitung (Panji, 2020 dalam Asngari, dkk., 2020: 99).

Mata uang emas yang ditemukan di Jawa Tengah sekitar abad IX–X Masehi, umumnya, bertipe *piloncito*, yaitu uang yang ukurannya kecil, gepeng seperti dadu, dengan sudut-sudut membulat. VOC (*Verenigde Oostindische Compagnie*) membuat mata uang yang dinamakan “*Bank*”. *Bank* terbuat dari potongan batang tembaga, berbentuk segi empat, dan dicetak di Batavia. Setelah VOC bubar, Hindia Belanda dikuasai oleh Pemerintah Republik *Bataaf* (1799–1806). Uang yang dikeluarkan bertuliskan, “*Indie Batavorum*” dengan satuan nilai *Gulden* dan *Stuiver*. Ketika Belanda diduduki Prancis, Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels (1808–1811) mengedarkan mata uang bermisial “LN”, singkatan dari Louis Napoleon, adik Napoleon Bonaparte—Raja Prancis yang menguasai Belanda. Uang tersebut berbentuk bundar pipih dan terbuat dari tembaga. Inggris, kemudian, mengambil alih Hindia Belanda dengan pimpinannya Thomas Stamford Raffles sebagai Gubernur Jenderal (1811–1816). Raffles membuat mata uang *Rupie* yang berbentuk bundar pipih dan terbuat dari emas, perak, tembaga, dan timah. Pada kedua sisinya, tertera tulisan Jawa dan Arab. Mata uang tersebut dicetak di Batavia. Diperkirakan, “Rupiah”, mata uang Republik Indonesia, berasal dari *Rupie* yang ditulis dalam huruf Arab-Melayu dengan “*Rupiyah*”. Selain *Rupie*, beredar pula uang bertuliskan “EIC” (*East India Company*), yaitu Kongsi Dagang Hindia Timur (Isnaeni, 2020: 10–11).

Konteks pencetakan uang menjadi tanda adanya kekuasaan atau negara, misalnya Rupiah sebagai mata uang Republik Indonesia. Pada Rupiah, terdapat tulisan “Bank Indonesia” sebagai wakil eksistensi negara yang memiliki fungsi mencetak, mengatur, dan mengawasi peredaran uang di Indonesia.

Peranan uang dalam sejarah perekonomian selalu memberikan solusi atas setiap permasalahan ekonomi, baik terkait produksi, konsumsi maupun distribusi. Uang menjadi fondasi bagi ekonomi suatu negara. Negara yang kuat memiliki nilai mata uang yang juga kuat, contohnya Amerika Serikat. Negara adidaya tersebut memiliki mata uang *Dollar* yang nilainya sangat kuat dan beredar di seluruh dunia.

Amerika Serikat mengusung ideologi Kapitalisme—memberlakukan semua transaksi yang dilakukan suatu negara dengan Amerika Serikat harus dinilai dan dibayar dengan *Dollar* (USD). Pemberlakuan transaksi ekonomi dengan *Dollar* ini merupakan politik ekonomi Amerika Serikat, sementara negara yang memiliki kekuatan ekonomi dan politik yang “kecil” hanya bisa memaksakan sistem pembayaran dengan mata uangnya di dalam negeri.

Pencetakan dan Kebijakan Peredaran Uang

Pencetakan uang

Kehadiran uang di Nusantara dalam rangka memenuhi kebutuhan perdagangan serta sebagai alat pembayaran yang bisa diterima secara umum dan pengganti sistem barter. Pada awalnya, alat pembayaran yang digunakan masih sangat sederhana, seperti di wilayah Papua yang memakai kulit kerang dengan jenis tertentu; di wilayah Bengkulu dan Pekalongan memakai manik-manik; dan di wilayah Bekasi memakai *belincung* (semacam kapak batu) sebagai alat pembayaran saat itu (Bank Indonesia: 2020).

Seiring dengan semakin majunya perekonomian kerajaan-kerajaan di wilayah Nusantara maka dilakukan pencetakan uang. Pencetakan uang pada era tersebut dilaksanakan oleh pemerintah di bawah persetujuan para raja dan sebagian oleh kelompok masyarakat yang diberi izin untuk mencetak uang.

Kerajaan Majapahit membuat *Gobog* dari tembaga dan diperkirakan beredar pada abad XIV–XVI Masehi. Selain sebagai alat pembayaran, *Gobog* juga banyak digunakan sebagai benda keramat. Kesultanan Palembang Darussalam juga mengimplementasikan kebijakan untuk mencetak mata uang sendiri. Bahan bakunya adalah timah—karena tersedia di wilayah kesultanan. Berdasarkan bentuknya, uang Kesultanan Palembang Darussalam dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu *Pitis Tebok* dan *Pitis Buntu*.

Pada masa Kolonial Belanda, di Nusantara, beredar uang yang terbuat dari logam dan berbentuk bundar. Mata uang ini dikeluarkan oleh VOC pada awal abad XVIII Masehi. Pada bagian depan, terdapat tulisan “VOC” dan “1790”, sedangkan pada bagian belakang, terdapat lambang kerajaan Belanda. Uang kolonial Belanda ini berlaku hingga abad XIX Masehi.

Uang kertas, di Indonesia, pertama kali dicetak oleh Perusahaan Hindia Timur Belanda dalam bentuk surat kredit dari *Rijksdaalder* antara 1783 dan 1811. Selanjutnya,

kertas kredit *Gulden* Hindia Belanda pada 1815 hingga 1827 menjadi uang kertas *Gulden* yang diterbitkan oleh *De Javasche Bank* (DJB). Denominasi uang yang lebih rendah di bawah 5 *Gulden* telah dikeluarkan oleh Pemerintah pada 1919–1920 dan 1939–1940 karena kekurangan logam untuk perang. Sebaliknya, untuk sehari-hari, transaksi dilakukan dengan menggunakan koin (uang logam).

Sejarah peredaran uang di wilayah Republik Indonesia dapat ditelusuri sejak berdirinya DJB pada masa Pemerintahan Hindia Belanda. DJB yang berdiri tanggal 24 Januari 1828 dimaksudkan sebagai bank sirkulasi di wilayah Hindia Belanda. DJB, selain berfungsi sebagai bank sirkulasi yang boleh memberikan kredit, juga sebagai kasir pemerintah (tahun 1866) dan penstabil moneter yang juga bertugas mengedarkan uang (Sigalingging, dkk., 2004: 9–10).

Semasa pendudukan Jepang, antara 1942–1943, uang kertas *Gulden* diganti dengan “Rupiah”. Uang kertas Rupiah yang “sebenarnya”, baru diterbitkan pada 1946—selama perang kemerdekaan dengan Belanda. Mata uang ini dikenal sebagai “*Oeang Republik Indonesia*” (ORI)—mata uang pertama Republik Indonesia setelah merdeka. Pemerintah memandang perlu untuk mengeluarkan mata uang sendiri yang tidak hanya berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah, tetapi juga sebagai lambang utama negara merdeka.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1953 Tentang Penetapan Undang-undang Pokok Bank Indonesia, Bank Indonesia hanya menerbitkan uang kertas dengan pecahan 5 Rupiah ke atas, sedangkan pecahan di bawah 5 Rupiah dan uang logam dikeluarkan oleh Pemerintah. Namun, berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 27 Tahun 1965 Tentang Pengeluaran Uang Rupiah Baru yang Berlaku Sebagai Alat Pembayaran yang Sah bagi Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Penarikan Uang Rupiah Lama dari Peredaran, Bank Indonesia diberikan wewenang untuk mengeluarkan semua jenis Rupiah dalam pecahan. Barulah dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 Tentang Bank Sentral, Bank Indonesia menjadi pemegang hak tunggal untuk mengeluarkan uang.

Sejak era modern, di abad XIX Masehi, pada umumnya, pencetakan uang oleh negara sudah dilaksanakan melalui bank sentral, termasuk Rupiah sebagai mata uang resmi Negara Republik Indonesia—dalam pencetakan dan peredarannya dilakukan oleh

Bank Indonesia. Jumlah uang yang dicetak berdasarkan rencana jumlah nominal dan jumlah lembar Rupiah kertas, serta rencana jumlah nominal dan keping Rupiah logam.

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang maka pencetakan Rupiah dilakukan oleh Bank Indonesia dengan menunjuk Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia (Perum Peruri) sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak di bidang pencetakan Rupiah. Namun, dalam suatu keadaan, apabila Perum Peruri tidak sanggup memenuhi permintaan Bank Indonesia maka pencetakan Rupiah dilaksanakan oleh Perum Peruri bekerja sama dengan lembaga lain yang ditunjuk melalui proses yang transparan, akuntabel, serta menguntungkan negara. Dalam melaksanakan pencetakan Rupiah kertas, Perum Peruri menerapkan standar operasional prosedur yang berpengaman tinggi untuk menjamin mutu serta keamanan dan kerahasiaan proses pencetakan uang, mulai dari desain hingga penyediaan bahan.

Bank Indonesia, dalam proses pencetakan uang, wajib menyediakan bahan sebesar pesanan cetak, ditambah dengan tingkat salah cetak (*inschiet*). Oleh karenanya, dalam proses pencetakan, Bank Indonesia berkoordinasi secara intens dengan Perum Peruri untuk menjamin kelancaran proses pencetakan Rupiah sehingga keseluruhan pesanan cetak Rupiah dapat diselesaikan tepat waktu. Bahan uang tersebut juga harus lulus uji mutu di laboratorium untuk memastikan kesesuaian dengan spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Setelah uang kertas dan koin digunakan di berbagai negara, keluarlah uang elektronis berbasis kartu. Uang ini, biasanya, digunakan untuk pembayaran transportasi, di toko ritel hingga gerbang tol.

Kebijakan Peredaran Uang

Kebijakan peredaran uang ditempuh oleh masing-masing negara. Jika negara saling menjalin hubungan ekonomi dan melakukan transaksi jual beli antarnegara atau kegiatan ekspor dan impor maka kebijakan penggunaan mata uang kedua negara yang bekerja sama tersebut akan saling menukar mata uangnya sehingga harga yang disepakati menjadi nilai tukar (*kurs*). Peredaran uang suatu kerajaan atau negara berlaku dalam wilayahnya.

Kebijakan peredaran Rupiah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan suatu rangkaian kegiatan pengedaran Rupiah yang mencakup distribusi dan layanan kas untuk memenuhi kebutuhan kas di seluruh wilayah kerja Bank Indonesia, baik dalam bentuk pengiriman uang dari Kantor Pusat Bank Indonesia (KPBI) ke Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPwBI) maupun pengembalian uang dari KPwBI ke KPBI. Mekanisme distribusi Rupiah dilakukan dari KPBI ke KPwBI untuk selanjutnya didistribusikan ke KPwDN (Kantor Perwakilan Dalam Negeri) lainnya. Sementara kegiatan layanan kas bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat melalui penarikan dan penyetoran perbankan, termasuk Kas Titipan; penukaran uang rusak/cacat/lusuh kepada masyarakat melalui Kas Keliling; dan kerja sama dengan perbankan dan/atau instansi lain (Bank Indonesia, 2020).

SEJARAH MATA UANG DI SUMATERA SELATAN

Perbincangan tentang uang adalah hal menarik untuk dilakukan pengkajian. Hal ini disebabkan—uang mempunyai peranan penting sebagai alat pembayaran yang sah dalam aktivitas perekonomian di suatu negara, baik antar-masyarakatnya maupun dengan masyarakat lain. Uang, di Indonesia, sudah ada sejak berdirinya kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha dan terus berkembang pada masa kesultanan-kesultanan yang bercorak Islam. Beragam jenis mata uang yang diberlakukan saat itu—pada masa awal perkembangannya—digunakan untuk perdagangan, baik dengan masyarakat Nusantara maupun dengan bangsa-bangsa lain. Uang, pada masa itu, berbahan logam, baik logam mulia, seperti emas, perak, perunggu maupun logam lainnya. Dalam perkembangan selanjutnya, terjadi perubahan—uang juga dibuat dari bahan kertas sehingga dikenal dengan sebutan uang kertas.

Pengkajian tentang mata uang yang pernah beredar di Nusantara tidak dapat dilepaskan dari perjalanan panjang sejarah bangsa Indonesia. Pengkajian dibagi atas beberapa masa yang menggambarkan adanya suatu proses dan dinamika dari perkembangan mata uang tersebut. Dalam bagian ini, dibahas mata uang yang pernah beredar di Nusantara, khususnya wilayah Sumatera Selatan, yang menjadi bagian dari koleksi Museum Negeri Sumatera Selatan. Penyajiannya diawali dari mata uang masa kerajaan Hindu-Buddha (Sriwijaya dan Majapahit), mata uang Kesultanan Palembang Darussalam, mata uang VOC (*Verenigde Oostindische Compagnie*) dan Hindia Belanda, mata uang Pendudukan Jepang, mata uang masa awal kemerdekaan dan revolusi fisik kemerdekaan Indonesia, hingga mata uang Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mata Uang Masa Kerajaan Hindu-Buddha

Masa Kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara berlangsung sejak abad V sampai dengan abad XVI Masehi. Masa ini diawali dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Hindu, yaitu Kerajaan Kutai di Kalimantan Timur dan Taruma Negara di Jawa Barat. Meskipun demikian, belum ada bukti yang menunjukkan bahwa kedua kerajaan tersebut mengeluarkan mata uang sebagai alat tukar dalam kehidupan masyarakatnya. Sedangkan kerajaan yang bercorak Buddha diwakili oleh Kedatuan Sriwijaya yang berdiri pada abad VII Masehi—sesuai dengan Prasasti Kedukan Bukit yang berangka tanggal 5 Asadha 604 Saka (16 Juni 682 Masehi). Pada masa Sriwijaya, hubungan dagang antara kerajaan-kerajaan di Nusantara dan luar

Nusantara, seperti Tiongkok, Arab, dan India telah berjalan dengan baik. Berdasarkan data koleksi Museum Negeri Sumatera Selatan, mata uang masa Sriwijaya yang ditemukan adalah mata uang Kekaisaran Tiongkok—dari berbagai dinasti yang pernah berkuasa, misalnya Dinasti Tang (VII–X Masehi) dan Dinasti Song (X–XIII Masehi). Mata uang yang berlaku saat itu, umumnya, terbuat dari logam.

Meskipun Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim terbesar di Nusantara, tetapi belum ditemukan mata uang yang dikeluarkan oleh pemerintahnya. Hasil penemuan terbatas pada mata uang asing yang diperkirakan beredar sebagai alat transaksi perdagangan masa Sriwijaya. Hal ini, tentunya, berbeda di Pulau Jawa—ditemukan mata uang “*Ma*” yang diperkirakan berasal dari Kerajaan Mataram Kuno, sekitar 860 Masehi. *Ma* adalah mata uang lokal tertua yang tercatat beredar di Nusantara. Nilai nominal *Ma* dihitung berdasarkan ukuran berat. Satu keping *Ma* memiliki berat sekitar 0,6–2,4 gram. *Ma* dikenal dengan sebutan *Masa* (dengan berat 2,4 gram), *Atak* (1,2 gram), dan *Kupang* (0,6 gram).

Setelah Sriwijaya mengalami kemunduran dan berakhir pada penghujung abad XIII Masehi, berdirilah kerajaan bercorak Hindu, yaitu Majapahit yang didirikan oleh Raden Wijaya. Majapahit, sebagai kerajaan besar yang menggantikan kedudukan Sriwijaya, tetap melaksanakan perdagangan, baik yang bersifat internal (antar-kerajaan bawahannya di Nusantara) maupun dengan bangsa asing, terutama Tiongkok, Arab, dan India. Dalam aktivitas perdagangannya, Majapahit mengeluarkan mata uang sendiri yang terbuat dari tembaga dan kuningan. Mata uang Majapahit ini disebut dengan “*Gobog*”. Ciri umum *Gobog* adalah berbentuk lingkaran dengan lubang di bagian tengahnya. Di bagian kiri dan kanan lubang tersebut, terdapat gambar ayam jago. Ada pula uang logam yang menggambarkan tokoh pewayangan, seperti Gareng, Bagong, Semar, dan Petruk.

Selain mata uang lokal, pada masa Majapahit, juga beredar mata uang Kekaisaran Tiongkok yang terbuat dari timah, perak, maupun perunggu. Salah satu mata uang yang ditemukan terbuat dari perunggu; berbentuk lingkaran dengan lubang persegi di bagian tengahnya; berukuran diameter 2,4 cm dan berat 3 gram; kondisinya masih cukup baik—walaupun holong pada beberapa titik. Pada lingkaran terluar dan pinggiran lubang persegi, dibuat garis tepi, baik di sisi depan maupun belakang. Pada sisi depan terdapat tulisan beraksara Tionghoa, “*Hung-wu Tung-Pao*”, sedangkan sisi belakangnya polos—tanpa tulisan. Mata Uang “*Hung-wu*” ini, diduga, diterbitkan pada masa pemerintahan Kaisar T'ai Tsu (1368–1398) dari Dinasti Ming.

Mata Uang Kesultanan Palembang Darussalam

Kesultanan Palembang Darussalam didirikan pada pertengahan abad XVII Masehi (1666) oleh Ki Mas Hindi yang bergelar Sultan Abdurrahman Khalifatul Mukminin Sayidul Imam. Kesultanan ini didirikan di atas “puing-puing” keruntuhan Kerajaan Palembang yang dihancurkan oleh VOC (*Verenigde Oostindische Compagnie*) dalam perang Palembang tahun 1659. Sejak masa Kerajaan Palembang hingga Kesultanan Palembang Darussalam, telah berlangsung transaksi perdagangan, baik dengan bangsa-bangsa Asia (Tiongkok, Arab, dan India) maupun Barat (Inggris dan Belanda). Dalam transaksi tersebut, Kesultanan Palembang Darussalam sudah mempunyai mata uang sendiri dan dapat diterima oleh bangsa lain.

Mata uang Kesultanan Palembang Darussalam dikenal dengan berbagai sebutan, seperti “Piti”, “Pitih”, “Picis”, dan “Pitis”. Pitis Kesultanan Palembang Darussalam berbentuk lingkaran (bundar), tetapi ada juga yang berbentuk bundar bersegi. Bahan baku untuk membuat uang ini adalah timah, tetapi ada juga dari tembaga merah. Pada sebagian jenis Pitis, terdapat lubang di tengahnya, tetapi ada juga yang tidak berlubang. Pitis yang berlubang di tengahnya disebut dengan “Pitis Tebok”, sedangkan yang tidak berlubang disebut “Pitis Buntu”. Pitis tidak memiliki nilai nominal dan pada sebagian jenisnya tidak tertulis angka tahun.

Beberapa jenis Pitis yang ditemukan mempunyai angka tahun Arab—dengan tulisan berhuruf Arab. Pitis tertua yang ditemukan berangka tahun 1113 Hijriah (1701 Masehi). Berdasarkan data tentang Penguasa/Sultan Palembang Darussalam, pada tahun tersebut, berkuasa Sultan Abdurrahman. Dengan demikian, Sultan pertama yang mengeluarkan Pitis adalah Sultan Abdurrahman (1659–1706). Pitis Kesultanan Palembang Darussalam lainnya dikeluarkan pada 1219 Hijriah (1804 Masehi); berbentuk bundar bersegi delapan dengan lubang di tengahnya. Salah satu sisinya bertuliskan, “*Maxru fih Balad Palembang 1219*”, artinya: dicetak di Negeri Palembang tahun 1219 Hijriah (1804 Masehi). Berdasarkan angka tahun tersebut, uang ini dikeluarkan pada masa Sultan Mahmud Badaruddin II. Meskipun belum ada data konkret yang menyatakan bahwa semua Sultan Palembang Darussalam mengeluarkan mata uang pada masa kekuasaannya, tetapi berdasarkan temuan Pitis yang menjadi bagian dari koleksi Museum Negeri Sumatera Selatan, terdapat beberapa Sultan Palembang Darussalam yang mengeluarkan mata uang. Pitis berlaku sampai dengan dihapuskannya Kesultanan Palembang Darussalam pada 1823. Selanjutnya, pihak Kolonial Belanda memberlakukan mata uang Belanda.

Selain mata uang yang dikeluarkan oleh Kesultanan Palembang Darussalam, beredar pula mata uang asing—dari Eropa. Mata uang asing yang beredar di Palembang terdiri dari *Dukat* dan *Doubloon* (mata uang emas Spanyol), *Gulden* Belanda, serta *Real* (*Real/Piastre* Spanyol). Ada pula koin perak—seperti *Stuiver*, *Dubbeltje*, dan *Shilling*—yang sempat beredar di Palembang, tetapi kemudian menghilang untuk waktu yang lama. Sedangkan mata uang asing yang paling banyak beredar di luar ibu kota Palembang—tepatnya di daerah dataran tinggi—adalah *Thaler Maria Theresa* (mata uang Austria) (Abubakar, dkk., 2020: 43–44).

Heragannya mata uang yang berlaku saat itu memungkinkan untuk diberlakukannya nilai tukar antar-mata uang. 1 tali Pitis yang berisi 500 keping Pitis *Buntu* bernilai tukar $\frac{1}{6}$ *Real* Spanyol atau 40 *Doit* Belanda. 1 *Doit* Belanda bernilai $\frac{5}{6}$ sen; 4 *Doit* sama dengan 1 *Stuiver*; 1 *Stuiver* sama dengan 5 sen *Real*; 1 *Gulden* atau *Florin* sama dengan 100 sen; 1 Ringgit atau *Rijksdaalder* sama dengan 2,40 *Gulden*; 1 *Rupye* sama dengan 1,20 *Gulden*; 1 *Dollar* Spanyol sama dengan 2,56 *Gulden*; 320 Pitis *Buntu* sama dengan 1 *Dollar* Spanyol; dan 4.000 Pitis *Tebok* sama dengan 1 *Dollar* Spanyol (Farida 2012: vii dalam Abubakar, dkk., 2020: 46–47).

Mata Uang VOC dan Hindia Belanda

Pada mulanya, hubungan antara kerajaan-kerajaan di Nusantara dan bangsa Belanda terjalin melalui Persekutuan Dagang Belanda di Hindia Timur yang dikenal dengan nama VOC (*Verenigde Oostindische Compagnie*) yang didirikan Belanda pada 1602. Dalam perkembangan selanjutnya, VOC bukan hanya sebagai kongsi dagang Belanda, tetapi juga menjadi satu kekuatan ekonomi dan militer yang dimiliki Belanda untuk menaklukkan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Salah satu hak yang diberikan oleh Pemerintah Belanda kepada VOC adalah hak Oktroi, yaitu hak untuk mencetak uang. Dengan adanya hak ini maka VOC mencetak dan mengedarkan uang untuk transaksi perdagangannya di Nusantara.

Selama berdirinya VOC, pada 1602 sampai dibubarkannya tanggal 31 Desember 1799, VOC sempat mencetak dan mengedarkan uang dengan beragam bentuk. Pada umumnya, uang yang dikeluarkan VOC terbuat dari logam tembaga dengan nilai nominal tertentu. Uang VOC yang terdokumentasi di Museum Negeri Sumatera Selatan adalah emisi 1790. Uang ini berbentuk lingkaran dengan ciri utama terdapat pada bagian depan, yaitu tulisan “VOC” dan “1790”, sedangkan di bagian belakang terdapat lambang kerajaan Belanda.

Pembubaran VOC oleh Pemerintah Kerajaan Belanda berimplikasi pada kekuasaan atas wilayah yang dikuasai VOC. Dengan pembubaran VOC maka semua koloni VOC dikuasai oleh Pemerintah Kerajaan Belanda. Oleh karena itu, sejak 1 Januari 1800, uang yang dicetak adalah produk dari Pemerintah Hindia Belanda. Mata uang Pemerintah Hindia Belanda yang menjadi bagian dari koleksi Museum Negeri Sumatera Selatan adalah emisi 1913, 1915, 1920, 1921, 1922, 1929, 1937, 1938, dan 1943.

Mata Uang Pendudukan Jepang

Masa Pendudukan Jepang selama tiga setengah tahun (1942–1945) turut memberikan andil pada perkembangan mata uang yang berlaku di Indonesia. Dalam kurun waktu tersebut, Pemerintah Militer Jepang menerbitkan, setidaknya, tiga seri mata uang untuk menggantikan mata uang Hindia Belanda (*Gulden*) yang masih berlaku saat itu. Ketiga seri mata uang tersebut adalah *De Japansche Regeering*, *Dai Nippon Teikoku Seimu*, dan *De Japansche Regeering* dengan nilai nominal 10 *Gulden*.

Seri *De Japansche Regeering* adalah uang kertas pertama yang diterbitkan oleh Pemerintah Pendudukan Jepang—dengan nilai nominal 5 *Gulden*. Uang ini diterbitkan pada 1942 dengan motif yang sederhana, berupa gambar pohon kelapa serta pepaya pada bagian depan dan gambar ragam hias *gulloches* pada bagian belakang; berwarna dominan hijau; serta berukuran 150 x 72 mm. Uang ini ditarik peredarannya setelah Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan ORI (*Oeang Republik Indonesia*).

Seri kedua mata uang Pendudukan Jepang adalah *Dai Nippon Teikoku Seimu*. Uang kertas kedua yang diterbitkan penjajah Jepang pada 1943 dengan nilai nominal 100 Rupiah tersebut berukuran 175 x 86 mm; berwarna ungu; dan bergambar patung Garuda Wisnu Kencana pada sisi depan serta berwarna hijau dan bergambar wayang Arjuna pada sisi belakang.

Seri ketiga adalah *De Japansche Regeering* dengan nilai nominal 10 *Gulden*. Uang ini mulai dicetak dan diedarkan pada 1942. Tampilannya, baik sisi depan maupun belakang, didominasi warna hitam-violet dan berukuran 161 x 78 mm. Dari segi motif, uang kertas ini memiliki gambar yang lebih ramai. Sisi depannya bergambar pohon pisang, sukun, dan kelapa, sedangkan sisi belakangnya bergambar kapal laut yang sedang berlayar.

Uang kertas Pendudukan Jepang dicetak oleh *Djakarta Insatsu Kodjo* (badan percetakan milik Kementerian Keuangan Jepang). Mengingat wilayah yang diduduki Jepang sangat luas

maka Jepang memberikan kode wilayah pada uang tersebut. Untuk uang yang diterbitkan di Indonesia, diberi kode "S", sedangkan wilayah lain, seperti Malaysia diberi kode "M" dan Myanmar kode "B".

Mata Uang Masa Awal Kemerdekaan dan Revolusi Fisik Kemerdekaan Indonesia

ORI

Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, mata uang yang beredar—masih dianggap sah dan dapat dipergunakan di wilayah Indonesia—adalah mata uang Pendudukan Jepang. Jumlahnya diperkirakan mencapai lebih dari 4 milyar Rupiah. Dari jumlah tersebut, lebih kurang 2,4 milyar Rupiah beredar di Pulau Jawa, sedangkan sekitar 1,6 milyar Rupiah di Pulau Sumatera. Di Pulau Kalimantan dan Sulawesi, sejumlah uang Pendudukan Jepang juga beredar—tetapi jumlahnya tidak diketahui (LP3ES, 2020). Mata uang lain yang beredar adalah *Gulden* (mata uang Belanda). Kedua mata uang tersebut masih beredar di masyarakat—disebabkan pada masa itu, Pemerintah Republik Indonesia belum mengeluarkan mata uang resmi. Akibat dari beredarnya mata uang tersebut, Pemerintah Republik Indonesia mengalami kesulitan dalam mengatur kebijakan moneternya.

Pada September 1945, terbentuk kabinet presidensial pertama, di bawah pimpinan Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Moh. Hatta. Dalam kabinet baru ini, Menteri Keuangan dijabat oleh Dr. Samsi, sedangkan wakilnya ditunjuk Mr. A.A. Maramis. Dalam perkembangan selanjutnya—karena Dr. Samsi sakit maka jabatannya diambil alih oleh Mr. A.A. Maramis. Selain itu, untuk mendukung jalannya pemerintahan, dibentuk pula Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang berstatus sebagai badan legislatif yang diketuai Mr. Kasman Singodimejo.

Situasi dan perkembangan politik serta ekonomi Indonesia, terutama di bidang keuangan, pada masa awal kemerdekaan, mendapatkan perhatian dari anggota KNIP Mr. Syafruddin Prawiranegara (Prawiranegara, 2007). Dalam satu kesempatan bertemu dengan Wakil Presiden Moh. Hatta, ia mengusulkan agar Pemerintah mencetak ORI (*Oeang Republik Indonesia*) sebagai pengganti mata uang Pendudukan Jepang. Pada mulanya, Hatta menolak dengan alasan adanya keterbatasan sarana, dana, dan langkanya tenaga ahli di bidang tersebut (Iskandar, 2004). Namun, atas desakan dan penjelasan Syafruddin—bahwa Indonesia perlu mengeluarkan mata uang baru sebagai

salah satu atribut negara merdeka dan berdaulat (Prawiranegara, 2007). Pemerintah Indonesia akhirnya menyetujui dikeluarkannya ORI.

Dalam rangka mempersiapkan penerbitan ORI, Menteri Keuangan Mr. A.A. Maramis menginstruksikan Tim Serikat Buruh Percetakan G. Kolff Jakarta untuk bergerak ke beberapa tempat, yaitu Jakarta, Malang, Solo, dan Yogyakarta—untuk mencari percetakan. Di Jakarta, terdapat percetakan G. Kolff yang berpengalaman dalam urusan mencetak uang sejak masa Hindia Belanda; ada pula percetakan De Unie. Sementara, di Malang, berdiri perusahaan NIMEF (*Nederlands Indische Metaalwaren en Emballage Fabrieken*).

Langkah selanjutnya yang dilakukan Maramis adalah membentuk Panitia Penyelenggara Pencetakan Uang Kertas Republik Indonesia pada 7 November 1945 diketuai oleh T.R.B. Sabarudin yang saat itu menjabat sebagai Direktur Bank Rakyat Indonesia. Anggotanya terdiri atas pegawai Departemen Keuangan, Bank Rakyat Indonesia, dan Serikat Buruh Percetakan G. Kolff. Dalam melaksanakan tugasnya, panitia berhasil mencetak ratusan rim lembaran 100 Rupiah. Litografinya dibuat di percetakan *De Unie*. Abdul Salam dan Soerono tercatat sebagai pelukis pertama ORI. Uang pertama yang dicetak ini belum sempat diberi nomor seri (Hanggoro, 2020: 16).

Sejak September 1945, pasukan Sekutu mulai mendarat di Indonesia, terutama di Pulau Jawa dan Sumatera. Di dalam pasukan Sekutu tersebut, ikut pula pasukan Belanda yang tergabung dalam NICA (*Netherland-Indies Civil Administration*) dan KNIL (*Koninklijk Nederlondsch-Indische Leger*). Kedatangan mereka bertujuan untuk merebut dan menguasai kembali Indonesia yang sudah memproklamasikan kemerdekaannya. Kedatangan mereka membuat situasi menjadi tegang. Situasi keamanan Kota Jakarta selalu dibayangi teror dan intimidasi. Hal ini merupakan ancaman keamanan dan keselamatan bagi para pemimpin bangsa Indonesia. Pemerintah akhirnya memutuskan untuk memindahkan ibu kota negara dan pusat pemerintahan ke Yogyakarta pada 14 Januari 1946. Pemindahan ini berdampak pada pekerjaan pencetakan uang di Jakarta—berhenti sementara. Namun, upaya untuk mencetak uang tetap dilaksanakan. Pencetakan uang dialihkan ke percetakan NIMEF di Malang dan percetakan swasta lainnya di Solo, Yogyakarta, dan Ponorogo. Situasi dan kondisi daerah-daerah ini relatif aman karena berada di bawah kekuasaan Republik Indonesia.

Di sisi lain, pihak Belanda juga mengedarkan uang NICA di wilayah yang dikuasainya. Hal ini memang sengaja dilakukan Belanda dalam rangka membingungkan dan mengganggu stabilitas masyarakat serta memberikan kekacauan pengelolaan keuangan negara Indonesia. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah Republik Indonesia, secara bertahap, menarik uang NICA tersebut sambil tetap mengusahakan tercetaknya ORI. Demikian pula, di beberapa daerah, uang Pendudukan Jepang masih beredar dan digunakan oleh masyarakat. Dengan demikian, sebelum keluarnya ORI, telah beredar uang Pendudukan Jepang dan NICA.

Dalam rangka penerbitan ORI, pada 1 Oktober 1946, telah dikeluarkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1946 Tentang Pengeluaran Uang Republik Indonesia. Undang-undang ini terdiri atas tiga pasal, yaitu Pasal 1, "Pemerintah mengeluarkan Uang Republik Indonesia". Pasal 2, "Dasar nilai uang tersebut, dasar penukaran uang Republik Indonesia dengan uang yang berlaku sekarang dan tindakan terhadap uang ini akan ditetapkan dalam undang-undang lain". Pasal 3, "Macam, warna, jenis, harga uang Republik Indonesia, dan lain-lain hal yang berhubungan dengan pengeluaran uang ini, ditetapkan oleh Menteri Keuangan". Selanjutnya, undang-undang tersebut diperkuat oleh Pemerintah dengan mengeluarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1946 Tentang Pengeluaran Uang Republik Indonesia pada 25 Oktober 1946. Dalam undang-undang ini, dinyatakan tentang bentuk, ukuran, dan nilai tukar ORI terhadap mata uang Pendudukan Jepang dan NICA.

Secara resmi, ORI mulai dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia pada 30 Oktober 1946. Peresmian pemakaian ORI ditandai dengan pidato sambutan Wakil Presiden Moh. Hatta pada malam tanggal 29 Oktober 1946. Dalam pidatonya, Hatta mengatakan, "Sejak mulai besok kita akan berbelanja dengan uang kita sendiri, uang yang dikeluarkan oleh Republik kita. Uang Republik keluar dengan membawa perubahan nasib rakyat, istimewa pegawai negeri yang sekian lama menderita karena inflasi uang Jepang" (Hatta, 1987). Rakyat Indonesia menyambut baik peredaran ORI. Mereka menyebutnya "uang putih".

Setelah resmi beredar pada 30 Oktober 1946, Pemerintah Republik Indonesia berupaya mendistribusikan ORI secara hati-hati ke berbagai wilayah di Pulau Jawa dan Madura. Dari percetakan, petugas memasukkan uang ke dalam keranjang-keranjang bekas dan membawanya ke kereta api. Di dalam kereta, Pemerintah menempatkan

petugas bersenjata lengkap. Hal ini dilakukan guna memastikan uang tersebut bebas dari gangguan tentara NICA. Mereka melakukan segala cara untuk memperlmah kedudukan Republik Indonesia. Strategi yang digunakan NICA juga menysar ke bidang ekonomi moneter, termasuk mencegah peredaran ORI.

ORIPS

Wilayah Indonesia yang sangat luas ikut mempengaruhi peredaran ORI. Daerah-daerah di luar Pulau Jawa belum sepenuhnya dapat menggunakan ORI—karena keterbatasan jumlahnya. Di sisi lain, kedatangan Belanda yang kemudian diteruskan dengan Agresi Militer Pertama (Juli 1947) dan Agresi Militer Kedua (Desember 1948) ikut mempengaruhi perkembangan ORI. Belanda bukan hanya merebut dan menduduki wilayah Indonesia, tetapi juga mengacaukan perekonomian Indonesia dengan mengeluarkan uang NICA. Kondisi ini menyebabkan meskipun ORI sudah dicetak, tetapi untuk peredarannya, banyak mendapatkan hambatan. Pihak Belanda berusaha agar ORI tidak dapat beredar, baik di dalam maupun luar daerah yang dikuasainya.

Situasi dan kondisi demikian membuat Gubernur Sumatera Mr. Tengku Moh. Hasan mengusulkan kepada Pemerintah Pusat agar Pemerintah Daerah diberikan wewenang untuk mencetak ORIDA (*Orang Republik Indonesia Daerah*); Usulan tersebut tidak segera ditanggapi oleh Pemerintah Pusat. Hal ini disebabkan Pemerintah Pusat lebih mengutamakan penyelesaian masalah Indonesia dan Belanda melalui jalur diplomasi, terutama untuk mengatasi sikap Belanda yang memaksakan keinginannya untuk menguasai kembali Indonesia melalui gerakan militer. Oleh karena itu, sebelum adanya persetujuan dari Pusat, Pemerintah Sumatera mengambil inisiatif mencetak uang sendiri dengan nama ORIPS (*Orang Republik Indonesia Provinsi Sumatera*).

ORIPS dicetak di Pematang Siantar, Sumatera Utara. Penerbitan uang ini berlandaskan Maklumat Gubernur Sumatera Nomor: 92/K.O. Tanggal 8 April 1947. ORIPS menjadi ORIDA pertama di Indonesia. Nilai Tukar ORIPS setara dengan ORI. Emisi pertama dikeluarkan pada 11 April 1947 dan ditandatangani oleh Gubernur Sumatera Mr. Tengku Moh. Hasan (Hanggoro, 2020: 29).

Pada Juli 1947, Belanda melakukan Agresi Militer Pertama. Belanda memberikan alasan bahwa di Indonesia banyak terjadi kekacauan yang dilakukan oleh ekstremis-ekstremis yang menentang Belanda. Dengan alasan untuk mengatasi kekacauan dan

menumpas ekstremis tersebut, Belanda melakukan agresi militer. Namun, sebetulnya, agresi ini bertujuan untuk merebut dan menguasai daerah-daerah di Pulau Sumatera dan Jawa yang masih bebas atau dikuasai oleh pihak Indonesia. Adanya agresi militer ini semakin mempersulit perekonomian Indonesia, termasuk pencetakan dan peredaran ORIPS di Pulau Sumatera. Pencetakan ORIPS yang pada mulanya dilakukan di Pematang Siantar, dipindahkan ke Bukit Tinggi. Hal ini disebabkan Pematang Siantar diduduki Belanda sehingga tidak mungkin untuk melaksanakan pencetakan ORIPS, sementara Bukit Tinggi merupakan daerah yang dikuasai Republik Indonesia dan sekaligus sebagai pusat pemerintahan Provinsi Sumatera.

Penerbitan ORIPS yang kedua dilakukan pada Agustus 1947. ORIPS tersebut juga ditandatangani oleh Mr. Tengku Moh. Hasan selaku Gubernur Sumatera. ORIPS emisi 17 Agustus 1947 ini, terdiri atas beberapa nominal, di antaranya $\frac{1}{2}$ Rupiah dan 1 Rupiah (semuanya berwarna merah), 5 Rupiah (berwarna biru), 10 Rupiah (berwarna merah marun), serta 25 Rupiah (Harsono dan Suharti, 2020). Sementara, beberapa daerah di Pulau Sumatera, seperti Asahan, menerbitkan alat pembayaran "Bon" sebagai pengganti ORIPS. Bon, secara harfiah, dapat diartikan sebagai bukti tertulis, berupa kertas kecil mengenai peminjaman sejumlah uang atau barang. Bentuk pembayaran Bon ini diberlakukan pada Agustus 1947.

ORIPS yang dibuat secara sepihak oleh pemerintahan di Sumatera mulai beredar sejak April 1947. Beredarnya ORIPS di Sumatera pada akhirnya membuat Pemerintah Pusat mengizinkan pencetakan ORIPS. Secara resmi, izin dari Pemerintah Pusat dikeluarkan pada 26 Oktober 1947 melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1947. Di dalamnya, disebutkan bahwa "Pemerintah Pusat membolehkan pemerintah daerah tingkat provinsi, keresidenan, dan kabupaten untuk menerbitkan *Ouang* Republik Indonesia Daerah (ORIDA)". Selain itu, dinyatakan pula bahwa ORIDA adalah uang kertas atau tanda pembayaran yang sah yang berlaku secara terbatas di daerah tersebut. Dengan demikian, sejak itu, istilah ORIPS digunakan untuk uang yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi, sedangkan uang yang dicetak oleh pemerintah lokal di bawahnya disebut ORIDA.

Menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1947 maka Gubernur Sumatera, pada 17 Desember 1947, mengeluarkan kembali ORIPS. Nilai nominal yang dikeluarkan adalah $2\frac{1}{2}$ Rupiah; disusul dengan 1 Rupiah, 5 Rupiah, 10 Rupiah, dan 25

Rupiah pada Januari 1948. Uang Sumatera ini ditandatangani oleh Gubernur Sumatera Mr. Tengku Moh. Hasan. Karena dicetak oleh Pemerintah Provinsi Sumatera maka ORIPS hanya berlaku di Pulau Sumatera. Namun, dalam perkembangannya, ORIPS tidak sepenuhnya dapat diedarkan di seluruh penjuru Sumatera.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1947 memberikan peluang kepada daerah untuk mencetak uang sendiri sesuai dengan kebutuhan saat itu. Oleh karena itu, beberapa keresidenan, seperti Jambi, Sumatera Utara, Bengkulu, Lampung, dan lainnya mencetak sendiri ORIDA. Hal yang sama dilakukan pula di Keresidenan Palembang—sehingga melahirkan beberapa jenis ORIDA yang dicetak di beberapa tempat, seperti Tanjungsakti, Curup, dan Bukit Barisan.

ORIDA Sumatera Selatan

Agresi Militer Belanda Pertama terjadi pada 21 Juli 1947. Agresi ini bertujuan untuk menguasai wilayah Indonesia dan sekaligus menangkap para pejuang kemerdekaan Indonesia. Agresi ini ditujukan pada daerah-daerah di Pulau Sumatera dan Jawa yang menyokong Pemerintah Republik Indonesia di Yogyakarta. Keresidenan Palembang termasuk wilayah yang menjadi sasaran serangan Belanda. Akibat adanya Agresi Militer Belanda ini maka Pemerintahan Sipil Keresidenan Palembang yang dipimpin oleh Residen Palembang Abdul Rozak berpindah dari Lahat ke Lubuklinggau. Hal yang sama dilakukan oleh Gubernur Muda Sumatera Selatan drg. M. Isa selaku pimpinan Pemerintahan Sub-Provinsi Sumatera Selatan yang melaksanakan pemerintahan dari Curup hingga terjadinya Agresi Militer Kedua bulan Desember 1948. Sementara, Markas Subkoss (Sub-Komandemen Sumatera Selatan) yang dipimpin Panglima Subkoss Kolonel Maludin Simbolon berada di Lubuklinggau; Markas STP (Sub-Teritorium Palembang) dengan Komandan STP Letkol Bambang Utoyo berada di Muara Beliti (Tim Penyusun Sejarah Perjuangan Subkoss, 2003: 390).

Kebutuhan dan situasi perang kemerdekaan mengharuskan daerah untuk mengatasi perekonomian saat itu dan sekaligus mempertahankan kemerdekaan. Selain pemindahan markas Subkoss dan STP, dilakukan pula pembentukan basis pertahanan baru di Sumatera Selatan dengan tujuan untuk melindungi markas Subkoss dan STP. Dalam rangka itu, dibentuk empat daerah pertahanan utama, yaitu Pagaralam, Tebing Tinggi, Babat Toman, dan Muara Dua. Dari keempat daerah pertahanan ini, hanya

Pagaralam yang mengeluarkan uang lokal yang bertuliskan “*cheque*” sebagai tanda pembayaran yang sah. *Cheque* ini dikeluarkan pada 1 Agustus 1947 dan ditandatangani oleh Komandan Brigade Garuda Dempo Letkol. Harun Sohar. Nilai nominal *cheque* adalah 50 Rupiah dan 100 Rupiah (Harsono dan Subarti, 2020).

Dalam rangka menjalin kerja sama dan kesatuan antara pemerintah dan pihak militer maka dibentuklah Dewan Pertahanan Daerah Palembang (DPDP). Dewan ini bertugas untuk mengatur dan tetap menjaga kesinambungan pemerintahan. Dalam mengatasi masalah keuangan yang terganggu akibat adanya Agresi Militer Belanda maka dikeluarkan uang Mandat DPDP pada 1 Agustus 1947 dengan nilai nominal 50 Rupiah. Uang ini ditandatangani oleh Residen Palembang Abdul Rozak. Selain itu, dikeluarkan pula nominal 1.000 Rupiah.

Agresi Militer Belanda Pertama menyebabkan terjadinya perpindahan ibu kota atau pusat Pemerintahan Sub-Provinsi Sumatera Selatan ke Curup. Selama berada di Curup, Gubernur Muda drg. M. Isa sempat mencetak ORIDA dengan nilai nominal 40 Rupiah. Uang kertas ini berwarna biru dan ditandatangani oleh drg. M. Isa. Pencetakan uang dilakukan di rumah Sanusi Chan, di Pasar Tengah Curup. Uang kertas ini dikeluarkan pada 17 Januari 1949 (Feris, 2016). Mengingat uang ini dikeluarkan oleh Gubernur Muda Sumatera Selatan yang meliputi empat keresidenan, yaitu Palembang, Lampung, Bengkulu, dan Bangka-Belitung maka uang ini berlaku di keempat keresidenan tersebut.

Selanjutnya, Sub-Provinsi Sumatera Selatan, pada masa perang kemerdekaan, berubah menjadi Daerah Militer Istimewa Sumatera Selatan (DMISS)—dipimpin oleh Gubernur Militer dr. A.K. Gani. Sedangkan Gubernur Muda drg. M. Isa diangkat oleh Pemerintah Pusat sebagai Komisaris Pemerintah Pusat Wilayah Sumatera Selatan. Dalam melaksanakan tugas pemerintahan di Sumatera Selatan, keduanya saling bergandengan dan bersifat mobil (berpindah-pindah). Wilayah Sumatera Selatan yang sangat luas mengharuskan para pemimpin perjuangan tersebut ikut bergerilya guna menanamkan kesadaran kepada rakyat untuk tetap setia dan membela negara Indonesia yang merdeka. Melalui perjalanan keliling tersebut, mereka mengetahui kesulitan ekonomi yang dialami rakyat.

Situasi perjuangan pada masa perang kemerdekaan, khususnya pasca-Agresi Militer Belanda Kedua membutuhkan dana perjuangan untuk pasukan TNI (Tentara

Nasional Indonesia) dan para pejuang yang bergerilya serta operasional pemerintahan. Letkol. Ibnu Sutowo yang saat itu menjabat sebagai Kepala Staf Subkoss mendapat tugas dari dr. A.K. Gani untuk mencetak uang. Selubungan dengan hal tersebut, Letkol. Ibnu Sutowo membentuk sebuah tim yang diketuai Kapten Mulyadi. Tim ini bertugas mempersiapkan dan mengamankan pencetakan Uang Republik Indonesia Wilayah Sumatera Selatan. Pencetakan uang pun dilakukan di tengah medan perjuangan di Sumatera Selatan—antara Bengkulu dan Lubuklinggau. Situasi perang kemerdekaan menghadapi Belanda memungkinkan tempat pencetakan uang dirahasiakan agar tidak diketahui Belanda. Oleh karena itu, uang yang dikeluarkan hanya menyebutkan tempat pengeluarannya—di Bukit Barisan. Uang kertas berwarna merah dan berukuran 58 x 117 mm dengan nilai nominal 20 Rupiah tersebut dikeluarkan pada 1 Mei 1949 dan dikenal dengan uang “Bukit Barisan” atau uang “A.K. Gani”—ditandatangani oleh dr. A.K Gani..

Selain mencetak uang kertas, Pemerintah DMIS pernah mencoba mencetak uang (koin) emas. Namun, usaha ini mengalami kegagalan disebabkan oleh alat (cetakan) yang dibuat selalu pecah ketika diisi cairan emas. Kegagalan ini membuat pencetakan dihentikan. Sebagai gantinya, untuk operasional pasukan maka setiap komandan pasukan diberikan emas batangan seberat satu ons.

Keresidenan Palembang yang wilayahnya meliputi Provinsi Sumatera Selatan saat ini, melaksanakan pemerintahan sipil yang dipimpin oleh Residen Palembang Abdul Rozak. Dalam upaya untuk mengatasi permasalahan ekonomi saat itu maka Residen Palembang Abdul Rozak mendapat mandat dari DPDP untuk melakukan pencetakan uang. Kegiatan pencetakan uang ini dilakukan di Tanjungsakti. Tugas pencetakan dipimpin oleh Kapten Rusnawi yang dibantu oleh Letnan M. Nur Mahadam, Camat Perang Nur Iskandar, dan Dulhaq. Pencetakan ORIDA Palembang dilakukan di rumah Kiagus Kosim dan Kiagus Thaib di Dusun Paser Lame, Tanjungsakti (Tim Penyusun Sejarah Perjuangan Subkoss, 2003).

Meskipun dicetak di Tanjungsakti, tetapi pada uang kertas tersebut, tertulis Palembang. Hal ini dapat dimaklumi karena Tanjungsakti hanyalah sebuah kewedanan, sedangkan Palembang berstatus sebagai ibu kota Sub-Provinsi Sumatera Selatan dan Keresidenan Palembang. Adapun nilai nominal uang yang dicetak di Tanjungsakti adalah 1.000 Rupiah dan ditandatangani oleh Residen Palembang Abdul Rozak. Selain

itu, pada 17 Januari 1949, dikeluarkan pula *cheque* dengan nilai nominal 10 Rupiah. Uang ini ditandatangani oleh Residen Palembang Abdul Rozak dan Komandan STP Letkol. Bambang Utoyo (Hanafiah, dkk., 2015).

Pada 17 April 1949, Keresidenan Palembang mengeluarkan kembali *cheque* senilai 50 Rupiah yang ditandatangani oleh Residen Palembang Abdul Rozak dan Komandan STP Letkol. Bambang Utoyo. Uang tersebut berwarna putih kecokelatan; berukuran 79 x 156 mm; dan bernilai nominal 50 Rupiah. Pada 6 Juli 1949, keresidenan juga mengeluarkan *cheque* berukuran 70 x 128 mm; bernilai nominal 40 Rupiah; serta berwarna merah, abu-abu, dan oranye. Emisi terakhir yang dikeluarkan oleh Residen Palembang adalah 18 November 1949; berukuran 63 mm x 123 mm; berwarna dasar putih dan tulisannya berwarna hitam; serta bernilai nominal 50 Rupiah.

Uang RIS

Pada 1949, dicapai kesepakatan antara pihak Indonesia dan Belanda melalui perjanjian dalam Konferensi Meja Bundar (KMB). Keputusan terpenting dari KMB adalah *Pertama*, Belanda memberikan pengakuan kedaulatan Indonesia; *Kedua*, bentuk negara adalah Republik Indonesia Serikat (RIS) yang terdiri dari 16 negara bagian. Republik Indonesia menjadi salah satu dari 16 negara bagian tersebut. Konsekuensi dari perubahan bentuk negara berpengaruh terhadap masalah keuangan Republik Indonesia—uang yang ada ditarik dari peredaran dan diganti dengan uang RIS.

Uang RIS dikeluarkan oleh DJB pada 1 Januari 1950. Uang RIS menggantikan uang yang berlaku sebelumnya, baik ORI maupun ORIDA. Uang RIS disebut juga uang DJB atau uang Federal. Uang RIS ditandatangani oleh Menteri Keuangan saat itu, yaitu Mr. Syafruddin Prawiranegara. Uang ini bergambar Presiden Soekarno, selaku Presiden RIS. Oleh karena itu, uang ini disebut juga emisi Bung Karno. Meskipun dikeluarkan pada Januari 1950, tetapi peredaran uang RIS dan penarikan ORI dilakukan secara bertahap. Pemerintah, pada 27 Maret 1950, menukarkan ORI dan ORIDA dengan uang RIS. Selain itu, Pemerintah memberikan batas waktu penggunaan ORI dan mata uang lainnya sampai 1 Mei 1950.

RIS tidaklah berlangsung lama. Sebagian besar, daerah-daerah di Indonesia mulai menyatakan keluar dari RIS. Gerakan untuk kembali ke negara kesatuan juga terjadi di Parlemen dengan munculnya "Mosi Integral" dari Moh. Natsir. Pada 17 Agustus 1950,

RIS dibubarkan dan bentuk negara kembali ke NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Pembubaran RIS membawa konsekuensi pada peredaran uang RIS. Sejalan dengan masa pemerintahan RIS yang berlangsung singkat, masa edar uang kertas RIS juga tidak lama.

Mata Uang Negara Kesatuan Republik Indonesia

Setelah masa RIS berakhir, perekonomian Indonesia yang terbuka menyebabkan situasi dalam negeri sangat mudah terpengaruh oleh gejolak perekonomian dunia. Pada awal pengakuan kedaulatan, terjadi devaluasi oleh beberapa negara Eropa Barat terhadap Dolar Amerika Serikat dan pecahnya perang Korea. Di sisi lain, pemakaian devisa untuk impor belum meningkat. Oleh karena itu, Pemerintah mengambil kebijakan "Gunting Sjafruddin" yang bertujuan untuk menarik uang beredar yang terlalu banyak—serta menghasilkan pinjaman sekitar 1,5 milyar Rupiah dari penerbitan Obligasi Republik Indonesia 1950—karena Indonesia belum mampu mencari sumber pembiayaan dari pasar.

Penggantian uang kertas DJB dan uang Pendudukan Belanda atau uang NICA dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Tanggal 19 Maret 1950. Secara bersamaan, Pemerintah meluncurkan Obligasi Republik Indonesia 1950 sebagai pinjaman pemerintah dengan bunga 3% yang ditawarkan untuk ditukarkan dengan guntingan uang kertas bagian kanan. Bagian kiri uang kertas di atas pecahan $\text{f}2,50$ diakui sebagai alat pembayaran yang sah. Jadi, nilai mata uang yang berlaku hanya setengah dari nilai nominalnya. Dalam jangka waktu yang telah ditentukan, bagian kiri uang dapat ditukar dengan uang baru yang diterbitkan DJB dengan pecahan $\text{f}2,50$, $\text{f}1$, dan $\text{f}0,50$. Penggantian uang tersebut dilakukan karena cara yang lazim saat itu—penyetoran ke dalam rekening yang dibekukan—tidak mungkin dijalankan di Indonesia.

Pada Desember 1951, DJB dinasionalisasikan menjadi Bank Indonesia (BI)—sebagai bank sentral. Seiring dengan nasionalisasi tersebut, Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1951 sebagai pengganti "*Indische Muntwet 1912*" (Undang-undang Hindia Belanda). Dalam undang-undang ini, dinyatakan, (1) Semua logam yang dikeluarkan berdasarkan *Indische Muntwet* dicabut mulai 3 November 1951, kecuali uang tembaga yang pencabutannya masih akan ditentukan oleh Menteri Keuangan; (2) Satuan hitung dari uang di Indonesia adalah Rupiah yang disingkat Rp dan terbagi menjadi 100 sen; (3) Uang logam Indonesia yang merupakan alat pembayaran yang

sah adalah dari nikel dalam pecahan 50 sen serta dari aluminium pecahan 25 sen, 10 sen, 5 sen, dan 1 sen; (4) Untuk memenuhi kebutuhan yang mungkin timbul pada suatu waktu, Pemerintah dapat mengeluarkan kertas pecahan 1 Rupiah dan 2,50 Rupiah; (5) Pembuatan uang logam dan uang kertas Pemerintah hanya dapat dilakukan oleh atau atas nama Pemerintah; (6) Menteri Keuangan menetapkan desain logam nikel dan aluminium, kadar logam uang, berat, dan ukuran garis tengah, serta batas toleransinya; (6) Di daerah-daerah tertentu, dengan Peraturan Pemerintah, dimungkinkan untuk sementara waktu dilakukan pembayaran dengan uang selain tersebut di atas.

Berdasarkan Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1951 Tentang Penghentian Berlakunya "Indische Muntwet 1912" dan Penetapan Peraturan Baru Tentang Mata Uang, Bank Indonesia mulai merilis uang kertas baru, mulai dari 1 Rupiah hingga 100 Rupiah pada 1952–1953. Hal ini merupakan pertanda baru dalam sejarah Republik Indonesia karena sejak periode tersebut, Bank Indonesia memiliki tugas untuk menerbitkan dan mengedarkan Rupiah kertas. Pada 1 Juli 1953, Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1953 Tentang Penetapan Undang-undang Pokok Bank Indonesia yang mengesahkan Bank Indonesia sebagai "bank sentral". Setelah Bank Indonesia berdiri maka terdapat dua jenis Rupiah yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Republik Indonesia, yaitu Rupiah terbitan Pemerintah Republik Indonesia (Kementerian Keuangan) dan Rupiah terbitan Bank Indonesia. Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan uang kertas dan logam pecahan di bawah 5 Rupiah, sedangkan Bank Indonesia menerbitkan uang kertas pecahan 5 Rupiah ke atas. Dualisme pengeluaran mata uang ini berlangsung hingga 1968.

Selanjutnya, pengeluaran uang kertas maupun logam dilakukan oleh Bank Indonesia. Langkah ini didasarkan pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1968 Tentang Bank Sentral, Pertimbangannya adalah antara uang kertas yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia maupun Pemerintah, secara ekonomi, dipandang tidak ada perbedaan fungsional sehingga untuk keseragaman dan efisiensi pengeluaran uang, cukup dilakukan oleh satu instansi saja, yaitu Bank Indonesia.

Adanya uang baru tidak berarti seluruh masalah ekonomi akan selesai. Indonesia mulai mengalami inflasi. Hingga pada 1970, Rupiah senilai 5.000 dan 10.000 dicetak. Saat inflasi sudah terkendali, uang koin senilai 1 hingga 100 Rupiah mulai diedarkan. Pada 1997–1998, terjadi krisis ekonomi besar-besaran di Asia. Dampak yang diterima oleh Indonesia adalah

berkurangnya nilai tukar Rupiah sebesar 80%. Pada Juni 1998, nilai tukar Rupiah mencapai titik terendah. Setelah itu, tahun 2000, pencetakan uang kertas senilai 100 dan 500 Rupiah mulai dihentikan dan muncullah uang 1.000 Rupiah dan 5.000 Rupiah. Uang kertas senilai 20.000 Rupiah diperkenalkan sekitar tahun 2004 dan rancangan baru uang 10.000 dan 50.000 diperkenalkan tahun 2005.

MATA UANG KOLEKSI MUSEUM NEGERI SUMATERA SELATAN

Peredaran mata uang di wilayah Sumatera Selatan sudah berlangsung sejak masa kerajaan Hindu-Buddha, baik mata uang asing maupun lokal, yang dikeluarkan oleh kerajaan-kerajaan yang pernah berkuasa dan terus berkembang pada masa Hindia Belanda, hingga saat ini. Satu hal yang perlu dipahami bahwa pada bab ini, terdapat dua objek pengkajian, yaitu mata uang asing—dari Tiongkok, Belanda, Inggris, Spanyol, dan kerajaan atau negara lainnya—yang beredar di wilayah Sumatera Selatan serta mata uang lokal yang dicetak atau dikeluarkan oleh Pemerintahan di wilayah Sumatera Selatan, mulai dari Kerajaan Majapahit hingga Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bab ini menyajikan perkembangan mata uang yang beredar di wilayah Sumatera Selatan berdasarkan data Koleksi Museum Negeri Sumatera Selatan. Sajian pada bab ini dikemas dalam bentuk tabel yang berisi nama, nomor inventarisasi, deskripsi, dan foto sampel mata uang koleksi Museum Negeri Sumatera Selatan yang dibagi atas beberapa periodisasi, yaitu masa kerajaan Hindu-Budha (pra-Kedatuan Sriwijaya, Kedatuan Sriwijaya, dan Kerajaan Majapahit), masa kerajaan Islam (Kesultanan Demak dan Kesultanan Palembang Darussalam) dan Pengaruh Barat (VOC), masa Hindia Belanda, masa Pendudukan Jepang, masa Awal Kemerdekaan dan Revolusi Fisik Kemerdekaan Indonesia, serta masa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Mata Uang Masa Kerajaan Hindu-Buddha

Mata Uang Masa Pra-Kedatuan Sriwijaya

Mata Uang Dinasti Han Timur “Kepeng”

Foto, Nama, dan Nomor Inventarisasi	Deskripsi
 <p data-bbox="456 1825 660 1891">Kepeng <i>Wu-shu</i> (06.4573)</p>	Mata uang logam ini berbentuk lingkaran dengan lubang persegi di bagian tengah; berdiameter 21 mm; dan berbahan perunggu. Pada lingkaran terluar (sisi depan dan belakang), dibuat garis tepi, sedangkan lubang persegi di bagian tengah tidak memiliki garis tepi. Pada sisi depan (<i>recto</i>), di sebelah kanan dan kiri, terdapat tulisan beraksara Tionghoa, sedangkan bagian atas, bawah, dan sisi belakang (<i>verso</i>) polos—tanpa tulisan. Transliterasi dari tulisan tersebut adalah (dari kanan ke kiri) “WU SHU” (5 Shu).

Mata Uang Dinasti T'ang "Kepeng"

Foto, Nama, dan Nomor Inventarisasi	Deskripsi
 <p data-bbox="326 635 561 701">Kepeng <i>K'ai-yuan</i> (06.1249)</p>	<p data-bbox="600 373 1312 803">Mata uang logam ini berbentuk lingkaran dengan lubang persegi di bagian tengah; berdiameter 25 mm dengan tebal 1 mm; dan berbahan perunggu. Pada lingkaran terluar dan pinggiran lubang persegi, dibuat garis tepi, baik di sisi depan maupun belakang. Pada sisi depan (<i>recto</i>), terdapat tulisan beraksara Tionghoa "<i>K'AI-YUAN T'UNG-PAO</i>" (Mata Uang Periode <i>K'ai-yuan</i>), sedangkan sisi belakang (<i>verso</i>) polos—tanpa tulisan. Mata Uang "<i>K'ai-yuan</i>", diduga, diterbitkan sejak masa pemerintahan Kaisar Li Yuan yang bergelar "<i>T'ang Kao Tsu</i>" (618–626) dan dicetak secara terus-menerus selama hampir 300 tahun pemerintahan Dinasti T'ang.</p>
 <p data-bbox="326 1340 561 1406">Kepeng <i>K'ai-yuan</i> (06.1361)</p>	<p data-bbox="600 821 1312 1323">Mata uang logam ini berbentuk lingkaran dengan lubang persegi di bagian tengah; berdiameter 25 mm dengan tebal 1 mm; dan berbahan perunggu. Pada lingkaran terluar dan pinggiran lubang persegi, dibuat garis tepi, baik di sisi depan maupun belakang. Pada sisi depan (<i>recto</i>), terdapat tulisan beraksara Tionghoa "<i>K'AI-YUAN T'UNG-PAO</i>" (Mata Uang Periode <i>K'ai-yuan</i>), sedangkan pada sisi belakang (<i>verso</i>), di bagian atas, terdapat motif bulan sabit tunggal (garis yang agak melengkung ke atas). Mata Uang "<i>K'ai-yuan</i>", diduga, diterbitkan sejak masa pemerintahan Kaisar Li Yuan yang bergelar "<i>T'ang Kao Tsu</i>" (618–626) dan dicetak secara terus-menerus selama hampir 300 tahun pemerintahan Dinasti T'ang.</p>

Mata Uang Masa Kedatuan Sriwijaya

Mata Uang Dinasti Song Utara “Kepeng”

Foto, Nama, dan Nomor Inventarisasi	Deskripsi
 <p data-bbox="435 685 653 751">Kepeng <i>Chih-tao</i> (06.1256)</p>	<p data-bbox="699 423 1415 816">Mata uang logam ini berbentuk lingkaran dengan lubang persegi di bagian tengah; berdiameter 25 mm dengan tebal 1 mm; dan berbahan perunggu. Pada lingkaran terluar dan pinggiran lubang persegi, dibuat garis tepi, baik di sisi depan maupun belakang. Pada sisi depan (<i>recto</i>), terdapat tulisan beraksara Tionghoa “<i>CHIH-TAO YUAN-PAO</i>”, sedangkan sisi belakang (<i>verso</i>) polos—tanpa tulisan. Mata Uang “<i>Chih-tao</i>”, diduga, diterbitkan pada periode 995–998 dalam masa pemerintahan Kaisar T'ai Tsung (976–997) hingga tahun pertama pemerintahan Kaisar Chen Tsung (998–1022).</p>
 <p data-bbox="420 1094 669 1159">Kepeng <i>Hsien-p'ing</i> (06.4553)</p>	<p data-bbox="699 838 1415 1188">Mata uang logam ini berbentuk lingkaran dengan lubang persegi di bagian tengah; berdiameter 23 mm dengan berat 4 gram; dan berbahan perunggu. Pada lingkaran terluar dan pinggiran lubang persegi, dibuat garis tepi, baik di sisi depan maupun belakang. Pada sisi depan (<i>recto</i>), terdapat tulisan beraksara Tionghoa “<i>HSIEN-P'ING YUAN-PAO</i>”, sedangkan sisi belakang (<i>verso</i>) polos—tanpa tulisan. Mata Uang “<i>Hsien-p'ing</i>”, diduga, diterbitkan pada periode 998–1004 dalam masa pemerintahan Kaisar Chen Tsung (998–1022).</p>
 <p data-bbox="435 1476 653 1541">Kepeng <i>Ching-te</i> (06.1255)</p>	<p data-bbox="699 1209 1415 1559">Mata uang logam ini berbentuk lingkaran dengan lubang persegi di bagian tengah; berdiameter 25 mm dengan tebal 1 mm; dan berbahan perunggu. Pada lingkaran terluar dan pinggiran lubang persegi, dibuat garis tepi, baik di sisi depan maupun belakang. Pada sisi depan (<i>recto</i>), terdapat tulisan beraksara Tionghoa “<i>CHING-TE YUAN-PAO</i>”, sedangkan sisi belakang (<i>verso</i>) polos—tanpa tulisan. Mata Uang “<i>Ching-te</i>”, diduga, diterbitkan pada periode 1004–1007 dalam masa pemerintahan Kaisar Chen Tsung (998–1022).</p>
 <p data-bbox="435 1854 653 1919">Kepeng <i>T'ien-hsi</i> (06.1365)</p>	<p data-bbox="699 1587 1415 1893">Mata uang logam ini berbentuk lingkaran dengan lubang persegi di bagian tengah; berdiameter 25 mm dengan tebal 1 mm; dan berbahan perunggu. Pada lingkaran terluar dan pinggiran lubang persegi, dibuat garis tepi, baik di sisi depan maupun belakang. Pada sisi depan (<i>recto</i>), terdapat tulisan beraksara Tionghoa “<i>T' IEN-HSI T'UNG-PAO</i>”, sedangkan sisi belakang (<i>verso</i>) polos—tanpa tulisan. Mata Uang “<i>T'ien-hsi</i>”, diduga, diterbitkan pada periode 1017–1021 dalam masa pemerintahan Kaisar</p>

	Chen Tsung (998-1022).
 <p>Kepeng <i>Ta Kuan</i> (06.1253)</p>	Mata uang logam ini berbentuk lingkaran dengan lubang persegi di bagian tengah; berdiameter 25 mm dengan tebal 1 mm; dan berbahan perunggu. Pada lingkaran terluar dan pinggiran lubang persegi, dibuat garis tepi, baik di sisi depan maupun belakang. Pada sisi depan (<i>recto</i>), terdapat tulisan beraksara Tionghoa " <i>TA-KUAN YUAN-PAO</i> ", sedangkan sisi belakang (<i>verso</i>) polos—tanpa tulisan. Mata Uang " <i>Ta Kuan</i> ", diduga, diterbitkan pada periode 1107-1110 dalam masa pemerintahan Kaisar Hui Tsung (1101-1125).
 <p>Kepeng <i>Cheng-ho</i> (06.4552)</p>	Mata uang logam ini berbentuk lingkaran dengan lubang persegi di bagian tengah; berdiameter 24 mm dengan berat 3 gram, dan berbahan perunggu. Pada lingkaran terluar dan pinggiran lubang persegi, dibuat garis tepi, baik di sisi depan maupun belakang. Pada sisi depan (<i>recto</i>), terdapat tulisan beraksara Tionghoa " <i>CHENG-HO TUNG-PAO</i> ", sedangkan sisi belakang (<i>verso</i>) polos—tanpa tulisan. Mata Uang " <i>Cheng-ho</i> ", diduga, diterbitkan pada periode 1111-1117 dalam masa pemerintahan Kaisar Hui Tsung (1101-1125).

Kepeng Tiruan *Hsien-P'ing*

Foto, Nama, dan Nomor Inventarisasi	Deskripsi
 <p>Kepeng <i>Hsien-p'ing</i> (06.4554)</p>	Mata uang logam ini berbentuk lingkaran dengan lubang persegi yang besar di bagian tengah; berdiameter 16 mm; dan berbahan timah. Pada sisi depan (<i>recto</i>)—lingkar terluar dan pinggiran lubang persegi dibuat garis tepi; terdapat tulisan menyerupai aksara Tionghoa. Sisi belakang (<i>verso</i>) polos—tanpa tulisan. Mata uang ini, diduga, merupakan terbitan lokal—tiruan mata uang " <i>Hsien-p'ing</i> ".

Mata Uang Masa Kerajaan Majapahit

Mata Uang Kerajaan Majapahit "Gobog"

Foto, Nama, dan Nomor Inventarisasi	Deskripsi
 <p data-bbox="492 941 597 1000"><i>Gobog</i> (06.256)</p>	<p data-bbox="697 425 1414 639">Mata uang logam ini berbentuk lingkaran dengan garis tepi; berdiameter 56 mm dengan tebal 4 mm; dan berbahan tembaga. Pada sisi depan (<i>recto</i>), terdapat relief wayang perwujudan Dewa Semar, sedangkan pada sisi belakang, terdapat 5 baris tulisan beraksara Hanacaraka "<i>Hana Carakasa Hansala Wadajaya-nga</i>".</p>
 <p data-bbox="492 1530 597 1589"><i>Gobog</i> (06.321)</p>	<p data-bbox="697 1026 1414 1203">Mata uang logam ini berbentuk lingkaran dengan garis tepi dan terdapat lubang bujur sangkar di bagian tengah; berdiameter 46 mm; dan berbahan kuningan. Pada sisi depan maupun belakang, terdapat relief sepasang ayam jago saling berhadapan.</p>
	<p data-bbox="697 1611 1414 1926">Mata uang logam ini berbentuk lingkaran dengan garis tepi; terdapat lubang bujur sangkar di bagian tengah yang juga diherikan garis tepi; berdiameter 56 mm dengan tebal 4 mm; dan berbahan kuningan. Pada sisi depan (<i>recto</i>), terdapat relief tokoh Punakawan dalam pewayangan, yaitu Gareng dan Bagong serta tulisan beraksara Hanacaraka "<i>JA</i>" (bagian atas) dan "<i>YA</i>" (bagian bawah). Sedangkan pada sisi belakang (<i>verso</i>), terdapat relief Semar dan Petruk serta tulisan beraksara</p>

 <p data-bbox="388 504 503 563">Gobog (06.455)</p>	<p data-bbox="592 235 1315 345">Hanacaraka “PA” (bagian atas) dan “DHA” (bagian bawah). Inskripsi tersebut apabila digabungkan menjadi “JA YA PA DHA”.</p>
---	--

Mata Uang Dinasti Ming “Kepeng”

Foto, Nama, dan Nomor Inventarisasi	Deskripsi
 <p data-bbox="330 1046 561 1105">Kepeng Hung-wu (06.4553)</p>	<p data-bbox="592 777 1315 1105">Mata uang logam ini berbentuk lingkaran dengan lubang persegi di bagian tengah; berdiameter 24 mm dengan berat 3 gram; dan berbahan perunggu. Pada lingkaran terluar dan pinggiran lubang persegi, dibuat garis tepi, baik di sisi depan maupun belakang. Pada sisi depan (<i>recto</i>), terdapat tulisan beraksara Tionghoa “HUNG-WU T’UNG-PAO”, sedangkan sisi belakang (<i>verso</i>) polos—tanpa tulisan. Mata Uang “Hung-wu”, diduga, diterbitkan pada masa pemerintahan Kaisar T’ai Tsu (1368–1398).</p>

Mata Uang Masa Kerajaan Islam dan Pengaruh Barat

Mata Uang Kesultanan Demak “Pitis”

Foto, Nama, dan Nomor Inventarisasi	Deskripsi
 <p data-bbox="294 1640 456 1699">Pitis Demak (06.256)</p>	<p data-bbox="519 1371 1315 1629">Mata uang logam ini berbentuk lingkaran dengan garis tepi pada sisi depan; berdiameter 19 mm; dan berbahan timah. Pada sisi depan (<i>recto</i>), juga terdapat tulisan beraksara Jawi “Sultan Ratu Pangeran al-Patah”, sedangkan sisi belakang (<i>verso</i>) polos—tanpa tulisan dan garis tepi. “Al-Patah” yang tertulis pada mata uang ini merujuk pada Raden Patah, Peminir Kesultanan Demak yang berkuasa pada periode 1478–1504.</p>

Mata Uang Kesultanan Palembang Darussalam "Pitis"

Pitis Buntu

Foto, Nama, dan Nomor Inventarisasi	Deskripsi
 <p data-bbox="443 711 646 810">Pitis Palembang Emisi 1163 (06.4559)</p>	<p data-bbox="697 428 1412 847">Mata uang logam ini berbentuk lingkaran; berdiameter 12 mm dengan berat 1 gram; dan berbahan timah. Pada sisi depan (<i>recto</i>), terdapat garis tepi dan ukiran titik yang menonjol di bagian tengah serta tulisan beraksara Jawi "Al-Sultan Fii Balad Palembang Sanad 1163" (Sultan di Negeri Palembang Tahun 1163 Hijriah/1750 Masehi), sedangkan sisi belakang (<i>verso</i>) polos—tanpa tulisan dan garis tepi. Tulisan pada mata uang ini tidak memuat nama sultan, tetapi memuat angka tahun, yaitu 1163 Hijriah (1750 Masehi)—merupakan masa pemerintahan Sultan Mahmud Badaruddin Jayo Wikramo (1724–1758).</p>

Pitis Tebok

Foto, Nama, dan Nomor Inventarisasi	Deskripsi
 <p data-bbox="443 1354 646 1408">Pitis Palembang (06.4557)</p>	<p data-bbox="697 1070 1412 1386">Mata uang logam ini berbentuk lingkaran dengan lubang persegi di bagian tengah; berdiameter 18 mm; dan berbahan timah. Pada sisi depan (<i>recto</i>)—lingkar terluar dan pinggiran lubang persegi dibuat garis tepi; serta terdapat tulisan beraksara Jawi "Alamat Sultan". Sisi belakang (<i>verso</i>) polos—tanpa tulisan. Tulisan pada mata uang ini tidak memuat angka tahun maupun nama sultan. Namun, diduga, diterbitkan pada masa Kesultanan Palembang Darussalam.</p>
 <p data-bbox="443 1716 646 1771">Pitis Palembang Emisi 1219 (06.4558)</p>	<p data-bbox="697 1432 1412 1812">Mata uang logam ini berbentuk segi delapan dengan lubang bulat di bagian tengah; berdiameter 18 mm; dan berbahan timah. Pada sisi depan (<i>recto</i>)—bagian terluar dan pinggiran lubang bulat, dibuat garis tepi; serta terdapat tulisan beraksara Jawi "Masru Fiih Balad Palembang 1219" (Dicitak di Negeri Palembang 1219 Hijriah/1805 Masehi). Sisi belakang (<i>verso</i>) polos—tanpa tulisan. Tulisan pada mata uang ini tidak memuat nama sultan, tetapi memuat angka tahun, yaitu 1219 Hijriah (1805 Masehi)—merupakan masa pemerintahan Sultan Mahmud Badaruddin II (1803–1821).</p>

 <p>Pitis Palembang (06.1081)</p>	<p>Mata uang logam ini berbentuk lingkaran dengan lubang bulat di bagian tengah; berdiameter 15 mm dengan tebal 1 mm; dan berbahan timah. Pada sisi depan (<i>recto</i>)—lingkar terluar dan pinggiran lubang bulat, dibuat garis tepi; serta terdapat tulisan beraksara Jawi. Sisi belakang (<i>verso</i>) polos—tanpa tulisan. Tulisan pada mata uang ini tidak memuat angka tahun maupun nama sultan. Namun, diduga, diterbitkan pada masa Kesultanan Palembang Darussalam.</p>
 <p>Pitis Palembang (06.1082)</p>	<p>Mata uang logam ini berbentuk lingkaran dengan lubang bulat di bagian tengah; berdiameter 20 mm dengan tebal 1 mm; dan berbahan timah. Pada sisi depan (<i>recto</i>)—lingkar terluar dan pinggiran lubang bulat, dibuat garis tepi; serta terdapat tulisan beraksara Jawi. Sisi belakang (<i>verso</i>) polos—tanpa tulisan. Tulisan pada mata uang ini tidak memuat angka tahun maupun nama sultan. Namun, diduga, diterbitkan pada masa Kesultanan Palembang Darussalam.</p>
 <p>Pitis Palembang (06.1083)</p>	<p>Mata uang logam ini berbentuk lingkaran dengan lubang bulat di bagian tengah; berdiameter 20 mm dengan tebal 1 mm; dan berbahan timah. Pada sisi depan (<i>recto</i>)—lingkar terluar dan pinggiran lubang bulat, dibuat garis tepi; serta terdapat tulisan beraksara Jawi “Zalhaf(?) Balad Palembang(?) Dha(?) al-Islami”. Sisi belakang (<i>verso</i>) polos—tanpa tulisan. Tulisan pada mata uang ini tidak memuat angka tahun maupun nama sultan. Namun, diduga, diterbitkan pada masa Kesultanan Palembang Darussalam.</p>
 <p>Pitis Palembang (06.1087)</p>	<p>Mata uang logam ini berbentuk lingkaran dengan lubang bulat di bagian tengah; berdiameter 20 mm dengan tebal 1 mm. Pada sisi depan (<i>recto</i>)—lingkar terluar dan pinggiran lubang bulat, dibuat garis tepi; serta terdapat tulisan beraksara Jawi. Sisi belakang (<i>verso</i>) polos—tanpa tulisan. Tulisan pada mata uang ini tidak memuat angka tahun maupun nama sultan. Namun, diduga, diterbitkan pada masa Kesultanan Palembang Darussalam.</p>

Mata Uang Masa Pengaruh Barat

Mata Uang VOC "Doit"

Foto, Nama, dan Nomor Inventarisasi	Deskripsi
 <p data-bbox="448 934 662 1004">Doit Emisi 1790 (06.315)</p>	<p data-bbox="711 432 1436 709">Mata uang logam ini berbentuk lingkaran, tanpa garis tepi; berdiameter 25 mm; dan berbahan tembaga. Pada sisi depan (<i>recto</i>), dari atas ke bawah, terdapat motif bintang, lambang VOC, dan tulisan "1790". Pada sisi belakang (<i>verso</i>), terdapat lambang Kerajaan Belanda (Perisai). Mata logam yang biasa disebut "Doit" ini diterbitkan oleh VOC (<i>Vereenigde Oostindische Compagnie</i>) pada 1790.</p>

Mata Uang Masa Hindia Belanda

Koin "Ayam"

Foto, Nama, dan Nomor Inventarisasi	Deskripsi
 <p data-bbox="406 1779 550 1849">Koin Ayam (06.4574)</p>	<p data-bbox="638 1277 1436 1627">Mata uang logam ini berbentuk lingkaran dengan garis tepi pada sisi depan dan belakang; berdiameter 21 mm; dan berbahan tembaga. Pada sisi depan (<i>recto</i>), terdapat relief ayam jago yang menghadap ke kanan dan di atasnya terdapat tulisan beraksara Jawi "Tanah Melayu(?)". Sedangkan pada sisi belakang (<i>verso</i>), terdapat tulisan beraksara Jawi "Satu Keping" serta angka "1" dan "2", diduga, merupakan tahun penerbitan koin ini, yaitu 1200-an Hijriah. Koin ayam serupa ini diterbitkan oleh <i>Malacca British Administration</i> pada 1247 Hijriah (1832 Masehi).</p>

Pitis Tebak

Foto, Nama, dan Nomor Inventarisasi	Deskripsi
 <p data-bbox="261 642 469 725">Pitis Palembang Emisi 1253 (06.1086)</p>	<p>Mata uang logam ini berbentuk lingkaran dengan lubang bulat di bagian tengah; berdiameter 25 mm dengan tebal 1 mm; dan berbahan timah. Pada sisi depan (<i>recto</i>)—lingkar terluar dan pinggiran lubang bulat, dibuat garis tepi; serta terdapat tulisan beraksara Jawi “<i>Al-Sultan Ing(?) Balad Palembang Sanat 1253</i>” (Sultan di Negeri Palembang 1253 Hijriah/1838 Masehi). Sisi belakang (<i>verso</i>) polos—tanpa tulisan.</p>

Mata Uang Hindia Belanda “Gulden”

Foto, Nama, dan Nomor Inventarisasi	Deskripsi
 <p data-bbox="229 1463 501 1605">5 Sen <i>Gulden</i> Logam Hindia Belanda Emisi 1913 (06.342)</p>	<p>Mata uang logam ini berbentuk lingkaran dengan lubang bulat di tengah dan garis tepi pada sisi depan maupun belakang; berdiameter 20 mm; dan berbahan tembaga-nikel. Pada sisi depan (<i>recto</i>), dari atas ke bawah, terdapat relief padi, mahkota, serta tulisan “5 <i>CI</i>” dan “<i>NEDERLANDSCH INDIE 1913</i>”. Pada sisi belakang (<i>verso</i>), di bagian atas, terdapat tulisan beraksara Hanacaraka, sedangkan di bagian bawah terdapat tulisan beraksara Jawi “<i>Seperdua Puluh Rupiah</i>”. Mata uang yang disebut “<i>Kelip</i>” ini dikeluarkan oleh <i>Nederlandsch Indie</i> pada 1913—nominalnya 5 Sen ($\frac{1}{20}$ Rupiah).</p>
	<p>Mata uang logam ini berbentuk lingkaran dengan garis tepi pada sisi depan dan belakang; berdiameter 30 mm; dan berbahan perunggu. Pada sisi depan (<i>recto</i>), terdapat lambang Kerajaan Belanda (<i>Mastaka</i>) serta tulisan “<i>NEDERLANDSCH INDIE</i>”, “1915”, dan “<i>2½ CENT</i>”. Pada sisi belakang (<i>verso</i>), terdapat tulisan beraksara Hanacaraka (lingkar luar) dan beraksara Jawi (lingkar dalam) “<i>Seperempat Puluh Rupiah</i>”. Mata uang yang disebut “<i>Benggal</i>” ini dikeluarkan oleh</p>

 <p>2½ Sen Gulden Logam Hindia Belanda Emisi 1915 (06.322)</p>	<p><i>Nederlandsch Indie</i> pada 1915—nominalnya 2½ Sen ($\frac{1}{40}$ Rupiah).</p>
 <p>10 Sen Gulden Logam Hindia Belanda Emisi 1920 (06.367)</p>	<p>Mata uang logam ini berbentuk lingkaran dengan garis tepi pada sisi depan dan belakang; berdiameter 15 mm; dan berbahan perak campuran. Pada sisi depan (<i>recto</i>), terdapat lambang Kerajaan Belanda (<i>Mastika</i>) serta tulisan "NEDERL. INDIE", "$\frac{1}{10}$ G", dan "1920". Pada sisi belakang (<i>verso</i>), terdapat tulisan beraksara Hanacaraka (lingkar luar) dan beraksara Jawi (lingkar dalam) "Sepersepuluh Rupiah". Nominal mata uang logam yang dikeluarkan oleh <i>Nederlandsch Indie</i> pada 1920 ini adalah $\frac{1}{18}$ Rupiah.</p>
 <p>5 Sen Gulden Logam Hindia Belanda</p>	<p>Mata uang logam ini berbentuk lingkaran dengan lubang bulat di tengah dan garis tepi pada sisi depan maupun belakang; berdiameter 20 mm; dan berbahan tembaga-nikel. Pada sisi depan (<i>recto</i>), dari atas ke bawah, terdapat relief padi, mahkota, serta tulisan "5 C" dan "NEDERLANDSCH INDIE 1921". Pada sisi belakang (<i>verso</i>), di bagian atas, terdapat tulisan beraksara Hanacaraka, sedangkan di bagian bawah terdapat tulisan beraksara Jawi "Seperdua Puluh Rupiah". Mata uang yang disebut "<i>Kelip</i>" ini dikeluarkan oleh <i>Nederlandsch Indie</i> pada 1921—nominalnya 5 Sen ($\frac{1}{20}$ Rupiah).</p>

<p>Emisi 1921 (06.259)</p>	 <p>Mata uang logam ini berbentuk lingkaran dengan lubang bulat di bagian tengah dan garis tepi pada sisi depan maupun belakang; berdiameter 20 mm; dan berbahan tembaga-nikel. Pada sisi depan (<i>recto</i>), dari atas ke bawah, terdapat relief padi, mahkota, serta tulisan "5 Ct" dan "NEDERLANDSCH INDIE 1922". Pada sisi belakang (<i>verso</i>), di bagian atas, terdapat tulisan beraksara Hanacaraka, sedangkan di bagian bawah, terdapat tulisan beraksara Jawi "Seperdua Puluh Rupiah". Mata uang yang disebut "Kelip" ini dikeluarkan oleh <i>Nederlandsch Indie</i> pada 1922—nominalnya 5 Sen ($\frac{1}{20}$ Rupiah).</p> <p>5 Sen <i>Gulden</i> Logam Hindia Belanda Emisi 1922 (06.339)</p>
 <p>1 Sen <i>Gulden</i> Logam Hindia Belanda Emisi 1929 (06.357)</p>	<p>Mata uang logam ini berbentuk lingkaran dengan garis tepi pada sisi depan dan belakang; berdiameter 30 mm; dan berbahan perunggu. Pada sisi depan (<i>recto</i>), terdapat lambang Kerajaan Belanda (<i>Mastaka</i>) serta tulisan "NEDERLANDSCH INDIE", "1929", dan "1 CENT". Pada sisi belakang (<i>verso</i>), terdapat tulisan beraksara Hanacaraka (lingkar luar) dan beraksara Jawi (lingkar dalam) "Seperseratus Rupiah". Mata uang yang disebut "Benggol" ini dikeluarkan oleh <i>Nederlandsch Indie</i> pada 1929—nominalnya 1 Sen ($\frac{1}{100}$ Rupiah).</p>
	<p>Mata uang logam ini berbentuk lingkaran dengan lubang bulat di bagian tengah dan garis tepi pada sisi depan maupun belakang; berdiameter 23 mm; dan berbahan perunggu. Pada sisi depan (<i>recto</i>), terdapat relief padi serta tulisan "NEDERLANDSCH INDIE 1937" dan "1 Ct". Pada sisi belakang (<i>verso</i>), terdapat tulisan beraksara Hanacaraka dan Jawi "Seperseratus Rupiah" serta relief bunga teratai dan</p>

 <p>1 Sen <i>Gulden</i> Logam Hindia Belanda Emisi 1937 (06.372)</p>	<p>bunga matahari. Nominal mata uang logam yang dikeluarkan oleh <i>Nederlandsch Indie</i> pada 1937 ini adalah 1 Sen ($\frac{1}{100}$ Rupiah).</p>
 <p>1 Sen <i>Gulden</i> Logam Hindia Belanda Emisi 1938 (06.460)</p>	<p>Mata uang logam ini berbentuk lingkaran dengan lubang bulat di bagian tengah dan garis tepi pada sisi depan maupun belakang; berdiameter 23 mm; dan berbahan perunggu. Pada sisi depan (<i>recto</i>), terdapat relief padi serta tulisan "NEDERLANDSCH INDIE 1938" dan "1 Ct". Pada sisi belakang (<i>verso</i>), terdapat tulisan beraksara Hanacaraka dan Jawi "Seperseratus Rupiah" serta relief bunga teratai dan bunga matahari. Nominal mata uang logam yang dikeluarkan oleh <i>Nederlandsch Indie</i> pada 1938 ini adalah 1 Sen ($\frac{1}{100}$ Rupiah).</p>

Mata Uang Masa Pendudukan Jepang "Gulden Jepang"

Foto, Nama, dan Nomor Inventarisasi	Deskripsi
	<p>Mata uang kertas ini berbentuk persegi panjang; berwarna dasar putih dengan motif berwarna abu-abu; berukuran panjang 102 mm dan lebar 80 mm. Pada sisi depan (<i>recto</i>), di bagian tengah, terdapat tulisan "DE JAPANSCH REGEERING" dan "VIJF CENT". Di sudut kanan dan kiri bagian atas, terdapat angka "5". Pada sisi belakang (<i>verso</i>), di bagian tengah, terdapat bingkai yang berisi angka "5"; di keempat sudutnya, juga terdapat angka "5". Mata uang ini memiliki kode $\frac{5}{100}$.</p>

<p>5 Sen Gulden Jepang (06.234)</p>	<p>Mata uang kertas ini berbentuk persegi panjang; berwarna dasar putih dengan motif berwarna abu-abu; berukuran panjang 104 mm dan lebar 50 mm. Pada sisi depan (<i>recto</i>), di bagian tengah, terdapat tulisan "DE JAPANSCH REGEERING" dan "TIEN CENT"; di keempat sudutnya, terdapat angka "10". Pada sisi belakang (<i>verso</i>), di bagian tengah, terdapat bingkai yang berisi angka "10"; di keempat sudutnya, juga terdapat angka "10". Mata uang ini memiliki kode $\frac{S}{CF}$.</p>
	<p>Mata uang kertas ini berbentuk persegi panjang; berwarna dasar putih dengan motif berwarna abu-abu; berukuran panjang 138 mm dan lebar 65 mm. Pada sisi depan (<i>recto</i>), di sebelah kiri, terdapat angka "1" dan gambar buah sukun; di sebelah kanan, terdapat angka "1" dan gambar buah kelapa; di bagian tengah, terdapat tulisan "DE JAPANSCH REGEERING" dan "BETAALT AAN TOONDER EEN GULDEN". Pada sisi belakang (<i>verso</i>), di bagian tengah, terdapat bingkai yang berisi angka "1"; di sebelah kanan dan kiri, terdapat angka "1". Mata uang ini memiliki kode S1.</p>
<p>10 Sen Gulden Jepang (06.225)</p>	
<p>1 Gulden Jepang (06.121)</p>	

	<p>Mata uang kertas ini berbentuk persegi panjang; berwarna dasar krem dengan motif berwarna hijau; berukuran panjang 148 mm dan lebar 70 mm. Pada Sisi depan (<i>recto</i>), di bagian tengah, terdapat tulisan "DE JAPANSCH REGERING" dan "BETAALT AAN TOONDER VIJF GULDEN". di bawahnya, terdapat tulisan berhuruf Jepang; di setiap sudutnya, terdapat angka "5". Sisi belakang (<i>verso</i>) didominasi ragam hias jaring-jaring dan daun yang distilir; di sebelah kiri, kanan, dan tengah, terdapat angka "5". Mata uang ini memiliki kode SG.</p>
<p style="text-align: center;"><i>5 Gulden Jepang</i> (06.237)</p>	

Mata Uang Masa Awal Kemerdekaan dan Revolusi Fisik Kemerdekaan Indonesia

Gulden NICA

Foto, Nama, dan Nomor Inventarisasi	Deskripsi
<p style="text-align: center;"><i>2½ Sen Gulden Kertas Hindia Belanda</i> Emisi 1943 (06.221)</p>	<p>Mata uang kertas ini berbentuk persegi panjang; berwarna dasar putih; berukuran panjang 126 mm dan lebar 73 mm. Sisi depan (<i>recto</i>) berwarna abu-abu; di bagian kiri, terdapat gambar lambang Kerajaan Belanda, berupa perisai bermahkota yang dipegang oleh dua ekor singa dan di bawahnya, terdapat pita yang bertuliskan "JE MAINTIENDRAI"; di bagian tengah, terdapat bingkai yang berisi angka "2½"; di sebelah kanan, terdapat potret Ratu Wilhelmina dalam bingkai berbentuk lingkaran; di keempat sudutnya, terdapat angka "1". Sisi belakang (<i>verso</i>) berwarna hijau; di sebelah kanan dan kiri, terdapat tulisan berbahasa Belanda tentang peraturan mata uang; di bagian tengah, terdapat angka "2½". Mata uang ini bernomor seri BW052747C.</p>

	<p>Mata uang kertas ini berbentuk persegi panjang; berwarna dasar putih; berukuran panjang 152 mm dan lebar 73 mm. Sisi depan (<i>recto</i>) berwarna merah; di sebelah kiri, terdapat gambar lambang Kerajaan Belanda, berupa perisai bermahkota yang dipegang oleh dua ekor singa dan di bawahnya, terdapat pita yang bertuliskan "JE MAINTIENDRAT"; di bagian tengah, terdapat bingkai yang berisi angka "10"; di sebelah kanan, terdapat potret Ratu Wilhelmina dalam bingkai berbentuk lingkaran; di keempat sudutnya, terdapat angka "10". Sisi belakang (<i>verso</i>) berwarna hijau; pada bagian atas, tertulis, "NEDERLANDSCH INDIE"; di sebelah kanan dan kiri, terdapat tulisan berbahasa Belanda tentang peraturan mata uang; di bagian tengah, terdapat tiga buah gambar, yaitu seorang penerbang pesawat, seorang tentara, dan sebuah kapal perang (angkatan laut); di keempat sudutnya, terdapat angka "10". Mata uang ini bernomor seri DX 121308.</p>
<p>10 Rupiah <i>Gulden</i> Kertas Hindia Belanda Emisi 1943 (06.229)</p>	
	<p>Mata uang kertas ini berbentuk persegi panjang; berwarna dasar putih; berukuran panjang 150 mm dan lebar 75 mm. Sisi depan (<i>recto</i>) berwarna ungu; di bagian kiri, terdapat gambar bunga teratai; di sebelah kanan, terdapat sebuah bingkai yang berisi angka "5", di bawahnya, terdapat angka "1946"; di bagian tengah, terdapat tulisan "DE JAVASCHE BANK", "BETAALT AAN TOONDER VIJF GULDEN", dan "MEMBAJAR KEPADA PEMBAWA LIMA ROEPIAH". Sisi belakang (<i>verso</i>) berwarna merah; di bagian tengah, terdapat empat buah kotak yang di dalamnya berisi tulisan tentang peraturan mata uang dalam empat bahasa; di sudut kiri-bawah dan kanan-atas, terdapat angka "5".</p>
<p>5 Rupiah <i>Gulden</i> Kertas NICA Emisi 1946 (06.114)</p>	



25 Rupiah Gulden Kertas NICA Emisi 1946 (06.236)

Mata uang kertas ini berbentuk persegi panjang; berwarna dasar hijau; berukuran panjang 150 mm lebar 75 mm. Sisi depan (*recto*) berwarna hitam; di sebelah kiri, terdapat gambar pantai dengan tiga buah pohon kelapa; di sebelah kanan, terdapat bingkai yang berisi angka "25", di bawahnya, terdapat angka "1946"; di bagian tengah, terdapat tulisan "DE JAVASCHE BANK", "BETAALT AAN TOONDER", "VIJFENTWINTIG GULDEN", dan "MEMBAJAR KEPADA PEMBAWA DOEWA POELOEH LIMA ROEPIAH". Sisi belakang (*verso*) berwarna abu-abu; di bagian tengah, terdapat empat buah kotak berisi tulisan tentang peraturan mata uang dalam empat bahasa; di sudut kiri-bawah dan kanan-atas, terdapat angka "25". Mata uang ini bernomor seri 086127NT.



2½ Rupiah Gulden Kertas NICA 1948 (06.219)

Mata uang kertas ini berbentuk persegi panjang; berwarna dasar putih dengan motif berwarna merah; berukuran panjang 124 mm dan lebar 64 mm. Pada sisi depan (*recto*), di sebelah kiri, terdapat gambar bunga cempaka; di sebelah kanan, terdapat lingkaran yang berisi angka "2½" dan di bawahnya, terdapat tulisan "1948"; di bagian tengah, terdapat tulisan "DE JAVASCHE BANK", "MEMBAJAR KEPADA PEMBAWA DOEA ROEPIAH SETENGAH", dan "BETAALT AAN TOONDER TWEE EEN HALVE GULDEN". Pada sisi belakang (*verso*), di sudut atas-kanan dan kiri, terdapat gambar penampang bunga; di sudut bawah-kanan dan kiri, terdapat angka "2½"; di bagian tengah, terdapat tulisan "DJB"; di sebelah kanan dan kirinya, terdapat sebuah kotak yang berisi peraturan tentang mata uang dalam dua bahasa dan berlatar belakang daun padi menyerupai sayap. Mata uang ini bernomor seri $\frac{C}{52}$ 603240.

Rupiah ORI (*Oeang Republik Indonesia*)

Rupiah ORIPS (*Oeang Republik Indonesia Provinsi Sumatera*)

Foto, Nama, dan Nomor Inventarisasi	Deskripsi
 <p data-bbox="359 1009 817 1081">5 Rupiah Kertas ORIPS Emisi 1947 (06.218)</p>	<p data-bbox="880 382 1329 1124">Mata uang kertas ini berbentuk persegi panjang; berwarna dasar putih dengan motif berwarna biru; berukuran panjang 135 mm dan lebar 70 mm. Sisi depan (<i>recto</i>), di sebelah kiri, terdapat bingkai berisi potret Presiden Soekarno; di sebelah kanan, terdapat tulisan "REPUBLIK INDONESIA", "LIMA RUPIAH", "TANDA PEMBAJARAN JANG SAH", dan "PROPINSI SUMATERA"; di keempat sudutnya, terdapat angka "5". Sisi belakang (<i>verso</i>), di bagian atas, terdapat gambar rumah adat Minangkabau, angka "5", dan gambar gunung; di bagian bawah, terdapat tulisan "LIMA", peraturan tentang mata uang, dan tulisan "RUPIAH". Mata uang ini bernomor seri 08571EFM.</p>
 <p data-bbox="359 1762 817 1834">10 Rupiah Kertas ORIPS Emisi 1947 (06.230)</p>	<p data-bbox="880 1135 1329 1911">Mata uang kertas ini berbentuk persegi panjang; berwarna dasar putih dengan motif berwarna hitam; berukuran panjang 135 mm dan lebar 76 mm. Pada sisi depan (<i>recto</i>), di sebelah kiri, terdapat tulisan "REPUBLIK INDONESIA" dan di sebelah kanan, terdapat tulisan "PROPINSI SUMATERA"; di bagian tengah, dari atas ke bawah, terdapat tulisan "TANDA PEMBAJARAN JANG SAH", "10", dan "SEPULUH RUPIAH" berlatar belakang gambar gunung dan jalan di lereng bukit; di keempat sudutnya, terdapat angka "10". Pada sisi belakang (<i>verso</i>), di bagian tengah, terdapat sebuah kotak yang berisi peraturan tentang mata uang; di sebelah kanan dan kiri, terdapat angka</p>

	<p>"10". Mata uang ini bernomor seri 15186RcA.</p>
 <p>5 Rupiah Kertas ORIPS Emisi 1948 (06.224)</p>	<p>Mata uang kertas ini berbentuk persegi panjang; berwarna dasar putih dengan motif berwarna hijau; berukuran panjang 128 mm dan lebar 70 mm. Pada sisi depan (<i>recto</i>), di bagian kiri, terdapat tulisan "REPUBLIK INDONESIA"; di sebelah kanan, terdapat tulisan "PROPINSI SUMATERA"; di bagian tengah, terdapat tulisan "TANDA PEMBAJARAN JANG SAH", "LIMA RUPIAH"; di bawahnya, terdapat gambar pemandangan gunung, seorang petani yang sedang membajak sawah, dan matahari terbit serta tulisan "BUKIT TINGGI", "GUBERNUR SUMATERA", dan "1-1-1948"; di keempat sudutnya, terdapat angka "5". Pada sisi belakang (<i>verso</i>), di bagian tengah, terdapat sebuah kotak yang berisi peraturan tentang mata uang serta enam buah angka "5"—dua di antaranya berukuran lebih besar. Mata uang ini bernomor seri 34445BfK.</p>
	<p>Mata uang kertas ini berbentuk persegi panjang; berwarna dasar putih dengan motif berwarna hijau; berukuran panjang 136 mm dan lebar 78 mm. Pada sisi depan (<i>recto</i>), di keempat sudutnya, terdapat angka "10"; di sebelah kiri bagian bawah, terdapat gambar tangkai padi dan di sebelah kanannya, gambar daun kelapa; di bagian tengah, terdapat tulisan "REPUBLIK INDONESIA", "PROPINSI SUMATERA", "TANDA PEMBAJARAN JANG SAH", "SEPULUH RUPIAH", dan tanda tangan Gubernur Sumatera</p>

 <p>10 Rupiah Kertas ORIPS Emisi 1948 (06.235)</p>	<p>Tengku Moh. Hasan. Pada sisi belakang (<i>verso</i>), di sebelah kiri, terdapat bingkai yang menyerupai bunga matahari yang berisi angka "10"; di sebelah kanan, terdapat kotak yang berisi peraturan tentang mata uang. Mata uang ini bernomor seri 56027^{Ref}/₃.</p>
 <p>25 Rupiah Kertas ORIPS Emisi 1948 (06.31)</p>	<p>Mata uang kertas ini berbentuk persegi panjang; berwarna dasar kuning dengan motif berwarna merah; berukuran panjang 164 mm dan lebar 81 mm. Pada sisi depan (<i>recto</i>), terdapat tulisan "REPUBLIK INDONESIA", "PROPINSI SUMATERA", "DUA PULUH LIMA RUPIAH", "GUBERNUR SUMATERA REPUBLIK INDONESIA", "B. TINGGI", dan "17 JAN 1948"; di sebelah kiri, terdapat gambar pesawat, kapal, dan rumah rakit; di sudut kiri dan kanan atas terdapat angka "25". Pada sisi belakang (<i>verso</i>), terdapat gambar daun-daun yang distilir; di bagian tengah-atas, terdapat angka "25"; di bagian tengah-bawah, terdapat tulisan "NRI". Mata uang ini bernomor seri 010361FnV.</p>

Rupiah ORIPS Sumatera Selatan

Foto, Nama, dan Nomor Inventarisasi	Deskripsi
	<p>Mata uang kertas ini berbentuk persegi panjang; berwarna dasar putih dengan motif berwarna biru; berukuran panjang 135 mm dan lebar 65 mm. Pada sisi depan (<i>recto</i>), di keempat sudutnya, terdapat angka "10"—di sudut kiri-bawah relatif besar; di bagian tengah, terdapat tulisan</p>

	<p>"REPUBLIK INDONESIA", "PROPINSI SUMATERA", "TANDA PEMBAJARAN JANG SAH", "SEPULUH RUPIAH", dan "BERLAKU UNTUK SUB PROPINSI SUMATERA SELATAN". Pada sisi belakang (<i>verso</i>), di sebelah kiri dan kanan, terdapat bingkai berbentuk lingkaran yang berisi angka "10", di tengahnya, terdapat kotak yang berisi peraturan tentang mata uang. Mata uang ini bernomor seri 89238.</p>
<p>10 Rupiah Kertas ORIPS Sumatera Selatan Emisi 1948 (06.228)</p>	

Rupiah ORIDA (*Oeang Republik Indonesia Daerah*)

Foto, Nama, dan Nomor Inventarisasi	Deskripsi
	<p>Mata uang kertas ini berbentuk persegi panjang; berwarna dasar krem dengan motif berwarna hijau; berukuran panjang 151 mm dan lebar 80 mm. Pada sisi depan (<i>recto</i>), di bagian tengah, terdapat tulisan "MANDAT D.P.D.P.", "Kas Negara Daerah Palembang", "DIPERINTAHKAN MEMBAJAR KEPADA JANG MEMEGANG MANDAT INI SEHARGA Seribu Rupiah ATAS PEMBELANDJAN PERTAHANAN DAERAH PALEMBANG JAITU DENGAN MATA DUIT URI MANAKALA URI TELAH SAH BEREDAR DI SUMATERA, "1 Agustus 1947", dan "RESIDEN DAERAH PALEMBANG", di bawahnya, terdapat tanda tangan berwarna merah; di setiap sudutnya, terdapat angka "1000"; di sebelah kanan, terdapat cap merah bertuliskan "DEWAN PERTAHANAN DAERAH PALEMBANG"; di sebelah kiri, terdapat nomor seri "AC". Pada sisi belakang (<i>verso</i>), di bagian</p>
<p>1.000 Rupiah Kertas Mandat DPDP Emisi 1947 (06.600)</p>	

	<p>lengah, terdapat tulisan "SERIBU RUPIAH", di keempat sudutnya terdapat angka "1000".</p>
 <p>1 Rupiah Kertas ORIDA Keresidenan Lampung Emisi 1948 (06.232)</p>	<p>Mata uang kertas ini berbentuk persegi panjang, berwarna dasar putih dengan motif berwarna ungu; berukuran panjang 120 mm dan lebar 70 mm. Pada sisi depan (<i>recto</i>), terdapat tulisan "REPUBLIK INDONESIA", "PROPINSI-SUMATERA", "KERESIDENAN LAMPUNG", "TANDA PEMBAJARAN JANG SAH", "SATU RUPIAH", dan kotak yang berisi peraturan tentang mata uang; di sudut kiri dan kanan bagian bawah, terdapat angka "1". Sisi belakang (<i>verso</i>) sudah pudar, hanya cap Kota Bumi yang terlihat jelas. Mata uang ini bernomor seri 476950HpK.</p>
 <p>10 Rupiah Kertas ORIDA Keresidenan Lampung Emisi 1948 (06.230)</p>	<p>Mata uang kertas ini berbentuk persegi panjang; berwarna dasar putih dengan motif berwarna abu-abu; berukuran panjang 130 mm dan lebar 75 mm. Pada sisi depan (<i>recto</i>), di sebelah kiri dan kanan, masing-masing terdapat gambar sebuah keris; di bagian tengah, terdapat tulisan "REPUBLIK INDONESIA", "PROPINSI SUMATERA", "TANDA PEMBAJARAN JANG SAH", "SEPULUH 10 RUPIAH", di bawahnya, terdapat kotak yang berisi peraturan tentang mata uang serta tanda tangan dan cap Residen Lampung. Pada sisi belakang (<i>verso</i>), di bagian tengah, terdapat angka "10", di bawahnya, terdapat kotak yang berisi peraturan tentang mata uang dengan latar belakang gambar daun-daun. Mata uang ini</p>

Rupiah Republik Indonesia Serikat (RIS)

Foto, Nama, dan Nomor Inventarisasi	Deskripsi
 <p data-bbox="422 956 837 1022">5 Rupiah Kertas RIS Emisi 1950 06.180</p>	<p data-bbox="930 447 1442 1124">Mata uang kertas ini berbentuk persegi panjang; berwarna dasar putih dengan motif berwarna merah; berukuran panjang 150 mm lebar 65 mm. Pada sisi depan (<i>recto</i>), di setiap sudut, terdapat angka "5"; di bagian tengah, terdapat tulisan "TANDA PEMBAJARAN JANG SAH", dan "LIMA RUPIAH"; di sebelah kiri, terdapat potret Presiden Ir. Soekarno; di sebelah kanan, terdapat angka "5". Pada sisi belakang (<i>verso</i>), di sebelah kiri, terdapat angka "5"; di bagian tengah, terdapat gambar pemandangan area persawahan; di sebelah kanan, terdapat peraturan tentang mata uang. Mata uang ini dikeluarkan pada 1 Januari 1950; ditandatangani oleh Menteri Keuangan; dan bernomor seri $\frac{D}{10}$ 673648.</p>

Mata Uang Masa Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)**Gunting Sjafruddin**

Foto, Nama, dan Nomor Inventarisasi	Deskripsi
 <p data-bbox="438 1633 813 1699">5 Rupiah Gunting Sjafruddin (06.606)</p>	<p data-bbox="930 1371 1442 1926">Mata uang kertas ini merupakan sebagian dari 5 Rupiah <i>Gulden</i> NICA emisi 1946 yang telah digunting; berbentuk persegi panjang; berwarna dasar putih; berukuran panjang 124 mm lebar 70 mm. Sisi depan (<i>recto</i>) berwarna ungu; di bagian tengah, terdapat tulisan "DE JAPANSCHER BANK", "BETAALT AAN TOONDER EEN GULDEN", dan "MEMBAJAR KEPADA PEMBAWA LIMA ROEPIAH"; di sebelah kanan, terdapat bingkai yang berisi angka "5" dengan ukuran relatif besar, di bawahnya, terdapat angka "1946". Sisi belakang berwarna jingga; di bagian atas dan</p>

	<p>bawah, terdapat kotak persegi panjang yang di dalamnya terdapat tulisan tentang undang-undang mata uang; di sudut kiri-bawah, terdapat angka "5" dengan ukuran relatif besar. Mata uang ini bernomor seri ABA090596.</p>
<div style="display: flex; justify-content: space-around;">  </div> <p style="text-align: center;">10 Rupiah Gunting Sjafruddin (06.595)</p>	<p>Mata uang kertas ini merupakan sebagian dari 10 Rupiah <i>Gulden NICA</i> emisi 1946 yang telah digunting; berbentuk persegi panjang; berwarna dasar krim; berukuran panjang 150 mm lebar 75 mm. Sisi depan (<i>recto</i>) berwarna merah; di sebelah kiri, terdapat gambar bunga teratai; di sebelah kanan bagian atas, terdapat bingkai yang berisi angka "10", di bawahnya terdapat angka "1946"; di bagian tengah, terdapat tulisan "<i>DE JAVASCHE BANK</i>", "<i>BETAALT AAN TOONDER VIJF GULDEN</i>" dan "<i>MEMBAJAR KEPADA PEMBAWA SEPOELOEH ROEPIAH</i>". Sisi belakang (<i>verso</i>) berwarna hijau; di bagian tengah, terdapat dua buah kotak yang berisi tulisan tentang peraturan mata uang dalam dua bahasa; di sudut kiri-bawah dan kanan-atas, terdapat angka "10". Mata uang ini bernomor seri FGD074615.</p>

Rupiah Republik Indonesia (Emisi 1951–2005)

Foto, Nama, dan Nomor Inventarisasi	Deskripsi
	<p>Tahun Emisi: 1951 Bahan : Aluminium Diameter : 23,5 mm Tebal : 2 mm Berat : 1,7 gram</p>



10 Sen Rupiah Logam
(06.344)



1 Rupiah Kertas
(06.166)



2 1/2 Rupiah Kertas
(06.127)

Tahun Emisi: 1951
Ukuran : 125 mm x 65 mm

Tahun Emisi: 1951
Ukuran : 128 mm x 58 mm

 <p>50 Sen Rupiah Logam (06.349)</p>	<p>Tahun Emisi: 1952 Bahan : Tembaga-Nikel Diameter : 20 mm Berat : 3,25 gram</p>
 <p>10 Rupiah Kertas (06.133)</p>	<p>Tahun Emisi: 1952 Ukuran : 138 mm x 80 mm</p>
	<p>Tahun Emisi: 1952 Ukuran : 155 mm x 94 mm</p>

 <p data-bbox="489 572 749 650">1.000 Rupiah Kertas (06.150)</p>	
 <p data-bbox="482 1161 755 1240">10 Sen Rupiah Logam (06.497)</p>	<p data-bbox="912 659 1163 694">Tahun Emisi: 1954</p> <p data-bbox="912 694 1241 729">Bahan : Aluminium</p> <p data-bbox="912 729 1210 764">Diameter : 23,5 mm</p> <p data-bbox="912 764 1172 799">Tebal : 2 mm</p> <p data-bbox="912 799 1210 834">Berat : 1,7 gram</p>
 <p data-bbox="482 1751 755 1843">25 Sen Rupiah Logam (06.451)</p>	<p data-bbox="912 1249 1163 1284">Tahun Emisi: 1955</p> <p data-bbox="912 1284 1241 1319">Bahan : Aluminium</p> <p data-bbox="912 1319 1188 1354">Diameter : 26 mm</p> <p data-bbox="912 1354 1210 1389">Tebal : 1,98 mm</p> <p data-bbox="912 1389 1210 1423">Berat : 2,2 gram</p>

 <p>1 Rupiah Kertas (06.07)</p>	<p>Tahun Emisi: 1956 Ukuran : 135 mm x 65 mm</p>
 <p>2 1/2 Rupiah Kertas (06.09)</p>	<p>Tahun Emisi: 1956 Ukuran : 130 mm x 60 mm</p>
	<p>Tahun Emisi: 1957 Bahan : Aluminium Diameter : 26 mm Tebal : 1,98 mm Berat : 2,2 gram</p>

 <p>25 Sen Rupiah Logam (06.493)</p>	
 <p>50 Sen Rupiah Logam (06.320)</p>	<p>Tahun Emisi : 1958 Bahan : Aluminium Diameter : 29 mm Tebal : 2 mm Berat : 3 gram</p>
 <p>10 Rupiah Kertas (06.110)</p>	<p>Tahun Emisi : 1958 Ukuran : 135 mm x 65 mm</p>

 <p data-bbox="414 790 646 862">25 Rupiah Kertas (06.214)</p>	<p data-bbox="829 235 1236 316">Tahun Emisi: 1958 Ukuran : 143 mm x 73 mm</p>
 <p data-bbox="406 1434 646 1506">100 Rupiah Kertas (06.201)</p>	<p data-bbox="829 884 1236 960">Tahun Emisi: 1958 Ukuran : 150 mm x 78 mm</p>
	<p data-bbox="829 1533 1236 1605">Tahun Emisi: 1958 Ukuran : 165 mm x 85 mm</p>

 <p>1.000 Rupiah Kertas (06.208)</p>	
 <p>50 Sen Rupiah Logam (06.452)</p>	<p>Tahun Emisi: 1959 Bahan : Aluminium Diameter : 29 mm Tebal : 2 mm Berat : 3 gram</p>
 <p>5 Rupiah Kertas (06.05)</p>	<p>Tahun Emisi: 1959 Ukuran : 124 mm x 72 mm</p>

 <p data-bbox="406 819 646 884">25 Rupiah Kertas (06.52)</p>	<p data-bbox="821 229 1244 316">Tahun Emisi: 1959 Ukuran : 140 mm x 72 mm</p>
 <p data-bbox="406 1474 646 1539">50 Rupiah Kertas (06.04)</p>	<p data-bbox="821 895 1244 982">Tahun Emisi: 1959 Ukuran : 150 mm x 65 mm</p>
	<p data-bbox="821 1550 1244 1638">Tahun Emisi: 1959 Ukuran : 165 mm x 85 mm</p>

 <p>100 Rupiah Kertas (06.100)</p>	
 <p>500 Rupiah Kertas (06.200)</p>	<p>Tahun Emisi : 1959 Ukuran : 170 mm x 86 mm</p>
 <p>1 Rupiah Kertas (06.27)</p>	<p>Tahun Emisi : 1960 Ukuran : 118 mm x 65 mm</p>

 <p style="text-align: center;">2½ Rupiah Kertas (06.148)</p>	<p>Tahun Emisi: 1960 Ukuran : 125 mm x 65 mm</p>
 <p style="text-align: center;">5 Rupiah Kertas (06.567)</p>	<p>Tahun Emisi: 1960 Ukuran : 133 mm x 66 mm</p>
 <p style="text-align: center;">50 Rupiah Kertas (06.188)</p>	<p>Tahun Emisi: 1960 Ukuran : 155 mm x 80 mm</p>

	<p>Tahun Emisi: 1960 Ukuran : 160 mm x 85 mm</p>
	<p>Tahun Emisi: 1961 Ukuran : 119 mm x 60 mm</p>
	<p>Tahun Emisi: 1961 Ukuran : 115 mm x 58 mm</p>

 <p>2½ Rupiah Kertas (06.134)</p>	
 <p>10 Rupiah Kertas (06.122)</p>	<p>Tahun Emisi: 1963 Ukuran : 135 mm x 65 mm</p>
 <p>1 Sen Rupiah Kertas (06.37)</p>	<p>Tahun Emisi: 1964 Ukuran : 104 mm x 52 mm</p>

 <p style="text-align: center;">5 Sen Rupiah Kertas (06.20)</p>	<p>Tahun Emisi: 1964 Ukuran: : 103 mm x 56 mm</p>
 <p style="text-align: center;">50 Sen Rupiah Kertas (06.18)</p>	<p>Tahun Emisi: 1964 Ukuran : 113 mm x 56 mm</p>
	

 <p data-bbox="420 511 624 585">1 Rupiah Kertas (06.184)</p>	<p data-bbox="816 242 1219 307">Tahun Emisi : 1964 Ukuran : 121 mm x 59 mm</p>
 <p data-bbox="409 1159 635 1236">25 Rupiah Kertas (06.45)</p>	<p data-bbox="816 598 1219 663">Tahun Emisi : 1964 Ukuran : 150 mm x 73 mm</p>
 <p data-bbox="409 1803 635 1873">50 Rupiah Kertas (06.13)</p>	<p data-bbox="816 1249 1219 1314">Tahun Emisi : 1964 Ukuran : 145 mm x 73 mm</p>

 <p style="text-align: center;">100 Rupiah Kertas (06.84)</p>	<p>Tahun Emisi: 1964 Ukuran : 155 mm x 80 mm</p>
 <p style="text-align: center;">1 Rupiah Kertas (06.113)</p>	<p>Tahun Emisi: 1968 Ukuran : 110 mm x 65 mm</p>
	<p>Tahun Emisi: 1968 Ukuran : 110 mm x 55 mm</p>

 <p>2½ Rupiah Kertas (06.128)</p>	
 <p>5 Rupiah Kertas (06.146)</p>	<p>Tahun Emisi: 1968 Ukuran : 128 mm x 63 mm</p>
 <p>10 Rupiah Kertas (06.83)</p>	<p>Tahun Emisi: 1968 Ukuran : 130 mm x 55 mm</p>

 <p data-bbox="511 755 727 821">1 Rupiah Logam (06.295)</p>	<p data-bbox="914 242 1161 270">Tahun Emisi : 1970</p> <p data-bbox="914 277 1240 305">Bahan : Aluminium</p> <p data-bbox="914 312 1185 340">Diameter : 22 mm</p> <p data-bbox="914 347 1193 375">Tebal : 1,8 mm</p> <p data-bbox="914 382 1221 410">Berat : 1,42 gram</p>
 <p data-bbox="511 1349 727 1415">2 Rupiah Logam (06.309)</p>	<p data-bbox="914 836 1161 864">Tahun Emisi : 1970</p> <p data-bbox="914 871 1240 899">Bahan : Aluminium</p> <p data-bbox="914 906 1185 934">Diameter : 26 mm</p> <p data-bbox="914 941 1221 969">Berat : 2,29 gram</p>
	<p data-bbox="914 1430 1157 1458">Tahun Emisi : 1971</p> <p data-bbox="914 1465 1292 1493">Bahan : Tembaga-Nikel</p> <p data-bbox="914 1500 1185 1528">Diameter : 16 mm</p> <p data-bbox="914 1535 1193 1563">Tebal : 1,2 mm</p> <p data-bbox="914 1570 1221 1598">Berat : 1,77 gram</p>

 <p>10 Rupiah Logam (06.249)</p>	
 <p>25 Rupiah Logam (06.1024)</p>	<p>Tahun Emisi: 1971 Bahan : Tembaga-Nikel Diameter : 20 mm Tebal : 1,4 mm Berat : 3,52 gram</p>
 <p>50 Rupiah Logam (06.1014)</p>	<p>Tahun Emisi: 1971 Bahan : Tembaga-Nikel Diameter : 24 mm Tebal : 1,7 mm Berat : 6,06 gram</p>

 <p>100 Rupiah Logam (06.1013)</p>	<p>Tahun Emisi: 1973 Bahan : Tembaga-Nikel Diameter : 28 mm Tebal : 1,9 mm Berat : 9,8 gram</p>
 <p>5 Rupiah Logam (06.1032)</p>	<p>Tahun Emisi: 1974 Bahan : Aluminium Diameter : 28,6 mm Tebal : 2,2 mm Berat : 3,03 gram</p>
	<p>Tahun Emisi: 1974 Bahan : Baja Berlapis Kuningan Diameter : 22 mm Berat : 4 gram</p>

 <p>10 Rupiah Logam (06.1035)</p>	
 <p>1.000 Rupiah Kertas (06.559)</p>	<p>Tahun Emisi: 1975 Ukuran : 157 mm x 76 mm</p>
 <p>100 Rupiah Logam (06.1023)</p>	<p>Tahun Emisi: 1978 Bahan : Tembaga-Nikel Diameter : 28,5 mm Tebal : 1,4 mm Berat : 7 gram</p>
	<p>Tahun Emisi: 1979 Bahan : Aluminium Diameter : 25 mm Tebal : 1,8 mm Berat : 1,9 gram</p>

 <p>10 Rupiah Logam (06.1038)</p>	
 <p>50 Rupiah Logam (06.1045)</p>	<p>Tahun Emisi: 1991 Bahan : Aluminium-Perunggu Diameter : 20 mm Tebal : 1,58 mm Berat : 3,18 gram</p>
 <p>100 Rupiah Logam (06.1034)</p>	<p>Tahun Emisi: 1993 Bahan : Aluminium-Perunggu Diameter : 22 mm Tebal : 1,6 mm Berat : 4,13 gram</p>

 <p data-bbox="404 755 633 821">25 Rupiah Logam (06.1040)</p>	<p data-bbox="812 242 1141 417">Tahun Emisi: 1996 Bahan : Aluminium Diameter : 18 mm Tebal : 2 mm Berat : 1,22 gram</p>
 <p data-bbox="404 1349 633 1415">100 Rupiah Logam (06.1036)</p>	<p data-bbox="812 836 1273 1011">Tahun Emisi: 1996 Bahan : Aluminium-Perunggu Berat : 4,13 gram Diameter : 22 mm Tebal : 1,6 mm</p>
	<p data-bbox="812 1434 1313 1688">Tahun Emisi: 1996 Bahan : Tembaga-Nikel dan Aluminium-Nikel-Perunggu Diameter : 26 mm Tebal : 2,2 mm Berat : 8,6 gram</p>

 <p>1.000 Rupiah Logam (06.1047)</p>	
 <p>500 Rupiah Logam (06.1037)</p>	<p>Tahun Emisi: 2000 Bahan : Aluminium-Perunggu Diameter : 24 mm Tebal : 1,75 mm Berat : 5,3 gram</p>
 <p>1.000 Rupiah Logam (06.1043)</p>	<p>Tahun Emisi: 2000 Bahan : Tembaga-Nikel dan Aluminium-Nikel-Perunggu Diameter : 26 mm Tebal : 2,2 mm Berat : 8,6 gram</p>

 <p data-bbox="406 760 651 825">100 Rupiah Logam (06.1041)</p>	<p data-bbox="831 235 1289 417">Tahun Emisi: 2001 Bahan : Aluminium-Perunggu Diameter : 23 mm Tebal : 2 mm Berat : 1,79 gram</p>
 <p data-bbox="411 1371 655 1437">500 Rupiah Logam (06.1046)</p>	<p data-bbox="831 847 1294 1028">Tahun Emisi: 2001 Bahan : Aluminium-Perunggu Diameter : 24 mm Tebal : 1,83 mm Berat : 5,34 gram</p>
	<p data-bbox="831 1447 1166 1629">Tahun Emisi: 2002 Bahan : Aluminium Diameter : 20 mm Tebal : 2 mm Berat : 1,36 gram</p>

 <p>50 Rupiah Logam (06.1050)</p>	
 <p>500 Rupiah Logam (06.1044)</p>	<p>Tahun Emisi : 2002 Bahan : Aluminium-Perunggu Diameter : 24 mm Tebal : 1,83 mm Berat : 5,34 gram</p>
	<p>Tahun Emisi : 2003 Bahan : Aluminium-Perunggu Diameter : 24 mm Tebal : 1,75 mm Berat : 5,3 gram</p>
 <p>500 Rupiah Logam (06.1033)</p>	

 <p style="text-align: center;">100.000 Rupiah Kertas (06.1053)</p>	<p>Tahun Emisi: 2004 Ukuran : 151 mm x 65 mm</p>
 <p style="text-align: center;">20.000 Rupiah Kertas (06.1054)</p>	<p>Tahun Emisi: 2004 Ukuran : 147 mm x 65 mm</p>
 <p style="text-align: center;">200 Rupiah Logam (06.1051)</p>	<p>Tahun Emisi: 2005 Bahan : Aluminium Diameter : 25 mm Tebal : 2,3 mm Berat : 2,38 gram</p>



PENUTUP

Kesimpulan

Uang berarti alat tukar atau standar pengukur nilai (kesatuan hitungan) yang sah, dikeluarkan oleh pemerintah suatu negara, berupa kertas, emas, perak, atau logam lain yang dicetak dengan bentuk dan gambar tertentu; uang juga diartikan sebagai harta atau kekayaan. Sedangkan satuan (harga) uang suatu negara disebut dengan mata uang. Sepanjang peradaban manusia, uang telah mengalami perubahan dan perkembangan.

Uang, pada prinsipnya, adalah suatu benda yang diterima secara umum dan dapat dipertukarkan dengan benda lain; digunakan untuk menilai benda lain; disimpan; dan memiliki nilai yang relatif tidak berubah-ubah (tetap). Pada awalnya, uang hanya difungsikan sebagai alat tukar, tetapi fungsi uang terus berkembang seiring dengan perkembangan aktivitas perekonomian. Secara umum, uang memiliki fungsi dasar sebagai alat tukar, penyimpan nilai, dan satuan hitung. Selain itu, uang juga berfungsi sebagai ukuran pembayaran yang tertunda.

Perkembangan uang bermula dari uang komoditas—yang berasal dari komoditas tertentu, misalnya kayu, batu, kulit hewan, cangkang kerang, dan besi—hingga diciptakan uang logam yang terbuat dari emas dan perak. Uang logam sudah dikenal sejak 600–500 Sebelum Masehi. Pada awal abad Masehi, seseorang dari Tiongkok menciptakan uang kertas. Uang logam dan kertas digunakan secara bersamaan hingga sekarang, di seluruh dunia.

Selain uang tunai—berupa kertas maupun logam—dalam transaksi ekonomi, terdapat penggunaan uang non-tunai yang sudah dikenal secara terbatas sejak abad XVIII Masehi. Hingga, baru pada awal abad XX Masehi, proses *giralisasi*, yaitu penyimpanan uang dalam bentuk rekening giro (*demand deposit*) dikenal secara luas, bahkan jumlahnya melebihi uang tunai yang beredar. Simpanan tabungan (*savings deposit*) juga mulai dikenal. Pada 1950-an, jumlah simpanan tabungan lebih besar dibandingkan simpanan giro. Baik simpanan giro maupun tabungan, dalam transaksinya, menggunakan uang non-tunai—hingga saat ini disebut dengan “cek”.

Sejak 1990-an, penggunaan uang elektronis, seperti *internet banking*, *debit cards*, dan *automatic teller machine (ATM) cards* cenderung masih digunakan oleh masyarakat. Uang elektronis bahkan juga muncul dalam bentuk *smart cards*. Dalam perkembangan saat ini, telah muncul uang digital (*digital money*) dan mata uang *Kripto*. Mata uang *Kripto* adalah

aset digital yang dirancang untuk bekerja sebagai media pertukaran yang menggunakan Kriptografi yang kuat untuk mengamankan transaksi keuangan, mengontrol penciptaan unit tambahan, dan memverifikasi transfer aset.

Uang logam perak koleksi Museum Nasional (Nomor Inventarisasi 2087 dan 2119) peninggalan masa kerajaan Hindu-Buddha merupakan bukti tertua penggunaan uang di Pulau Jawa. Diperkirakan, uang ini telah digunakan sekitar 569 Saka atau 647 Masehi. Di Pulau Jawa, prasasti-prasasti tidak lagi menyebutkan mata uang Jawa (perak dan emas) setelah 1300-an, kecuali hanya menyebut "Picis", yaitu mata uang dari Tiongkok—terbuat dari tembaga, bentuknya kecil dan bulat, serta mempunyai lubang persegi di bagian tengahnya. Picis tersebut juga dikenal dengan sebutan "Kepeng". Kepeng sangat banyak ditemukan di beberapa daerah di Indonesia—mulai tersebar bersamaan dengan meningkatnya aktivitas perdagangan antara Kekaisaran Tiongkok dan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Kepeng yang ditemukan di Indonesia berasal dari berbagai dinasti yang pernah berkuasa di Kekaisaran Tiongkok, yaitu Dinasti Han, Tang, Song, Yuan, Ming, dan Qing.

Selain di Pulau Jawa, aktivitas perdagangan dengan Kekaisaran Tiongkok juga dilakukan oleh kerajaan-kerajaan di Pulau Sumatera, bahkan jauh sebelum era Kedatuan Sriwijaya. Kedatuan Sriwijaya yang berkuasa sejak abad VII Masehi meninggalkan jejak-jejak aktivitas perdagangan dengan Kekaisaran Tiongkok melalui berbagai artefak, seperti gerabah, keramik, dan manik-manik. Namun, hingga saat ini, bukti penggunaan mata uang yang dibuat oleh Kedatuan Sriwijaya belum ditemukan, padahal di Sumatera Selatan (sebagai pusat pemerintahan Kedatuan Sriwijaya), khususnya di Daerah Aliran Sungai (DAS) Musi, banyak sekali ditemukan Kepeng—dari Dinasti Qin hingga Qing.

Setelah keruntuhan Kedatuan Sriwijaya pada abad XIII Masehi (versi lain menyebutkan pada abad XIV Masehi), tepatnya ketika wilayah Sumatera Selatan memasuki era Pengaruh Majapahit, mata uang lain yang juga digunakan adalah mata uang Kerajaan Majapahit, yaitu *Gobog*. Kepeng dan *Gobog* setidaknya masih digunakan hingga 1500-an.

Pada periode pemerintahan kerajaan Islam di Sumatera Selatan (abad XVI–XIX Masehi), Kerajaan Palembang dan Kesultanan Palembang Darussalam juga mengeluarkan mata uang, yaitu "Pitis" yang terbuat dari campuran timah hitam dan putih. Sedangkan pada periode yang hampir bersamaan, kedatangan VOC (*Verenigde Oostindische Compagnie*) ke Sumatera Selatan juga membawa bermacam-macam mata uang, seperti *Rijksdaalder*, *Dukat*, *Stuiver*, *Gulden*, dan *Doit*. Bahan yang digunakan adalah emas, perak, tembaga, nikel, dan

timah. Mata uang VOC tersebut dibuat di Belanda. Pada 1854, setelah Hindia Belanda—termasuk Sumatera Selatan—dikuasai oleh Kerajaan Belanda, diputuskan semua mata uang yang digunakan di Hindia Belanda diganti dengan mata uang yang beredar di Belanda. Namun, penyatuan mata uang berakhir pada masa Pendudukan Jepang. Pada awalnya, Pemerintah Pendudukan Jepang tidak mencetak mata uang khusus untuk daerah-daerah Pendudukan. Namun, pada akhirnya, Jepang menerbitkan mata uang baru. Seri *De Japansche Regeering* adalah uang kertas pertama yang diterbitkan oleh Pemerintah Pendudukan Jepang—dengan nilai nominal 5 Gulden.

Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, mata uang Pendudukan Jepang masih dianggap sah bersama mata uang *De Javasche Bank* (DJB) emisi 1925–1941 dan mata uang Pemerintah Hindia Belanda emisi 1940–1941. Pemerintah Indonesia menerbitkan *Oeang Republik Indonesia* (ORI), tetapi juga harus berhadapan dengan mata uang NICA (*Netherlands-Indies Civil Administration*). Bahkan karena terhambatnya peredaran ORI, Pemerintah Provinsi Sumatera mengambil inisiatif untuk mencetak uang sendiri dengan nama *Oeang Republik Indonesia Provinsi Sumatera* (ORIPS). Beredaranya ORIPS di Sumatera, pada akhirnya, membuat Pemerintah Pusat mengizinkan pencetakan ORIPS. Selanjutnya, uang yang dicetak oleh pemerintah lokal di bawahnya disebut ORIDA (*Oeang Republik Indonesia Daerah*). Secara umum, ORIDA yang dicetak di wilayah Sumatera Selatan, saat itu, terdiri dari ORIPS Sumatera Selatan, ORIDA Palembang, ORIDA Jambi, ORIDA Bengkulu, dan ORIDA Lampung. Selain itu, terdapat pula uang Mandat DPDP (Dewan Pertahanan Daerah Palembang), *Cheque Brigade Garuda Dempo*, ORIPS DMISS (Daerah Militer Istimewa Sumatera Selatan), hingga Bon Beras Subkoss (Sub-Komandemen Sumatera Selatan).

Menyusul terbentuknya Republik Indonesia Serikat (RIS), setelah pengakuan kedaulatan melalui Konferensi Meja Bundar (KMB) tahun 1949, terbit pula uang RIS yang disebut “uang federal”. Namun, pada 17 Agustus 1950, Pemerintah Republik Indonesia menyatakan RIS dibubarkan. Bentuk pemerintahan kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peredaran uang RIS juga menyusul kemudian. Hingga kini, Rupiah masih menjadi mata uang resmi yang berlaku di Indonesia.

Pada Desember 1951, DJB dinasionalisasikan menjadi Bank Indonesia (BI)—sebagai bank sentral. Seiring dengan nasionalisasi tersebut, Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1951 sebagai pengganti “*Indische Muntwet 1912*” (Undang-undang Hindia Belanda). Dalam undang-undang ini, dinyatakan, (1)

Semua logam yang dikeluarkan berdasarkan *Indische Muntwet* dicabut mulai 3 November 1951, kecuali uang tembaga yang pencabutannya masih akan ditentukan oleh Menteri Keuangan; (2) Satuan hitung dari uang di Indonesia adalah Rupiah yang disingkat Rp dan terbagi menjadi 100 sen; (3) Uang logam Indonesia yang merupakan alat pembayaran yang sah adalah dari nikel dalam pecahan 50 sen serta dari aluminium pecahan 25 sen, 10 sen, 5 sen, dan 1 sen; (4) Untuk memenuhi kebutuhan yang mungkin timbul pada suatu waktu, Pemerintah dapat mengeluarkan kertas pecahan 1 Rupiah dan 2,50 Rupiah; (5) Pembuatan uang logam dan uang kertas Pemerintah hanya dapat dilakukan oleh atau atas nama Pemerintah; (6) Menteri Keuangan menetapkan desain logam nikel dan aluminium, kadar logam uang, berat, dan ukuran garis tengah, serta batas toleransinya; (6) Di daerah-daerah tertentu, dengan Peraturan Pemerintah, dimungkinkan untuk sementara waktu dilakukan pembayaran dengan uang selain tersebut di atas.

Berdasarkan Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1951 Tentang Penghentian Berlakunya "Indische Muntwet 1912" dan Penetapan Peraturan Baru Tentang Mata Uang, BI mulai merilis uang kertas baru, mulai dari 1 Rupiah hingga 100 Rupiah pada 1952-1953. Pada 1 Juli 1953, Pemerintah mengeluarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1953 Tentang Penetapan Undang-undang Pokok Bank Indonesia yang mengesahkan BI sebagai "bank sentral". Setelah BI berdiri maka terdapat dua jenis Rupiah yang berlaku sebagai alat pembayaran yang sah di wilayah Republik Indonesia, yaitu Rupiah yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia (Kementerian Keuangan) dan BI. Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan uang kertas dan logam pecahan di bawah 5 Rupiah, sedangkan BI menerbitkan uang kertas pecahan 5 Rupiah ke atas. Dualisme pengeluaran mata uang ini berlangsung hingga 1968.

Selanjutnya, pengeluaran uang kertas maupun logam dilakukan oleh BI. Langkah ini didasarkan pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1968 Tentang Bank Sentral. Pertimbangannya adalah antara uang kertas yang dikeluarkan oleh BI dan Pemerintah, secara ekonomi, dipandang tidak ada perbedaan fungsional sehingga untuk keseragaman dan efisiensi pengeluaran uang, cukup dilakukan oleh satu instansi saja, yaitu Bank Indonesia.

Mata uang yang beredar di wilayah Sumatera Selatan, mulai dari masa kerajaan Hindu-Buddha hingga Negara Kesatuan Republik Indonesia, beberapa menjadi bagian dari koleksi Museum Negeri Sumatera Selatan. Koleksi mata uang tersebut berjumlah 11.076 buah yang

terdiri dari (1) Kepeng Dinasti Han Timur hingga Dinasti Ming; (2) *Gobog*; (3) Pitis Demak; (4) Pitis Palembang “*Tebok*” dan “*Buntu*”; (5) *Doit*; (6) Koin “*Ayam*”; (7) *Gulden* Logam dan Kertas Hindia Belanda (Emisi 1913, 1915, 1920, 1921, 1922, 1929, 1937, 1938, dan 1943); (8) *Gulden* Jepang; (9) *Gulden* NICA (Emisi 1946); (10) ORIPS (Emisi 1947 dan 1948); (11) ORIPS Sumatera Selatan (Emisi 1948); (12) Rupiah Mandat DPDP (Emisi 1947); (13) ORIDA Lampung (Emisi 1948); (14) Rupiah RIS (Emisi 1950); (15) “*Gunting*” Sjafruddin; serta (16) Rupiah Republik Indonesia (Emisi 1951, 1952, 1954, 1955, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1963, 1964, 1968, 1970, 1971, 1973, 1974, 1975, 1978, 1979, 1991, 1993, 1996, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, dan 2005).

Saran

Kegiatan pengkajian koleksi museum bertujuan untuk meneliti benda-bendainggalan sejarah dan budaya dalam upaya pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan—diharapkan dapat terus terlaksana dan menjadi agenda tahunan Museum Negeri Sumatera Selatan. Namun, dalam teknik pengumpulan data, selain melalui studi kepustakaan dan studi koleksi museum, diharapkan juga dapat melaksanakan studi lapangan. Hal ini sangat penting untuk melengkapi data atau informasi pendukung kajian sehingga akan diperoleh bentuk kajian dengan standar optimal.

Pengkajian terhadap mata uang yang beredar di wilayah Sumatera Selatan, mulai dari masa kerajaan Hindu-Buddha hingga Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghasilkan banyak informasi kesejarahan. Namun, dikarenakan kendala teknis, belum seluruh mata uang, termasuk berbagai alat tukar logam bukan koin hasil temuan Sungai Musi (Foto 1–4), dapat dikaji atau diteliti. Untuk itu, sebaiknya dilakukan pengkajian atau penelitian lanjutan atas hasil pengkajian ini untuk menyempurnakan kajian yang ada; tidak menutup kemungkinan mengkaji konten-konten yang belum diteliti secara maksimal.



Foto 1 dan 2. Alat Tukar Timah Temuan Sungai Musi
sumber: Koleksi Museum Negeri Sumatera Selatan



Foto 3. *Animal Currency* (Mata Uang Hewan)
sumber: Koleksi Museum Negeri Sumatera Selatan



Foto 4. Mata Uang "Tampang"
sumber: Koleksi Museum Negeri Sumatera Selatan

Hasil pengkajian mata uang koleksi Museum Negeri Sumatera Selatan diharapkan dapat memberikan kontribusi atau referensi dalam kegiatan pameran, seperti penyusunan alur cerita, pembuatan infografis, dan narasi koleksi dalam bentuk label. Selain itu, dapat juga dijadikan literatur dalam penyusunan buku panduan, *booklet*, *leaflet*, brosur, dan publikasi koleksi museum melalui internet.

Pengkajian dilakukan dengan meneliti berbagai jenis mata uang yang sebagian bukan merupakan koleksi museum, seperti *Ma*, *Rijksdaalder*, *Dukat*, *Doubloon*, *Real*, *Stuiver*, *Dubbeltje*, *Shillin*, *Thaler Maria Theresa*, serta ORIDA Sumatera Selatan: *Cheque* Brigade Garuda Dempo (Foto 5-7), *Cheque* DPDP (Foto 8), ORIPS DMISS (Foto 9 dan 10), serta Bon Beras Subkoss (Foto 11).





Foto 5, 6, dan 7. *Cheque* Brigade Garuda Dempo Emisi 1947
sumber: Koleksi Dudy Oskandar



Foto 8. *Cheque* DPDP Emisi 1949
sumber: Koleksi Dudy Oskandar



Foto 9 dan 10. ORIPS DMISS Emisi 1949
sumber: Koleksi Dudy Oskandar



Foto 11. Bon Beras Subkoss
sumber: Koleksi Dudy Oskandar

Mata uang tersebut, keberadaannya, tersebar di berbagai wilayah Provinsi Sumatera Selatan, bahkan ada yang berada di luar Provinsi Sumatera Selatan hingga luar negeri—sangat penting dalam upaya menggali informasi peredaran mata uang di wilayah Sumatera Selatan. Berdasarkan fakta tersebut, perlu dilakukan pengadaan koleksi mata uang, baik melalui pembelian benda *realia* maupun pembuatan duplikatnya; serta digitalisasi koleksi dan bukan koleksi dalam bentuk arsip. Selain itu, perlu dilakukan juga inventarisasi untuk mengetahui keberadaan mata uang yang masih tersebar di beberapa tempat, baik yang dimiliki masyarakat maupun yang terarsip dalam arsip negara; baik di dalam maupun luar negeri. Hal ini sangat urgen—agar keutuhan, keselamatan, dan kelangsungan peninggalan mata uang yang dicetak maupun diedarkan di wilayah Sumatera Selatan dapat dipergunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan serta penguatan jati diri bangsa dan nasionalisme.

Pengkajian juga mendapatkan fakta bahwa Sumber Daya Manusia (SDM) yang memahami koleksi mata uang di Museum Negeri Sumatera Selatan masih belum memadai, baik kuantitas maupun kualitas. Disarankan kepada pihak pengelola untuk melakukan peningkatan pada aspek ini.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asngari, Imam, dkk., 2020. *Ekonomi Islam: Warisan Kerajaan Palembang dan Kesultanan Palembang Darussalam*. Palembang: Museum Negeri Sumatera Selatan.
- Davies, Glyn. 2002. *A History of Money from Ancient Times to the Present Day*. 3rd Ed. Cardiff: University of Wales Press.
- Harafiah, Johan, dkk. 2015. *Tokoh Pejuang Kemerdekaan RI: H. Abdul Rozak*. Palembang: Tanpa Penerbit.
- Harsono, Suwito dan Michell Suharti. 2020. *ORIDA: Orang Republik Indonesia Daerah 1947–1949*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Hatta, Mohammad. 1987. *Kumpulan Pidato*. Jakarta: Yayasan Idayu.
- Juhro, Solikin M. 2020. *Pengantar Kebanksentralan: Teori dan Kebijakan*. Jakarta: Radja Grafindo Persada.
- Kartodirdjo, Sartono. 1993. *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- LP3ES. 2020. *Bank Indonesia dalam Kilasan Sejarah Bangsa*. Jakarta: LP3ES.
- Mankiw, N.G. 1999. *Macroeconomics*. New York: Worth Publishers.
- Manullang, M. 1977. *Ekonomi Moneter*. Cetakan kelima. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Manuring, Mandala dan Pratama Rahardja. 2004. *Uang, Perbankan, dan Ekonomi Moneter: Kusus Kontekstual Indonesia*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Mishkin, F.S. 1992. *The Economics of Money, Banking, and Financial Markets*. New York: Harper Collins Publishers.
- Prawiranegara, Syafruddin. 1988. *Ekonomi dan Keuangan: Makna Ekonomi Islam*. Jakarta: CV. H. Masagung.
- Sigalingging, H., dkk. 2004. *Kebijakan Pengedaran Uang di Indonesia*. Seri Kebanksentralan No. 13. Jakarta: Bank Indonesia.
- Solikin dan Suseno. 2002. *Uang: Pengertian, Penciptaan dan Peredarannya dalam Perekonomian*. Seri Kebanksentralan No. 1. Jakarta: Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia.
- Sugiyanto, F.X. dan Puji Lestari. 2011. *Ekonomi Moneter*. Jakarta: Universitas Terbuka.

- Tim Penyusun Sejarah Perjuangan Subkoss. 2003. *Sejarah dan Peranan Subkoss dalam Perjuangan Rakyat Sumbagsel (1945–1950)*. Palembang: CV. Komring Jaya.
- Yuarsa, Feris. 2016. *Mohammad Isa: Pejuang Kemerdekaan yang Visioner*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Yuliadi, Imammudin. 2008. *Ekonomi Moneter*. Jakarta: PT. Indeks.

Terbitan Berkala

- Hanggoro, Hendaru Tri. "Lahirnya Uang Putih". *Jelajah Sejarah Rupiah*, XV (157), Oktober 2020. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- _____. "Mengenal Oeang Republik Indonesia Daerah: ORIDA". *Jelajah Sejarah Rupiah*, XV (157), Oktober 2020. Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Indriastuti, Kristantina. 2010. "Perekonomian dan Perdagangan pada Masa Perundagian: Kajian Data Megalitik di Dataran Tinggi Pasemah Sumatera Selatan". *Jurnal Penelitian Arkeologi Papua*, 2 (1). Jayapura: Balai Arkeologi.
- Isnaeni, Hendari F. 2020. "Merentang Sejarah Uang". *Jelajah Sejarah Rupiah*, XV (157). Jakarta: Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Iskandar, Mohammad. "Oeang Republik dalam Kancah Revolusi". *Jurnal Sejarah*, 6 (1), Agustus 2004.
- McKinnon, Ronald I. "The Rules of the Game: International Money in Historical Perspective". *Journal of Economic Literature*, 31 (1), Maret 1993.

Konten Daring

- https://id.m.wikipedia.org/wiki/Mata_uang_kripto#:~:text=Mata%20uang%20kripto%20adalah%20aset,tambahan%2C%20dan%20memverifikasi%20transfer%20aset
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/mata%20uang>
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Uang>
- <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpebbali/uang-kepeng-cina/>
- <https://www.bi.go.id/id/fungsi-utama/sistem-pembayaran/pengelolaan-rupiah/default.aspx>
- <https://www.bi.go.id/id/layanan/museum-bi/koleksi-museum/default.aspx>
- <https://www.simulasikredit.com/sejarah-munculnya-uang/>
- <https://www.thoughtco.com/history-of-money-1992150>

Sumber Tertulis Lain

- Republik Indonesia. 1946. *Undang-undang Nomor 17 Tahun 1946 Tentang Pengeluaran Uang Republik Indonesia*. Yogyakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 1953. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1953 Tentang Penetapan Undang-undang Pokok Bank Indonesia*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 1965. *Penetapan Presiden Nomor 27 Tahun 1965 Tentang Pengeluaran Uang Rupiah Baru yang Berlaku Sebagai Alat Pembayaran yang Sah bagi Seluruh Wilayah Republik Indonesia dan Penarikan Uang Rupiah Lama dari Peredaran*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 1968. *Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 Tentang Bank Sentral*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. 2011. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang*. Jakarta: Sekretariat Negara.

DAFTAR NARASUMBER

1. Nama : Drs. Syafruddin Yusuf, M.Pd., Ph.D.
Pekerjaan : Dosen Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya

2. Nama : Dr. Imam Asngari, S.E., M.Si.
Pekerjaan : Koordinator Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya

3. Nama : Drs. R.M. Ali Hanafiah, M.M.
Pekerjaan : Budayawan Palembang

4. Nama : Drs. Yudhy Syarofie
Pekerjaan : Budayawan Sumatera Selatan

5. Nama : Dudy Oskandar, S.H.
Pekerjaan : Jurnalis dan Peminat Sejarah Sumatera Selatan

6. Nama : Beny Pramana Putra, S.S.
Pekerjaan : Pemerhati Budaya Sumatera Selatan